



③ ANNUAL EDITION 2025

- GPR, Oksigen Pembangunan Bangsa di Era *Cognitive Warfare*
- *Evidence-Based Communication*: Pilar Baru GPR
- Transformasi Gaya Humas Pemerintah di Era Keterbukaan



GPR CHAMPION 2025 PRESTASI & DEDIKASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DIGITAL

EDISI 3 TAHUN 2025





Selamat dan Sukses
**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI**

Atas Diraihnya Penghargaan

**Top GPR
Award 2025**

Dalam Ajang
**5th Top Government
Public Relations Award 2025**



Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H
Gubernur Jambi

Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i
Wakil Gubernur Jambi





Selamat dan Sukses **Menteri Kehutanan RI**

Atas Diraihnya Penghargaan

Top GPR Figure Award 2025

Dalam Ajang

**5th Top Government
Public Relations Award 2025**

Raja Juli Antoni, MA., Ph.D
Menteri Kehutanan RI



gprinstitute.id



GPR Institute



[gpr_institute](https://www.instagram.com/gpr_institute)



8



10



16



18

GPR Champions 2025: Apresiasi, Refleksi, dan Penguatan Peran Kehumasan Pemerintah <i>Redaksi Majalah GPR</i>	6	32	Apresiasi Tertinggi untuk Humas Pemerintah yang Berhasil Bangun Kepercayaan Publik <i>TOP GPR Award</i>
Sinergi GPR, Bangun Budaya Keterbukaan sebagai Fondasi Kepercayaan Publik Arief Munajad, SE., M.M. <i>Direktur GPR Institute</i>	7	33	GPR Award 2025, Tolok Ukur Komunikasi Digital Pemerintah Berbasis Riset dan Objektif <i>TOP GPR Award</i>
GPR, Oksigen Pembangunan Bangsa di Era cognitive warfare Prof. Dr. Widodo Muktiyo <i>Founder GPR Institute</i> <i>Rektor Universitas Al Azhar Indonesia</i>	8	34	Kementerian ATR/BPN Raih Top GPR Award 2025, Digital PR Kunci Keterbukaan Informasi <i>TOP GPR Award</i>
<i>Evidence-Based Communication</i> , Pilar Baru GPR dalam Menjaga Stabilitas Tri Raharjo, SE, MM, CDMs, CPR. <i>Co-Founder, GPR Institute</i>	10	37	Sukses Lakukan Transformasi Komunikasi Publik, Kemenag RI Raih TOP GPR Award 2025 <i>TOP GPR Award</i>
Transformasi Gaya Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi Fachrudin Ali Ahmad <i>Ketua Umum IPRAHUMAS</i>	12	39	Semangat Transformasi Layani Negeri, Kementerian PANRB Sukses Raih Top GPR Award 2025 <i>TOP GPR Award</i>
Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Dorong Gerakan "Indonesia Bicara Baik" Boy Kelana Soebroto <i>Ketua Umum PERHUMAS</i>	13	42	Kemenhut RI Raih TOP GPR Award 2025, Evolusi Komunikasi Publik Dari Responsif ke Proaktif <i>TOP GPR Award</i>
Era Baru Komunikasi Pemerintah, Metode Penilaian TOP GPR Figure 2025 <i>TOP GPR Figure</i>	15	44	Kemendikdasmen Raih TOP GPR AWARD 2025, Program Pendidikan Bermutu untuk Semua <i>TOP GPR Award</i>
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Juara Top GPR Figure 2025 <i>TOP GPR Figure</i>	16	46	Kemdiktisaintek Diganjar TOP GPR Award 2025, Komunikasi Publik yang Inovatif, Transparan, dan Berdampak <i>TOP GPR Award</i>
Top GPR Figure 2025, Mendikdasmen Ingin Pendidikan Bermutu Untuk Semua <i>TOP GPR Figure</i>	18	48	Raih TOP GPR Award 2025, Pemprov Jambi Sukses Bangun Komunikasi Digital yang Transparan <i>TOP GPR Award</i>
Top GPR Figure 2025 Menghidupkan Hutan Lewat Komunikasi Berhati <i>TOP GPR Figure</i>	20	50	Pemprov Kaltim Meraih TOP GPR Award 2025, Mengelola Komunikasi Publik Digital Efektif, <i>TOP GPR Award</i>
GPR Champions 2025, Penghargaan untuk Komunikasi Publik Unggul <i>GPR Champion</i>	23	52	Pemkab Tabalong Raih Top GPR Award 2025 <i>TOP GPR Award</i>
Kemendikdasmen Berhasil Raih 4 Penghargaan dari GPR Institute 2025 <i>GPR Champion</i>	24	55	Kelola Komunikasi Publik dengan Apik, Kabupaten Tanah Laut Bangga Diapresiasi Top GPR Award 2025 <i>TOP GPR Award</i>
Kemdiktisaintek Raih TOP GPR Champion 2025, Komunikasi Publik yang Selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo <i>GPR Champion</i>	27		



Pemkab Klaten Fokus
Garap Komunikasi Publik
Berbuah Penghargaan TOP GPR Award

58

TOP GPR Award

Pemkot Pekalongan Raih Top GPR Award
2025, Keterbukaan Informasi
sebagai Jembatan Kepercayaan Rakyat

61

TOP GPR Award

TOP GPR Leader Award 2025
Pengakuan atas Kepemimpinan Inovatif
dalam Komunikasi Publik Digital 2025

66

TOP GPR Leader

Kepala BKHM Kemendikdasmen Raih
Top GPR Leader 2025, Inspirasi
Komunikasi Publik Pemerintah

68

TOP GPR Leader

Konsistensi Terapkan Prinsip GPR,
Kabiro BUHPBJ Kemdiktisaintek, Raih
TOP GPR Leader 2025

69

TOP GPR Leader

Mohammad Averrouce Masuk TOP GPR
Leader 2025, Inovasi Komunikasi Publik
Bawa PANRB ke Puncak Nasional

70

TOP GPR Leader

Ariansyah, Kadis Kominfo Provinsi Jambi
Raih TOP GPR Leader 2025

71

TOP GPR Leader

Kadiskominfo Provinsi Kaltim,
Muhammad Faisal Sukses Raih
Top GPR Leader 2025

72

TOP GPR Leader

Komunikasi yang Transparan,
Kunci Bangun Kepercayaan Rakyat

75

ASTACITA

Tingkat Kepuasan Publik
Presiden Prabowo Naik Berkat Dua
Orang Dekat

76

ASTACITA

Puaskah Publik Pada Kinerja
Presiden Prabowo?

76

ASTACITA

Letkol Teddy, Dari Ajudan Militer
Presiden Prabowo Menjadi Jubir Istana

79

ASTACITA

Gaya Komunikasi Menteri Purbaya
Terbuka, Bangun Perubahan Ekonomi
dan Kepercayaan Rakyat

81

Ir. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc., Ph.D.,
Menteri Keuangan RI

82

Transparansi Komunikasi dan
Partisipasi Publik, Dua Arus Utama Arah
Kebijakan Era Presiden Prabowo

Hj. Meutya Viada Hafid, B. Eng., M.I.P
Menteri Komunikasi dan Digital,

83

Pentingnya GPR di Daerah, Jembatan
Sinergi Asta Cita Presiden Prabowo

**Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad
Tito Karnavian, M.A., Ph.D.**

Menteri Dalam Negeri

84

Gaya dan Komunikasi Publik
Presiden Kian Moncer

Angga Raka Prabowo, S.Sos

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital,
Kepala Kantor Komunikasi Presiden

85

Komunikasi Prabowo Lugas,
Personal dan Berani

Muhammad Sufyan Abd

Dosen Digital PR Telkom University

86

Gaya Komunikasi Prabowo Keren, Ini
Panduan Pejabat Publik dan Humas
Pemerintah Laksanakan GPR di Daerah

Helmy Yahya, MPAcc, Akt., CPMA, CA

Ketua Asosiasi Konten Creator Indonesia

88

Menjaga Keseimbangan Narasi,
Fokus Pada Keberlanjutan

Silih Agung Wasesa

CEO ASIA Public Relation

90

Komunikasi Publik Presiden
Prabowo Mulai Berbuah Manis

Fawzi Rahman, S.H.

Direktur Eksekutif LSI Strategy

91

Peran Media Sosial dalam GPR
Pedesaan, Realistik, Bukan Euforia

ASTACITA

93

Praktek Government Public
Relations di Daerah Terpencil, Pedoman
Teknis bagi Humas

ASTACITA

96

Narasi Nasionalisme, Kedaulatan,
dan Ketahanan Pangan di Era
Kabinet Merah Putih

ASTACITA

98

Asta Cita dan GPR, Membangun
Kepercayaan Menuju Indonesia
Emas 2045

ASTACITA

GPR Champion 2025: Apresiasi, Refleksi, dan Penguatan Peran Kehumasan Pemerintah

Dengan penuh rasa syukur, edisi khusus Annual Achievement Reports: GPR Champion 2025 kembali hadir untuk ketiga kalinya. Tahun ini, publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi capaian, tetapi juga sebagai cermin reflektif atas berbagai strategi komunikasi publik yang telah dijalankan oleh institusi pemerintah di tingkat nasional maupun daerah. Semangat apresiatif dan reflektif inilah yang menjadi ruh utama penyusunan laporan ini.

Government Public Relations (GPR) memegang peran yang sangat vital dalam memastikan setiap program, kebijakan, dan inisiatif pemerintah tersampaikan secara tepat, terbuka, dan berdampak bagi masyarakat. GPR bukan sekadar aktivitas diseminasi informasi, melainkan proses jangka panjang membangun dan menjaga kepercayaan antara pemerintah dan public sebuah proses yang menuntut integritas, profesionalisme, dan inovasi tanpa henti. Di tengah deras arus informasi dan percepatan teknologi ko-

munikasi, para praktisi GPR menghadapi tantangan yang semakin kompleks: misinformasi, disinformasi, fragmentasi audiens, hingga tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks tersebut, GPR Champion 2025 dihadirkan sebagai ruang apresiasi bagi institusi-institusi inspiratif di balik keberhasilan komunikasi publik, sekaligus ruang belajar bersama untuk memperkuat standar praktik kehumasan pemerintah di Indonesia.

Melalui laporan ini, GPR Institute menegaskan komitmennya sebagai katalisator penguatan peran GPR bukan hanya memberi apresiasi, tetapi sebagai mitra strategis dalam peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas institusi komunikasi publik. Redaksi berharap edisi ini dapat menjadi rujukan, inspirasi, dan pemicu kolaborasi lintas lembaga menuju ekosistem GPR yang lebih berdampak, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

Akhirnya, redaksi menyampaikan

Redaksi berharap edisi ini dapat menjadi rujukan, inspirasi, dan pemicu kolaborasi lintas lembaga menuju ekosistem GPR yang lebih berdampak, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

apresiasi kepada seluruh instansi pemerintah, pejabat kehumasan, mitra komunikasi, serta tim penyusun yang telah berkontribusi dalam terwujudnya publikasi ini. Selamat kepada para institusi yang terpilih sebagai GPR Champion 2025 semoga terus menjadi pelopor komunikasi pemerintah yang efektif, beretika, dan berdaya guna bagi masyarakat Indonesia. ■

Redaksi,
Majalah GPR Indonesia



Penasihat: **Widodo Muktiyo, Tri Raharjo** | Pemimpin Usaha/Pemimpin Redaksi: **Arief Munajad**
| Red Pelaksana: **Yunus** | Redaksi: **Ade Mauluddin, Syifa Hubaydatul Faidah, Taufik Maulana Ilham** | Pemasaran: **Lucky Purnama Rijal, Jalaludin Romi, Akmal** | Desain & Layouter: **Sudrajat (Qaf Media Kreasi)** | Keuangan: **Rezza Widiana** | Penerbit: **PT Media Ads Indonesia**

Alamat Redaksi/Pemasaran: Rukan Avenue Unit. 8 - 139, Jakarta Garden City, Cakung Timur, Cakung - Jakarta Timur, DKI 13910 Indonesia | Telepon: 081388725454 | Alamat Surat Elektronik: mediaadsindonesia@gmail.com | www.mediaads.co.id

Redaksi menerima naskah/artikel yang berkaitan dengan dinamika perkembangan public relations di Indonesia. Naskah/artikel bisa dikirim melalui alamat surat elektronik (e-mail). Redaksi berhak melakukan edit atas naskah/artikel yang telah diterima.

Sinergi GPR, Bangun Budaya Keterbukaan sebagai Fondasi Kepercayaan Publik



Arief Munajad, SE., M.M.

Direktur GPR Institute

Di tengah laju transformasi digital yang tak terbendung, komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan telah menjadi jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan publik tidak lagi dibangun hanya melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui cara kita menyampaikan kebijakan tersebut: terbuka, jujur, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kolaborasi dan Adaptif adalah kata kunci”

Tanpa kolaborasi antar instansi, antar-level pemerintahan, dan antarplatform komunikasi, pesan yang kita sampaikan akan terfragmentasi, mudah disalahpahami, bahkan rentan dimanfaatkan oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab. Kolaborasi bukan pilihan, melainkan keharusan di era di mana satu narasi yang tidak terkoordinasi dapat memicu krisis kepercayaan dalam hitungan jam. Selain itu, insan humas kini harus adaptif dalam berkomunikasi, agar selalu relevan dengan generasi Z, maupun generasi baby boomers yang kini populasinya kian bertambah. Sehingga pesan yang disampaikan selalu adaptif, baik dengan kapasitas kognitif, pola pikir, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya engagement terhadap program pemerintah.

GPR Institute menyadari sepenuhnya bahwa membangun budaya keterbukaan informasi publik tidak dapat dilakukan secara parsial atau sporadis. Keterbukaan bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal membuka ruang dialog. Keterbukaan yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi legitimasi pemerintahan dan persatuan bangsa.

Ketika masyarakat merasa didengar dan informasi mengalir tanpa hambatan, maka ruang bagi misinformasi akan semakin sempit, dan ikatan emosional antara pemerintah dan rakyat akan semakin kuat.

GPR Institute kembali menegaskan komitmen kami untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam tiga pi-

lar utama yakni peningkatan kapasitas kehumasan di seluruh lini, dari pusat hingga daerah terpencil. Penguatan riset komunikasi publik berbasis data dan perilaku masyarakat yang terus berubah. Pengembangan kompetensi GPR yang adaptif terhadap teknologi baru, tantangan cognitive warfare, dan dinamika global.

“Keterbukaan bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal membuka ruang dialog”

Kami percaya, hanya dengan kolaborasi yang solid — antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media, dan platform digital — kita mampu menciptakan komunikasi publik yang tidak hanya informatif, tetapi juga transparan, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan. ■

GPR, Oksigen Pembangunan Bangsa di Era *Cognitive Warfare*



Prof. Dr. Widodo Muktiyo

Founder GPR Institute

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia

Di tengah derasnyanya arus informasi hari ini, Indonesia menghadapi medan perang baru yang tidak lagi terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Perang itu bukan di udara, laut, atau darat melainkan di dalam pikiran dan hati masyarakat.

Fenomena ini dikenal sebagai *cognitive warfare*, sebuah pertempuran untuk menguasai persepsi, mempengaruhi opini, dan mengendalikan narasi publik. Dalam suasana informasi yang rawan dipenuhi hoaks, manipulasi, dan seran-

gan terhadap legitimasi negara, pemerintah tidak lagi cukup hanya menjadi penyampai fakta. Pemerintah harus menjadi penentu narasi, pengarah persepsi, dan penjaga keutuhan kognitif bangsa.

Di sinilah *Government Public Relations (GPR)* memainkan peran yang sangat penting. GPR tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi bertransformasi menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan informasi nasional. Melalui strategi yang tepat, komunikasi publik dapat menjadi benteng kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghalau gangguan informasi yang disebarkan secara sistematis untuk melemahkan negara.

Sejak 2023, pemerintah telah melangkah lebih progresif dengan membangun mekanisme *Government-to-Platform (G2P)*. Alih-alih hanya mengeluhkan keberadaan platform digital global seperti Meta, Google, TikTok, atau X, pemerintah memilih bekerja sama secara strategis. Melalui *joint monitoring*, *joint takedown*, dan *joint content promotion*, upaya pengamanan ruang digital dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

Hasilnya, lebih dari 22.000 konten negatif yang berpotensi merusak stabilitas informasi publik berhasil diturunkan dalam hitungan jam, bukan hari. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai regulator,

tetapi juga sebagai aktor digital yang aktif menjaga ruang informasi nasional.

Landasan hukum juga diperkuat. Penyempurnaan Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah tentang Literasi Digital, hingga aturan mengenai *Publisher Rights* dan *Platform Responsibility* dirancang bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menciptakan *fair play* antara konten organik pemerintah dan konten non-organik. Ruang digital harus menjadi tempat informasi yang sehat, inklusif, dan adil.

Transformasi besar juga terjadi di tubuh aparatur negara. Konsep *Jubir Pemerintah Republik Digital* kini mulai diwujudkan melalui model lima langkah strategis yang mendorong setiap aparatur sipil negara menjadi komunikator aktif. Setiap ASN didorong memiliki akun resmi yang terverifikasi, dan kinerja digital mereka dihitung sebagai bagian dari indikator kinerja individu.

Ini bukan sekadar tuntutan zaman, tetapi langkah menuju pemerintahan yang benar-benar hadir di ruang publik digital. Dengan dashboard sederhana berbasis *open source*, pemerintah mampu memantau efektivitas komunikasi para ASN secara *real time*. Saat ini, lebih dari 1,5 juta ASN telah menjadi penyebar konten positif yang memperkuat narasi pembangunan nasional.



■ Sambutan Prof. Widodo Muktiyo

Peran Pranata Humas juga mengalami redefinisi. Mereka bukan lagi juru bicara seremonial atau bagian administratif biasa. Mereka kini adalah digital frontline warriors pejuang komunikasi yang menguasai algoritma media sosial, memahami psikologi massa, dan mampu menciptakan counter-narrative dalam hitungan menit ketika isu-isu sensitif muncul.

Untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan ini, didirikanlah Government Public Relation (GPR) Institute sebagai pusat pengembangan kompetensi yang melahirkan humas-humas pemerintah yang tangguh, cerdas, dan adaptif. Namun, negara tidak bisa bertempur sendirian di ruang digital.

Karena itu, gerakan besar bernama “Masyarakat Digital Berdaulat” diluncurkan untuk melibatkan publik dalam menjaga ruang informasi nasional. Pelatihan literasi digital digelar di lebih

dari 85.000 desa, lomba konten positif diselenggarakan untuk mendorong kreativitas generasi muda, dan penghargaan “Warga Jubir Bangsa” diberikan kepada para influencer mikro yang secara konsisten menyebarkan informasi positif. Ketika masyarakat ikut bergerak, kekuatan narasi kebaikan akan mampu mengalahkan gelombang disinformasi yang terkoordinasi.

Jika langkah strategis ini dijalankan secara konsisten, GPR akan menjadi lebih dari sekadar fungsi komunikasi pemerintah. Ia akan menjadi oksigen bagi pembangunan bangsa unsur yang tidak terlihat namun sangat menentukan keberlangsungan kehidupan bernegara. Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang kekuatan ekonomi atau megahnya pembangunan fisik, tetapi juga tentang ketangguhan mental, spiritual, dan kebangsaan masyarakatnya. Kepercayaan publik menjadi pondasi utama yang me-

“GPR tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi bertransformasi menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan informasi nasional. Melalui strategi yang tepat, komunikasi publik dapat menjadi benteng kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghalau gangguan informasi yang disebarkan secara sistematis untuk melemahkan negara.”

mastikan semua cita-cita besar itu tidak runtuh.

Pranata Humas adalah pasukan elit di era ini. Mereka menjaga ruang publik dari serangan narasi, membangun pemahaman masyarakat, dan memastikan kebijakan negara diterima dengan benar. Mereka adalah penjaga pikiran dan hati 280 juta rakyat Indonesia.

Dengan GPR yang kuat, modern, dan militan, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai kekuatan dunia di abad ke-21, bukan hanya dalam peta ekonomi, tetapi juga dalam peta peradaban. ■

Evidence-Based Communication: Pilar Baru GPR dalam Menjaga Stabilitas Persepsi Publik

Evidence-Based Communication memberi arah bagi GPR membaca perubahan opini publik. Dengan data, pesan pemerintah menjadi lebih tepat dan dipercaya



Tri Raharjo, SE, MM, CDMs, CPR.
Co-Founder, GPR Institute

Di tengah transformasi digital yang kian masif, negara menghadapi tantangan komunikasi yang tidak pernah sederhana: bagaimana mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik di ruang informasi yang nyaris tanpa batas. Ketika opini publik dapat terbentuk lebih cepat daripada proses birokrasi, Government Public Relations (GPR) bukan lagi sekadar perangkat komunikasi melainkan mekanisme strategis yang menentukan arah persepsi publik terhadap negara. Kita hidup pada masa ketika informasi yang valid dan

informasi yang menyesatkan berada dalam ruang yang sama. Kredibilitas tidak otomatis melekat pada institusi; ia harus dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan kemampuan memahami dinamika audiens digital. Di sinilah GPR menemukan urgensi barunya.

Dalam konteks ini, GPR harus bertransformasi dari pola lama yang bersifat informatif menuju pendekatan yang lebih deliberatif. Komunikasi pemerintah tidak dapat lagi berhenti pada penyampaian pesan; ia harus melibatkan publik dalam percakapan politik yang sehat, menumbuhkan ruang refleksi, dan menghadirkan perspektif yang menyeimbangkan fakta dengan empati.

GPR yang cerdas memahami bahwa publik hari ini bukan hanya konsumen informasi, tetapi kurator persepsi. Mereka menimbang, memverifikasi, dan mengorelasikan setiap pesan dengan referensi yang mereka pilih sendiri. Maka, komunikasi pemerintah harus dirancang tidak hanya untuk menjawab pertanyaan publik, tetapi untuk membangun ekosistem makna.

Transparansi menjadi salah satu instrumen utama. Di era keterbukaan

digital, publik menuntut bukan sekadar informasi “apa” tetapi rasionalitas “mengapa”. Transparansi yang substansial membuka ruang logika, meminimalkan kecurigaan, dan memperkuat kredibilitas pemerintah di mata warga.

Namun transparansi tanpa kemampuan membaca data hanyalah setengah dari strategi. GPR modern harus beroperasi dengan kerangka evidence-based communication. Sentimen digital, percakapan sosial, tren pencarian, dan pola konsumsi informasi menjadi indikator yang memungkinkan pemerintah memprediksi perubahan opini publik sebelum menjadi tekanan politik yang lebih besar. Data, dalam hal ini, bukan sekadar alat, melainkan bahasa baru dalam tata kelola komunikasi publik.

Di tengah fragmentasi media, pendekatan PESO : Paid, Earned, Shared, dan Owned menjadi infrastruktur penting bagi arsitektur komunikasi negara. Kanal-kanal ini tidak lagi bekerja secara terpisah; mereka harus bergerak dalam satu kesatuan naratif yang saling menguatkan.

Paid Media menghadirkan jangkauan, Earned Media menyumbangkan kredi-



■ Paparan Tri Raharjo, SE., MM, CDMs, CPR

bilitas, Shared Media memfasilitasi percakapan sosial, dan Owned Media menjaga otoritas informasi pemerintah.

Ketika dikelola secara terpadu, keempat elemen tersebut membentuk ekosistem komunikasi yang tidak hanya menyebarkan pesan, tetapi membangun reputasi pemerintah secara utuh dalam benak publik.

Yang seringkali terlupakan adalah bahwa pada akhirnya, komunikasi pemerintahan adalah seni mengelola kepercayaan manusia dalam dimensi yang sangat kompleks.

Ini tidak hanya soal strategi digital, tetapi juga tentang memahami psikologi

publik, dinamika sosial, dan sensitivitas terhadap konteks yang terus berubah.

GPR yang visioner akan menempatkan publik sebagai mitra, bukan objek. Ia tidak hanya merespons isu, tetapi mengantisipasi keresahan. Ia tidak hanya menyampaikan data, tetapi membangun makna. Dan ia tidak hanya menenangkan gejolak, tetapi memperkuat ketahanan sosial melalui narasi yang kredibel dan inklusif.

Indonesia sedang memasuki fase pembangunan yang menuntut bukan hanya ketepatan kebijakan, tetapi ketepatan komunikasi. Pada titik inilah GPR memainkan peran fundamental. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan

yang baik pun berisiko kehilangan daya dukung publik. Namun dengan komunikasi yang cerdas, kebijakan yang sulit sekalipun dapat diterima dengan lebih rasional.

GPR Institute meyakini bahwa masa depan komunikasi pemerintahan berada pada persilangan antara teknologi, data, dan pendekatan humanis. GPR generasi baru harus memadukan ketiganya agar pemerintah tidak hanya hadir, tetapi hadir dengan cara yang dipercaya.

Karena pada akhirnya, kepercayaan publik adalah infrastruktur tak kasat mata yang menentukan keberlanjutan sebuah negara. Dan GPR adalah arsitek utamanya. ■

Transformasi Gaya Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi Publik



Fachrudin Ali Ahmad
Ketua Umum IPRAHUMAS

Humas pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di era komunikasi yang cepat dan dinamis, fungsi humas tidak lagi sekadar menyampaikan informasi satu arah, tetapi menjadi penggerak dialog publik yang mampu membangun kepercayaan dan persepsi positif melalui komunikasi yang adaptif dan responsif.

Transformasi ini menandai perubahan

paradigma dari pola komunikasi top-down menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan humanis. Humas kini dituntut untuk membuka ruang dialog, mendengar aspirasi, dan menerjemahkan dinamika sosial ke dalam rekomendasi kebijakan yang relevan.

Secara historis, humas pemerintah lebih dikenal sebagai penyampai informasi kebijakan. Namun perkembangan teknologi informasi, meningkatnya literasi digital, dan tumbuhnya media sosial sebagai ruang diskusi publik membuat peran tersebut berevolusi. Humas perlu memahami apa yang menjadi harapan masyarakat, bukan hanya menjelaskan program pemerintah.

Kemampuan mendengarkan dan membaca opini publik menjadi faktor kunci. Melalui pemantauan isu, analisis data, dan interpretasi tren percakapan digital, humas dapat menyiapkan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik secara cepat dan akurat.

Selain itu, humas harus menjaga stabilitas informasi di tengah derasnya arus disinformasi dan polarisasi opini. Den-

gan menyajikan pesan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami, humas membantu memastikan ruang informasi publik tetap sehat dan konstruktif.

“Melalui pemantauan isu, analisis data, dan interpretasi tren percakapan digital, humas dapat menyiapkan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran”

Untuk menjalankan fungsi strategis tersebut, penguatan kapasitas humas menjadi sangat penting. Aparatur humas perlu dibekali keterampilan komunikasi digital, manajemen krisis, analisis data, serta literasi media. Profesionalisme humas tidak hanya diukur dari kemampuan menyampaikan pesan pemerintah, tetapi dari kemampuannya mengelola dialog yang relevan dan membangun kepercayaan publik.

Dengan transformasi yang tepat, humas pemerintah dapat tampil sebagai jembatan strategis yang menyatukan pemerintah dan masyarakat. Humas bukan lagi sekadar penyampai informasi, tetapi aktor kunci dalam mewujudkan komunikasi pemerintahan yang terbuka, responsif, dan dipercaya publik. ■

Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Dorong Gerakan “Indonesia Bicara Baik”



Boy Kelana Soebroto
Ketua Umum PERHUMAS

Hadirnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penguatan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) menunjukkan langkah pemerintah membangun komunikasi publik yang lebih terpusat, terukur, dan responsif. Arah komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo bergerak menuju orkestrasi nasional yang berbasis data dengan koordinasi antar-kementerian/lembaga yang makin solid.

Keterbukaan informasi bagi Perhu-

mas bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi fondasi legitimasi negara. Transparansi yang berkualitas menghadirkan informasi yang jelas dan mudah dipahami publik. Nilai ini sejalan dengan etika Perhumas yang menempatkan kejujuran dan empati sebagai pilar komunikasi publik.

Penguatan komunikasi publik perlu dimulai dari Arsitektur Komunikasi Publik Nasional yang terpadu—dengan pedoman pesan, SOP krisis, dan standar informasi yang selaras. Tanpa orkestrasi, transparansi akan terpecah. Karena itu, peningkatan kompetensi humas pemerintah menjadi krusial, terutama literasi digital, analisis data, dan kemampuan merespons mis/disinformasi.

Perhumas memiliki peran strategis sebagai jembatan antara profesional komunikasi dan kebutuhan negara. Melalui standarisasi kompetensi, kolaborasi lintas sektor, serta kampanye #IndonesiaBicaraBaik, Perhumas mendorong budaya komunikasi yang sehat, konstruktif, dan berorientasi pelayanan publik.

Di tengah derasnya arus disinformasi, humas pemerintah dituntut lebih cepat

dan akurat dalam menyampaikan informasi. Teknologi digital perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transparansi, memperkuat akuntabilitas berbasis data, dan membuka ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Perhumas memiliki peran strategis sebagai jembatan antara profesional komunikasi dan kebutuhan negara.”

Namun teknologi hanyalah alat; keterbukaan tetap bertumpu pada integritas dan kecerdasan komunikasi. Transparansi adalah jembatan kepercayaan. Ketika pemerintah menyampaikan kebijakan secara terbuka dan bertanggung jawab, publik merasakan negara hadir.

Gerakan “Indonesia Bicara Baik” mengajak bangsa memilih narasi yang membangun, bukan memecah. Bicara baik bukan menutupi fakta, tetapi menyampaikan kebenaran dengan adab, empati, dan tanggung jawab. Komunikasi publik harus menjadi kekuatan yang menyatukan Indonesia hari ini dan di masa depan. ■



SELAMAT KEPADA PARA PERAIH GPR AWARD 2025



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI





Era Baru Komunikasi Pemerintah, Metode Penilaian TOP GPR Figure 2025

“Penilaian TOP GPR Figure 2025 sangat ketat dan berbasis data digital satu tahun terakhir. Kami tidak hanya melihat seberapa sering seorang pejabat muncul di media, tapi seberapa besar dia mampu menciptakan sentimen positif dominan, engagement yang autentik, dan kedekatan humanis dengan publik. Hanya pemimpin yang benar-benar ‘hidup’ di hati masyarakat digital yang layak menerima penghargaan ini. Tahun 2025, kami ingin tunjukkan bahwa komunikator pemerintahan terbaik Indonesia.”

Sosok yang berhak mendapatkan apresiasi TOP GPR Figure adalah para tokoh pimpinan instansi pemerintahan Republik Indonesia yang berhasil menjalankan fungsi komunikasi publik secara efektif, strategis, dan relevan di era digital. Penilaian ini dilakukan melalui riset digital komprehensif untuk melihat sejauh mana seorang pemimpin mampu membangun kepercayaan publik, keterlibatan audiens, serta citra positif melalui komunikasi berbasis data, teknologi, dan kedekatan humanis.

Sebab itu, Prof. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute, sekaligus penggagas konsep Government Public Relations menyatakan peran Humas Pemerintah bukan lagi sebagai penyampai pesan atau informasi semata, tetapi juga jadi jembatan emosional antara Pemerintah dan rakyat.

“Kini, peran Humas Pemerintah bukan lagi sekadar penyampai informasi, tapi menjadi jembatan emosional antara pe-

merintah dan rakyat. Dalam menjalankan kegiatan GPR yang baik, humas harus mampu membangun narasi yang tidak hanya benar, tapi juga dirasakan dan dipercaya masyarakat. TOP GPR Figure



ure 2025 hadir untuk mengapresiasi para pemimpin yang menjadikan komunikasi publik sebagai senjata utama membangun kepercayaan di era digital yang penuh disrupsi ini. “Metode pe-

nilaian dirancang dengan mempertimbangkan dinamika komunikasi pemerintahan modern, di mana kecepatan informasi, transparansi, dan engagement menjadi indikator utama keberhasilan. Oleh karena itu, penilaian TOP GPR Figure menggunakan tiga parameter digital utama, yaitu *Digital Awareness Aspect*, *Digital Media Aspect*, dan *Social Media Aspect*. Ketiganya diukur melalui data analitik digital dalam kurun satu tahun terakhir menggunakan sistem pencarian, pemetaan pemberitaan, dan pengukuran interaksi publik.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan objektivitas. Tokoh yang masuk nominasi adalah mereka yang memiliki dominasi pemberitaan positif, visibilitas digital yang berkelanjutan, serta interaksi publik yang kuat. Hanya pemimpin dengan sentimen positif dominan dan skor akhir memenuhi ambang penilaian yang dinyatakan layak memperoleh predikat TOP GPR Figure Award. ■



Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Juara Top GPR Figure 2025

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., Menteri Agama Republik Indonesia, kembali mencatat prestasi penting setelah dinobatkan sebagai penerima 3rd TOP Figure Award 2025 dalam ajang 5th TOP GPR Award 2025. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Founder GPR Institute, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, pada 4 November 2025 di The Sultan Hotel Jakarta. Pengakuan ini diberikan atas kepemimpinannya yang humanis dan inovatif dalam membangun komunikasi publik digital serta memperkuat kepercayaan masyarakat di era disrupsi informasi.

Sebagai Grand Imam Masjid Istiqlal, Rektor PTIQ Jakarta, dan pendiri forum dialog lintas iman, Prof. Nasaruddin bukan nama baru dalam upaya memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Sejak menjabat Menag awal 2025, ia mendorong transformasi komunikasi publik yang transparan, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Pendekatan ini sangat relevan menghadapi tantangan seperti polarisasi agama, hoaks keagamaan, dan perubahan cara masyarakat menerima informasi.

Ajang GPR Award 2025 mengangkat tema “Digital Trust & Public Engage-



■ Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar memberikan sambutan usai menerima Penghargaan Top GPR Figure 2025

ment”, menegaskan pentingnya membangun kepercayaan melalui komunikasi publik yang kuat. Tidak hanya penghargaan individu, Kementerian Agama juga meraih TOP GPR Award 2025, mencerminkan kerja tim yang solid di bawah kepemimpinan Prof. Umar.

Penilaian dilakukan melalui riset digital dengan syarat sentimen positif dominan dan skor akhir minimal 70 poin. Prof. Umar unggul melalui strategi humanis, seperti dialog lintas iman yang viral dan kampanye anti-hoaks keagamaan dengan engagement jutaan interaksi.

“Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh tim Keme-

nag. Tidak ada superman—yang ada adalah super-team.”

Founder GPR Institute, Prof. Widodo Muktiyo, turut memberi apresiasi:

“Prof. Nasaruddin Umar adalah figur visioner yang mampu menjembatani kebijakan agama dengan hati nurani publik.”

Prestasi ini menegaskan posisi Prof. Nasaruddin Umar sebagai pemimpin yang berhasil memadukan nilai keagamaan, teknologi, dan komunikasi publik menjadikannya teladan bagi praktisi GPR dalam membangun kepercayaan masyarakat berbasis dialog dan empati. ■

Selamat dan Sukses
Menteri Agama RI



Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.

Menteri Agama RI

Atas Diraihnya Penghargaan

**Top GPR Figure
Award 2025**

Dalam Ajang

**5th Top Government
Public Relations Award 2025**





Top GPR Figure 2025, Mendikdasmen Ingin Pendidikan Bermutu Untuk Semua

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, kembali mencatat prestasi setelah dinobatkan sebagai penerima 3rd TOP Figure Award 2025 dalam ajang Government Public Relations (GPR) Awards.

Penghargaan bergengsi ini diumumkan pada 4 November 2025 di The Sultan Hotel Jakarta oleh GPR Institute. Pengakuan ini menegaskan keberhasilan Prof. Mu'ti dalam memimpin komunikasi publik pendidikan di era digital, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat melalui narasi yang transparan dan humanis.

Dikenal sebagai akademisi visioner dan komunikator publik yang inklusif, Prof. Mu'ti memimpin Kemendikdasmen sejak awal 2025 dengan fokus transformasi pendidikan berbasis teknologi dan pemerataan akses. Sebagai mantan Rektor UMY, ia konsisten mengedepankan komunikasi yang terbuka, responsif, dan mampu menjangkau audiens dari pelajar hingga pemangku kepentingan daerah.

Pada GPR Awards bertema "Digital Trust & Public Engagement", Prof. Mu'ti menjadi salah satu dari tiga penerima penghargaan bergengsi bersama Menteri Agama



■ Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu'ti (Dok. Istimewa)

Prof. Nasaruddin Umar dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Selain kategori individu, Kemendikdasmen juga meraih empat kategori lain, termasuk GPR Champion 2025, yang menegaskan konsistensi kementerian dalam membangun komunikasi publik digital yang kuat.

Penilaian penghargaan ini dilakukan melalui riset digital dengan tiga indikator: Digital Awareness, Digital Media & Website, serta Social Media Engagement. Hanya tokoh dan institusi dengan sentimen positif minimal 90% dan skor akhir di atas 70 poin yang layak menerima penghargaan.

Dalam sambutan yang disam-

paikan melalui staf khususnya, Prof. Mu'ti menyebut bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja bersama.

"Ini milik seluruh tim Kemendikdasmen yang bekerja menjaga kepercayaan publik dan memastikan kebijakan pendidikan dirasakan masyarakat," ujarnya.

Founder GPR Institute, Prof. Widodo Muktiyo, menilai Prof. Mu'ti adalah contoh figur komunikator publik era baru—tenang, berbasis data, dan dekat dengan publik. "Beliau membuktikan, komunikasi publik yang kuat adalah fondasi keberhasilan kebijakan pendidikan nasional." ■



Selamat dan Sukses
**Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah RI**



Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia

Atas Diraihnya Penghargaan

**Top GPR Figure
Award 2025**

Dalam Ajang

**5th Top Government
Public Relations Award 2025**





Top GPR Figure 2025, Menghidupkan Hutan Lewat Komunikasi Berhati

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kementerian Kehutanan dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni setelah berhasil meraih TOP GPR Award 2025 sekaligus TOP GPR Figure Award 2025 dari GPR Institute. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan nasional atas keberhasilan membangun komunikasi publik yang transparan, responsif, adaptif, dan berbasis human centered communication—pendekatan komunikasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses kebijakan kehutanan.

Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, Antoni dinilai mampu memperbarui cara Kementerian Kehutanan berkomunikasi dengan publik. Ia membawa gaya komunikasi yang lebih sederhana, akrab, berbasis data, namun tetap tegas pada prinsip pelestarian lingkungan.

Penghargaan tersebut diumumkan pada 4 November 2025 dalam ajang 5th TOP GPR Award 2025 di Jakarta dan diterima oleh Komjen Pol (Purn.) Djoko Poerwanto karena Antoni sedang menghadiri United for Wildlife Global Summit di Brasil—sebuah sinyal bahwa diplomasi kehutanan Indonesia kini mendapatkan ruang di forum global.



■ Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ph.D (Dok. Kemenhut)

Bagi Raja Juli Antoni, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi dialog yang setara. Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat adat, petani hutan, pegiat lingkungan, generasi muda, hingga pelaku industri kehutanan. Prinsip ini diwujudkan melalui kanal digital dua arah dan kampanye publik, salah satunya #HutanUntukRakyat, yang berhasil menjangkau jutaan pengguna media sosial dan meningkatkan perhatian publik terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinannya, Kemenhut memperkuat transparansi melalui pelaporan deforestasi real-time berbasis

dashboard GIS, konten edukatif multibahasa untuk masyarakat perbatasan, serta aplikasi pelaporan Sertifikasi Hutan Lestari yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara anonim. Inovasi ini bukan hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membantu menurunkan potensi konflik lahan di wilayah prioritas.

Lebih jauh, strategi komunikasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program ekowisata hutan, pengembangan desa konservasi, serta pemberdayaan petani hutan berkontribusi pada peningkatan pendapatan ribuan keluarga sepanjang 2025. Dampak ini



menegaskan bahwa hutan bukan hanya ruang ekologis, tetapi sumber ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan benar. Penghargaan dari GPR Institute ini sejalan dengan arah Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada agenda pelestarian lingkungan, transformasi digital pemerintahan, dan tata kelola yang inklusif.

Antoni dinilai berhasil memindahkan narasi kehutanan dari isu konflik menuju semangat kolaborasi—dari pendekatan birokratis menjadi pendekatan partisipatif yang menggerakkan publik.

Kesuksesan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang berlandaskan empati, data, dan keterlibatan warga bukan sekadar strategi citra, tetapi fon-

dasi trust building dalam pemerintahan modern.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman kerusakan ekosistem global, kepemimpinan Raja Juli Antoni menjadi contoh bahwa menjaga hutan bukan hanya soal regulasi, tetapi menghubungkan negara, rakyat, dan masa depan bersama menuju Indonesia Emas 2045. ■

Asta Cita 2 Pembangunan 2025-2029:

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**;

5 Kebijakan Prioritas Kehutanan 2025-2029



Perlindungan Hutan
Paru Paru Dunia



Penguasaan Hutan
Berkeadilan



Hutan untuk
Ketahanan Pangan, Air,
Energi



One Map Policy



Digitalisasi Layanan
Kehutanan

5 KEBIJAKAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN



Perlindungan Hutan
Paru Paru Dunia



Penguasaan Hutan
Berkeadilan



Hutan untuk
Ketahanan Pangan, Air,
Energi



One Map Policy



Digitalisasi Layanan
Kehutanan

Rehabilitasi Hutan seluas
84.821 Hektare

Nilai Indeks Daftar Merah
Nasional Status Keterancaman
Spesies sebesar 0,75 Poin

Penanggulangan kebakaran
hutan signifikan, dari 376 ribu
hektare pada 2024 menjadi 213
ribu hektare pada 2025

Pemberian akses kelola
masyarakat seluas 72 ribu
hektare atau total kumulatif
8,32 juta hectare

TORA dari kawasan hutan
telah terbit seluas 24.159
hektare

Operasi penertiban
kawasan hutan
sebanyak 54 operasi

Multi Usaha Kehutanan tercatat
kontribusi pangan sebesar 201
ribu ton

Agroforestry untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi
seluas 1.020 hektare

Pemberian Perizinan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
883 Megawatt, 334 izin, energi
air dengan kapasitas terpasang
137 MW.

Integrasi informasi spasial
tematik dan pemantauan
hutan nasional dalam
bentuk jaga rimba

SIGAP yang
mengintegrasikan 98 tema
informasi geospasial dari
berbagai sumber
mendapatkan penghargaan

Top 3 Inovasi Adaptasi
Perubahan Iklim Pengendalian
Karhutla

E-ticketing dan *cashless*
payment diterapkan di 270
Pintu Masuk Taman Nasional,
TW, Suaka Margasatwa

Nilai Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebesar 3,8 Poin

Capaian Hingga 15 Oktober 2024



LIST PEMENANG TOP GPR FIGURE 2025

Metode TOP GPR FIGURE AWARD 2025 dianugerahkan kepada tokoh pemimpin pemerintah dari berbagai instansi kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang telah berhasil menjalankan Digital Public Relations dalam berkomunikasi, menjalin engagement untuk meningkatkan citra dan reputasi positif bagi personal dan institusinya di mata publik.

Penilaian Top GPR Figure Award 2025 dilakukan kepada tokoh pemimpin pemerintah dari berbagai instansi pemerintah republik Indonesia

1. Digital Awareness Aspect (Bobot 30%), Parameter ini mengukur banyaknya ulasan dan pencarian terkait tokoh pemimpin instansi pemerintah republik indonesia di halaman internet dalam kurun waktu 1 tahun dengan menggunakan keyword yang telah ditetapkan, Exp: "Kementerian" + "Nama Menteri".
2. Digital Media Aspect (Bobot 40%), Parameter ini menggunakan pengukuran banyaknya pemberitaan media digital terhadap tokoh kepala instansi pemerintah republik indonesia yang tercapture melalui berbagai media digital/media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta mengukur besaran dominasi sentiment positif atau negatif terhadap pemberitaan tersebut, mengacu kepada lima halaman pertama di mesin pencari secara random.
3. Social Media Aspect (Bobot 30%),

Parameter ini menggunakan 4 media sosial teratas facebook, instagram, youtube dan tiktok, untuk mengetahui popularitas jumlah pengikut serta engagement yang terbangun di antara tokoh dengan pengguna sosial media.

Penghargaan 3rd Top GPR Figure Award 2025 diberikan kepada tokoh pemimpin instansi pemerintah republik indonesia yang telah berhasil lolos penilaian serta memenuhi dua kriteria penilaian akhir, yaitu:

1. Tokoh pemimpin instansi pemerintah peraih Top GPR Figure Award 2025 memiliki dominasi pemberi-



taan positif dalam 5 halaman mesin pencari pertama dengan angka dominasi minimal 90% pemberitaan positif, serta total final skor minimal 70 poin atau lebih.

2. Tokoh pemimpin instansi pemerintah peraih Top GPR Figure Award 2025 masuk ke dalam posisi TOP 20 GPR FIGURE AWARD 2025.

KEMENTERIAN

- Raja Juli Antoni	: Kementerian Kehutanan
- Airlangga Hartarto	: Kemenko Bidang Perekonomian RI
- Bahlil Lahadalia	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
- Meutya Hafid	: Kementerian Komunikasi dan Digital
- Abdul Mu'ti	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Saifullah Yusuf	: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Nasaruddin Umar	: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Agus Andrianto	: Kementerian Imigrasi dan Pemasaran
- Tito Karnavian	: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Maruarar Sirait	: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Sjafrie Sjamsoeddin	: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Prasetyo Hadi	: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Supratman Andi Agtas	: Kementerian Hukum

TNI & POLRI

- Listyo Sigit Prabowo	: POLRI
- Agus Subiyanto	: TNI

LEMBAGA NEGARA

- Ahmad Muzani	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
----------------	----------------------------------



GPR Champion 2025, Penghargaan untuk Komunikasi Publik Unggul

GPR Champion 2025 menjadi simbol capaian tertinggi dalam komunikasi publik pemerintahan—bukan sekadar penghargaan, tetapi pengakuan atas konsistensi, inovasi, dan keteladanan dalam membangun transparansi dan kepercayaan publik. Melalui apresiasi ini, GPR Institute menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya alat penyampai kebijakan, melainkan fondasi tata kelola modern yang mendorong kolaborasi, partisipasi, dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.



■ Peluncuran Majalah GPR Edisi Ke-3 Tahun 2025

GPR Champion 2025 merupakan salah satu Apresiasi tertinggi dalam bidang komunikasi publik pemerintahan di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai berhasil menjaga konsistensi, inovasi, dan performa unggul dalam pelaksanaan komunikasi publik selama tiga tahun berturut-turut. Bagi para penerima, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas keberhasilan membangun keterbukaan informasi dan kepercayaan publik di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.

Program ini diselenggarakan oleh GPR

Institute dengan tujuan memperkuat standar komunikasi pemerintahan agar semakin transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di era banjir informasi dan disrupsi digital, peran Government Public Relations (GPR) tidak bisa hanya menjadi penyampai informasi, tetapi harus mampu menciptakan dialog, menjaga reputasi, dan menjadi penghubung efektif antara pemerintah dan publik. Penetapan sebagai GPR Champion 2025 didasarkan pada dua kriteria utama. Pertama, instansi harus meraih Top GPR Award selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024), menunjukkan komitmen terhadap kualitas komunikasi

GPR Champion 2025 ditujukan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menunjukkan konsistensi dan kinerja unggul dalam pelaksanaan fungsi komunikasi publik.

publik digital, pengelolaan media, dan penyediaan informasi yang kredibel. Dengan hadirnya program ini, GPR Institute berharap semakin banyak instansi pemerintah menjadikan komunikasi publik sebagai bagian dari tata kelola strategis, bukan sekadar fungsi pelengkap. Karena pada akhirnya, komunikasi publik yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan, menumbuhkan partisipasi, dan memperkuat legitimasi pemerintahan di mata rakyat. ■



Kemendikdasmen Berhasil Raih 4 Penghargaan dari GPR Institute 2025



■ Anang Ristanto, S.E., M.A. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih empat penghargaan dari Government Public Relation (GPR) Institute. Kemendikdasmen meraih GPR Champion 2025 untuk kategori Pengelolaan Komunikasi Publik Digital dan Top GPR Award 2025 untuk kategori Pengelolaan Digital Komunikasi Publik. Sedangkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, meraih penghargaan sebagai Top GPR Figure 2025. Selanjutnya,

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) meraih penghargaan sebagai Top GPR Leader 2025.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media (SKM) Kemendikdasmen, Ma'ruf menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. “Alhamdulillah, Terima kasih kepada GPR yang telah memberikan penghargaan ke Kemendikdasmen. Ini menjadi bukti dan motivasi buat kita di Kemendikdasmen supaya bekerja lebih baik lagi mewujudkan Pendidikan Ber-

mutu untuk Semua. Semoga tahun depan (kinerja kami) lebih baik dan kami bisa memberikan lebih banyak hal untuk pendidikan di Indonesia melalui program yang lebih bermutu demi mewujudkan generasi emas 2045,” tuturnya di Jakarta, Selasa (5/11).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKHM, Anang Ristanto yang meraih penghargaan sebagai Top GPR Leader 2025 turut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi bagi tim humas Kemen-

Guru Semakin Kompeten

dengan Beragam **Pelatihan dan Afirmasi Pendidikan**

212.922
Guru

Pembelajaran Mendalam

54.122
Guru

Koding dan Kecerdasan Artifisial

Target
18.000
Fasilitator Daerah

Bimbingan Konseling

87.187
Guru

Diklat Berjenjang PAUD

Target
20.000
Guru

Bimtek Numerasi Matematika Gembira

Target
12.500
Guru

Pemenuhan Kualifikasi S-1/D-4

Lulus
566.830
Guru

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Berproses
238.140
Guru

Lulus
4.769
Guru

Bakal Calon Kepala Sekolah

Berproses
(sedang pelatihan dana APBD)
2.344
Guru

*Data 25 November 2025



dikdasmen. “Terima kasih atas kerja bersama dan kekompakan seluruh tim humas kementerian. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Indonesia dan menjadi amal ibadah kita bersama,” ucapnya.

GPR Institute menggelar ajang bergengsi 5th TOP GPR Award 2025, 3rd Top Figure Award 2025, dan 3rd Top GPR Leader 2025 di Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian 5th GPR Forum 2025 yang mengusung tema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi”. Dalam era digital yang penuh dinamika, peran Government Public Relations (GPR) tidak lagi terbatas sebagai corong informasi, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dua arah yang mampu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam keterangannya, Founder GPR Institute, Widodo Muktiyo, menekankan pentingnya peran GPR di tengah arus informasi yang begitu deras. Menurutnya, peran GPR tidak hanya sekadar menyampaikan informasi secara satu arah, GPR kini dituntut untuk hadir sebagai fasilitator komunikasi yang interaktif, partisipatif, dan berbasis teknologi. “GPR bukan sekadar penyampai kebijakan, tetapi juga pengelola persepsi publik yang mampu menumbuhkan kepercayaan digital dan memperkuat keterlibatan masyarakat.”

Ia berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini mampu menjadi wahana refleksi sekaligus inovasi bagi para praktisi GPR dalam menghadapi tantangan digitalisasi, disinformasi, serta mening-



katnya ekspektasi publik terhadap transparansi pemerintah.

Di sisi lain, Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo, menyampaikan bahwa penilaian Top GPR Award 2025 dilakukan sejak Juli hingga September 2025 dengan metode riset digital terhadap seluruh Kementerian, lembaga negara, komisi negara, hingga pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa hanya instansi yang mencapai dominan pemberitaan positif ($\geq 90\%$) dan meraih skor akhir minimal 70 poin yang berhak menerima penghargaan ini. “Kami menggunakan tiga parameter utama, yaitu aspek Digital

Awareness, Digital Media & Website, dan Social Media. Penilaian ini memastikan bahwa instansi penerima penghargaan benar-benar memiliki reputasi positif di ruang digital,” ujar Tri Raharjo.

Melalui ajang penghargaan ini, GPR Institute berharap dapat memberikan apresiasi kepada para instansi dan insan humas pemerintah yang berhasil menjalankan program komunikasi publik secara efektif, sekaligus mendorong peningkatan citra, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. ■



Kemdiktisaintek Raih GPR Champion 2025, Komunikasi Publik yang Selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo



■ Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (BUHPBJ) Kemdiktisaintek, Manifes Zubayr Menerima Top GPR Award 2025

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdik-tisaintek) kembali mencatat capaian penting setelah meraih TOP GPR Award 2025, sebuah pengakuan atas keberhasilan kementerian dalam mengelola komunikasi publik secara inovatif, transparan, dan berorientasi dampak. Prestasi ini memperkuat posisi Kemdiktisaintek sebagai institusi yang mampu menjalankan prinsip Government Public Relations

(GPR) secara profesional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pada ajang 5th TOP GPR Award 2025 yang digelar GPR Institute di The Sultan Hotel, Jakarta, 4 November 2025, Kemdiktisaintek tidak hanya meraih penghargaan utama, tetapi juga dinobatkan sebagai GPR Champion 2025. Penilaian menunjukkan

pemberitaan positif mencapai 90 persen dengan skor akhir di atas 70 poin—capaian yang menegaskan konsistensi dan kualitas kerja komunikasi publik kementerian.

Keberhasilan ini lahir dari strategi komunikasi yang terintegrasi dengan agenda Asta Cita—delapan misi pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai kementerian yang mengawal



transformasi pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, Kemdiktisaintek memposisikan komunikasi publik sebagai jembatan pemahaman antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Penilaian GPR Institute dilakukan melalui riset digital komprehensif sejak Juli hingga September 2025, meliputi aspek kesadaran digital, kualitas media dan website, serta engagement media sosial. Kemdiktisaintek unggul di seluruh indikator, termasuk penggunaan konten edukatif dan interaktif yang menjangkau mahasiswa, dosen, peneliti, hingga publik luas.

Kemdiktisaintek telah mempertahankan capaian ini selama tiga tahun berturut-turut (2023–2025) sehingga layak menyandang predikat GPR Champion. “Penghargaan ini adalah bukti komitmen inovasi komunikasi publik yang kami lakukan,” ujar Kepala BUHPBJ Kemdiktisaintek, Manifes Zubayr, yang juga menerima TOP GPR Leader Award 2025.

Selaras dengan arah Presiden Prabowo, komunikasi publik Kemdiktisaintek diarahkan untuk memperkuat implementasi program prioritas, seperti peningkatan talenta digital, riset strategis nasional, dan hilirisasi inovasi perguruan tinggi. Kampanye digital “Riset untuk Indonesia Maju” menjadi salah satu contoh keberhasilan, menjangkau jutaan audiens melalui Instagram, TikTok, dan kanal resmi kementerian, sekaligus memperkuat Asta Cita terkait pangan, teknologi, dan kedaulatan nasional.

Penerapan prinsip-prinsip GPR juga



terlihat dari konsistensi kementerian dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik (UU 14/2008). Model komunikasi yang digunakan bersifat simetris dua arah, memastikan masyarakat dapat memberikan umpan balik yang kemudian digunakan dalam penyusunan kebijakan.

Secara internal, penghargaan ini menjadi motivasi untuk memperkuat inovasi, termasuk penerapan teknologi AI untuk memantau sentimen publik. Secara eksternal, prestasi ini memperkuat ke-

percayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan kolaborasi riset dengan industri serta komunitas akademik.

Keberhasilan Kemdiktisaintek dalam GPR menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi fondasi reformasi dan penggerak partisipasi publik. Dengan konsistensi strategi dan selaras dengan Asta Cita, Kemdiktisaintek membuktikan bahwa sains dan teknologi tumbuh melalui inovasi—serta narasi publik yang kuat dan terpercaya. ■

Sebaran Penerima KIP Kuliah



Sasaran Penerima
KIP Kuliah 2025
1.044.174



Realisasi Penerima
KIP Kuliah 2025
988.687 (94,7%)



Anggaran
KIP Kuliah 2025
14,98 T



Realisasi Anggaran
KIP Kuliah 2025
13,76 T (91,8%)



Sumber:
Data Pusat Pembiayaan dan Asesmen
Pendidikan Tinggi Per 03 November 2025





Metode penilaian GPR Champion 2025 ditujukan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menunjukkan konsistensi dan kinerja unggul dalam pelaksanaan fungsi komunikasi publik. Penetapan sebagai GPR Champion 2025 dilakukan berdasarkan kriteria dengan ketentuan Instansi pemerintah telah meraih Top GPR Award dari GPR Institute selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024), sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dalam membangun komunikasi publik yang strategis dan berdampak.

BERIKUT LIST PEMENANG GPR CHAMPION 2025

KEMENTERIAN:

- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Agama
- Kementerian ESDM
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Sosial

LEMBAGA NON KEMENTERIAN:

- Badan Kepegawaian Negara
- Badan Pusat Statistik

LEMBAGA NEGARA:

- Komisi Pemilihan Umum
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Bank Indonesia
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Komisi Pemberantasan Korupsi

PEMERINTAH PROVINSI

- Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Gorontalo
- Jawa Barat
- Jawa Timur
- Lampung
- Nusa Tenggara Barat
- Papua
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kota Cimahi
- Kabupaten Badung
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Bekasi
- Kabupaten Blitar
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Karanganyar
- Kabupaten Kendal
- Kabupaten Magelang
- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Bantul
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Belitung
- Kabupaten Buleleng
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Gresik
- Kabupaten Jepara
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Semarang
- Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Sukoharjo
- Kotif Jakarta Pusat
- Kotif Jakarta Timur
- Kota Bekasi
- Kota Blitar
- Kabupaten Bojonegoro
- Kabupaten Gunungkidul
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Sleman
- Kota Denpasar
- Kota Jambi
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Palembang
- Kota Samarinda
- Kota Sukabumi
- Kota Surabaya
- Kota Yogyakarta
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Tangerang
- Kota Jakarta Selatan
- Kota Bandung
- Kota Bengkulu
- Kota Bogor
- Kota Depok
- Kota Makassar
- Kota Malang
- Kota Manado
- Kota Medan
- Kota Padang
- Kota Probolinggo
- Kota Semarang



ANNUAL ACHIEVEMENT REPORTS: GPR CHAMPION 2025

MEREKAM PRESTASI, MENGAPRESIASI DEDIKASI.

GPR Institute menghadirkan publikasi resmi yang mendokumentasikan capaian strategis komunikasi publik instansi pemerintah sepanjang tahun.

Manfaat:



Meningkatkan reputasi dan kredibilitas publik



Memperkuat Branding Institusi Pemerintah



Menjadi bentuk apresiasi kinerja tim kehumasan

GPR Champion 2025

Diberikan kepada instansi pemerintah yang meraih Top GPR Award 2022–2024 secara berturut-turut sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi dan inovasi komunikasi publik.

Saatnya kiprah instansi Anda terdokumentasi dan diapresiasi.





Apresiasi Tertinggi untuk Humas Pemerintah yang Berhasil Bangun Kepercayaan Publik

Di tengah banjir informasi digital yang tak terbendung, peran Government Public Relations (GPR) semakin vital sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan 5th TOP GPR Award 2025, ajang bergengsi yang digelar GPR Institute di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Widodo Muktiyo sebagai Founder, Tri Raharjo SE, MM sebagai Co-Founder, dan Arief Ahmad Munajad SE, MM sebagai Direktur.

Acara yang berlangsung pada 4 November 2025 di The Sultan Hotel Jakarta ini dihadiri ratusan perwakilan kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah. Lebih dari sekadar seremoni penghargaan, GPR Award menjadi barometer efektivitas komunikasi publik pemerintah di era digital—di mana kecepatan, responsivitas, dan akurasi pesan telah menjadi standar baru.

Pada edisi kelima ini, tema “Digital Trust & Public Engagement” dipilih sebagai penegasan bahwa legitimasi publik kini bertumpu pada kualitas komunikasi pemerintah. Prof. Widodo menegaskan, “Tanpa kepercayaan, program pemerintah tidak akan mendapat dukungan.”



■ Beberapa Pimpinan Humas Institusi Pemerintah Berpose Bersama Manajemen GPR Institute usai menerima penghargaan GPR Award 2025

Penilaian dilakukan melalui riset digital sejak Juli hingga September, dengan tiga indikator kunci: *Digital Awareness, Digital Media & Website, dan Social Media Aspect*. Hanya instansi dengan sentimen positif minimal 90% dan skor akhir di atas 70 yang berhak menerima penghargaan.

Menurut Tri Raharjo, GPR Award bukan hanya ajang kompetisi, tetapi ruang berbagi strategi dan praktik terbaik komunikasi publik. Sementara Arief Ahmad Munajad menambahkan bahwa disrupsi digital bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan perubahan cara masyarakat mempercayai negara. Karena

itu, humas pemerintah kini dituntut lebih cepat, lebih empatik, dan lebih relevan.

Prof. Widodo kembali menegaskan peran strategis GPR: “Humas pemerintah bukan hanya corong informasi—mereka penjaga kepercayaan publik di tengah derasnya hoaks dan polarisasi.”

Melalui GPR Award 2025, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terbaik diberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi menjaga reputasi pemerintah dan memastikan setiap kebijakan dapat dipahami serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ■



TOP GPR Award 2025, Tolok Ukur Komunikasi Digital Pemerintah Berbasis Riset dan Objektif

Penilaian Top GPR Award 2025 dilakukan melalui proses terukur dan berbasis riset digital untuk memastikan objektivitas dan akurasi hasil. Proses ini berlangsung sejak Juli hingga September 2025 dan mencakup seluruh lembaga negara, kementerian, komisi negara, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Setiap instansi dinilai berdasarkan performa komunikasi digital yang terekam di ruang publik, baik melalui pemberitaan, interaksi sosial media, maupun kualitas website resmi.

Dalam paparannya, Prof. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute menyatakan bahwa komunikasi humas pemerintah itu ibarat udara bagi kehidupan institusi publik — tak selalu terlihat, tapi mutlak diperlukan setiap saat.

“Jika udaranya bersih, segar, dan mengalir lancar, maka kepercayaan publik akan tetap terjaga. Namun jika udaranya tercemar hoaks, lamban, atau buntu, maka institusi itu akan kehabisan oksigen legitimasi di mata masyarakat.”

Adapun metode penilaian dibangun dari tiga parameter utama yang saling melengkapi. Pertama, Digital Awareness

Aspect (20%) yang mengukur tingkat pencarian dan perhatian publik terhadap lembaga melalui mesin pencari internet. Data ini mencerminkan relevansi, awareness, serta tingkat visibilitas institusi dalam percakapan digital nasional.

Kedua, Digital Media & Website Aspect (50%), menjadi parameter dengan bobot terbesar. Aspek ini menilai jumlah pemberitaan, kualitas sentimen publik, serta aksesibilitas website resmi. Dari hasil pengukuran ini dapat terlihat seberapa konsisten institusi menghadirkan informasi yang terpercaya, mudah diakses, dan berdampak positif terhadap persepsi publik.

Ketiga, Social Media Aspect (30%), yang mengukur interaksi, engagement, dan efektivitas pesan yang disampaikan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Parameter ini menggambarkan kemampuan institusi dalam menjangkau masyarakat luas melalui komunikasi digital yang cepat, relevan, dan adaptif.

Hanya institusi dengan dominasi pemberitaan positif minimal 90 persen serta skor akhir minimal 70 poin yang layak menerima penghargaan.

Dengan metode ini, Top GPR Award tidak hanya mengukur seberapa sering institusi berbicara, tetapi seberapa efektif komunikasi tersebut membangun kepercayaan publik di ruang digital yang dinamis.



Senada dengan ini, Tri Raharjo, Co-Founder GPR Institute, bahwa di era digital saat ini, komunikasi pemerintahan tidak lagi cukup hanya ‘berbicara keras’, tapi harus ‘berbicara cerdas.’ “Tiga pilar Digital Awareness, Digital Media & Website, serta Social Media Aspect yang kami gunakan di Top GPR Award 2025 menjadi cerminan nyata: seberapa mampu sebuah institusi hadir secara relevan, terpercaya, dan dekat di hati publik melalui seluruh kanal digital yang kini menjadi ‘ruang tamu’ baru bagi rakyat Indonesia.” ■



Kementerian ATR/BPN Raih Top GPR Award 2025, Digital PR Kunci Keterbukaan Informasi



■ Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL) Biro Humas dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, yang mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/ BPN menerima penghargaan TOP GPR Award 2025

Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia Emas 2045 melalui delapan Asta Cita, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) kembali membuktikan perannya sebagai pelopor transparansi komunikasi publik pemerintahan.

Pada 4 November 2025, kementerian ini sukses meraih Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 kategori

“Kementerian” dari GPR Institute, penghargaan bergengsi yang diberikan atas keberhasilan dalam membangun digital awareness, engagement, dan reputation.

Ini merupakan pencapaian kedua berturut-turut setelah tahun 2024, menegaskan konsistensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memanfaatkan digital public relations (PR) untuk menjaga keterbukaan informasi yang berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan pada acara 5th GPR Forum 2025 & Award Ceremony Top Award 2025 di The Sultan Hotel, Jakarta. Bagas Agung Wibowo, Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL) Biro Humas dan Protokol, menerima trofi tersebut mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Tahun lalu kami sudah meraihnya. Kini, dengan strategi komunikasi model PESO (Paid, Earned, Shared, Owned Media) yang diatur da



lam Keputusan Menteri Nomor 1912 Tahun 2024, kami terapkan di semua satuan kerja yang jumlahnya mencapai 520 titik, termasuk kantor wilayah dan pertanahan,” ujar Bagas. Strategi ini mewajibkan publikasi “One Day One News” untuk memastikan informasi mengalir cepat dan kredibel ke masyarakat.

Top GPR Award dinilai berdasarkan tiga aspek utama: Digital Awareness Aspect, Digital Media dan Website Aspect, serta Social Media Aspect. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencetak skor final 74,50%, unggul di tengah lebih dari 370 ribu ulasan online yang dipantau GPR Institute.

Dalam setahun terakhir, pemberitaan tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di media online mencapai 108 ribu kali, sementara situs resmi <https://www.atrbpn.go.id> dikunjungi sebanyak 3,48 juta pengunjung per bulan. Ini bukan angka semata, melainkan bukti bagaimana digital PR telah mengubah wajah kehumasan pemerintah menjadi lebih inklusif dan responsif.

Di era digital saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak hanya berbagi berita, tapi juga membangun dialog. Melalui platform seperti website, media sosial, dan aplikasi layanan seperti “Sentuh Tanahku”, masyarakat kini bisa mengakses informasi pertanahan secara real-time. Misalnya, simulasi biaya balik nama tanah kini bisa dilakukan via aplikasi, mengurangi kunjungan fisik dan mempercepat penyelesaian administrasi.



■ Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL) Biro Humas dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, yang Mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/ BPN menerima penghargaan TOP GPR Award 2025

Pendekatan ini selaras dengan tuntutan keterbukaan informasi, di mana data pertanahan yang transparan menjadi senjata utama melawan konflik lahan yang sering menyulitkan petani dan warga kecil.

Pencapaian ini tak lepas dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, delapan misi prioritas yang mencakup swasembada pangan, kemandirian ekonomi, hingga pemberantasan korupsi dan narkoba. Khususnya, Asta Cita ketiga—mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional—sangat bergantung pada reformasi agraria yang transparan.

Dengan digital PR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan informasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria tersebar luas, mencegah sengketa tanah yang bisa menghambat program tersebut.

Presiden Prabowo menekankan keterbukaan informasi sebagai pilar utama untuk membangun kepercayaan publik. “Kita harus transparan agar rakyat merasa dilibatkan,” katanya dalam berbagai pidato visi-misi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merespons dengan memperkuat data digital berbasis blockchain untuk keamanan sertifikat tanah, yang tidak hanya mendukung Asta Cita keenam



(peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur), tapi juga Asta Cita pertama (pembangunan ekonomi inklusif melalui penguasaan tanah yang adil). Hasilnya? Lebih dari 3.019 kasus pertanahan terselesaikan sejak awal 2025, mencegah kerugian negara hingga Rp9,67 triliun.

Keberhasilan digital PR Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bukan sekadar prestasi internal, tapi berdampak nyata bagi 270 juta rakyat Indonesia. Bayangkan seorang petani di Jawa Barat yang kini bisa mengurus sertifikat tanah via online, menghemat waktu dan biaya transportasi. Atau warga di Papua yang terhindar dari konflik lahan berkat peta tata ruang digital yang mudah diakses.

Program PTSL saja telah mendaftarkan jutaan bidang tanah, memberdayakan masyarakat adat dan petani gurem untuk mengakses kredit pertanian—langkah konkret menuju swasembada pangan.

Lebih luas lagi, keterbukaan ini mengurangi korupsi di sektor pertanahan, sejalan dengan Asta Cita kedelapan (pemberantasan korupsi dan narkoba). Dengan engagement digital yang tinggi, masyarakat kini bisa melaporkan dugaan penyimpangan melalui portal LAPOR!, memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Di tingkat nasional, ini berkontribusi pada PDB melalui peningkatan investasi properti yang aman, serta mendukung green economy dengan pengendalian ruang yang berkelanjutan.

Raihan Top GPR Award 2025 menjadi



momentum bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk terus berinovasi. Bagas Agung menekankan, “Konsistensi dan kolaborasi seluruh jajaran adalah kunci. Kami ingin menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menghadirkan informasi yang kredibel untuk citra positif lembaga.” Di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ini adalah bagian dari reformasi birokrasi berbasis merit sistem yang lebih luas.

Pada akhirnya, kesuksesan Kemen-

terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan kita bahwa digital PR bukan alat promosi semata, tapi instrumen demokrasi. Dengan meneguhkan keterbukaan informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tak hanya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, tapi juga mewujudkan janji Indonesia Emas 2045: negara yang adil, makmur, dan dekat dengan rakyatnya. Semoga prestasi ini menginspirasi kementerian lain untuk ikut bertransformasi, demi dampak positif yang lebih luas bagi seluruh Nusantara. ■



Sukses Lakukan Transformasi Komunikasi Publik, Kemenag RI Raih TOP GPR Award 2025



■ Prof. Nasaruddin Umar menerima Penghargaan Top GPR Award 2025

Komunikasi Publik di era digital memainkan peranan signifikan dalam memenangkan hati dan kepercayaan publik kepada lembaga Pemerintah. Hal ini tampaknya menjadikan Kementerian Agama (Kemenag) terus berinovasi dengan berbagai langkah terobosannya. Salah satunya adalah tepuk sakinah yang mengedukasi pasangan untuk terus memupuk cinta, kasih sayang, dan saling mengisi satu sama lain dalam membina rumah tangga.

Hal ini pula yang dijadikan salah satu rujukan penilaian di ajang TOP GPR Award 2025, dalam menyampaikan pesan-pesan publik yang kreatif dan me-

ngundang keterlibatan publik dalam pelaksanaannya.

Kampanye Tepuk Sakinah adalah Program Kemenag yang diinisiasi oleh KUA Menteng, gerakan edukasi keluarga damai melalui konten kreatif yang banyak digunakan pada kegiatan publik dan pembinaan keagamaan. Program ini dinilai mampu mendekatkan pesan kementerian kepada masyarakat dengan cara ringan, positif, dan mudah diterima.

“Kemenag menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan publik, termasuk melalui program edukasi keluarga dan konten sosial yang kreatif”, papar

Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo.

Selain itu, Kemenag dinilai sukses dalam beberapa aspek strategis, seperti: Respons cepat isu keagamaan dan layanan publik; Pemanfaatan media digital serta integrasi kanal layanan; Penguatan literasi keberagaman masyarakat; Diplomasi keagamaan dan publikasi program prioritas.

Atas capaian ini, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurut Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, penghargaan ini bukan hanya penilaian terhadap figur individu, tetapi buah kerja kolektif seluruh jajaran Kementerian Agama dalam membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, cepat, dan berorientasi pelayanan umat dan bangsa.

“Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh tim Kementerian Agama. Tidak ada superman. Yang ada adalah super-team, jadi penghargaan ini juga milik semua teman-teman di Kemenag,” tegas Menag.

Menag juga menekankan, era keterbukaan dan digitalisasi, kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi hal yang sangat penting. Kemenag, ka



tanya, selalu hadir tidak hanya sebagai institusi yang mengelola kehidupan keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga pemerintah yang mampu menjadi teladan dalam transparansi informasi, membangun kepercayaan publik, serta menjawab dinamika masyarakat.

“Kekuatan komunikasi bukan hanya pada kecanggihan teknologi, tetapi pada ketulusan hati dalam menyampaikan pesan. Yang lahir dari hati yang dalam, akan diterima oleh hati yang dalam,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Kemenag, Thobib Al-Asyhar menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur di Kemenag untuk terus memperkuat budaya pelayanan publik yang transparan dan digital-friendly.

“Ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi komitmen bahwa Kemenag harus semakin terbuka, responsif, dan hadir untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga menggerakkan lebih dari 4.000 satuan kerja untuk memastikan komunikasi publik berjalan efektif. Banyak inisiatif lahir dari kolaborasi bersama, termasuk gerakan Tepuk Sakinah yang mendapat respons luar biasa.

Thobib Al Asyhar menegaskan bahwa Humas Kemenag terus mengembangkan sistem gotong royong konten berbasis jaringan, memaksimalkan potensi talenta ASN, hingga integrasi kanal digital sebagai bagian dari upaya memperkuat Digital Trust masyarakat terhadap pe-

merintah. “Era digital menuntut pemerintahan yang cepat dan transparan. Kami akan terus meningkatkan kualitas penyampaian informasi, edukasi publik, dan engagement digital, selaras arahan Menteri Agama,” imbuhnya.

Dengan penghargaan ini, Kemenag menegaskan komitmen melanjutkan transformasi layanan dan komunikasi publik, termasuk pada bidang-bidang seperti digitalisasi layanan keagamaan, penguatan literasi umat dan moderasi beragama, kolaborasi dengan komunitas publik dan media; Penguatan kampanye edukatif yang humanis dan kreatif.

Pemberian penghargaan menjadi rangkaian 5th GPR Forum 2025 yang mengusung tema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi”. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi Kemenag dalam membangun komunikasi yang inklusif, responsif, dan dekat dengan masyarakat, terutama melalui penguatan transformasi digital serta pengelolaan isu publik secara cepat dan akurat.

Penghargaan ini sekaligus menahbiskan Kementerian Agama sebagai salah satu institusi Pemerintah yang berhasil dalam membangun komunikasi publik digital yang inklusif dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat lintas agama dan budaya. Juga responsif dan cepat tanggap terhadap isu-isu publik dan kebutuhan informasi masyarakat. Selain itu, institusi yang dipimpin Prof. Nasaruddin Umar ini juga transformatif dalam mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan dan penyampaian informasi.

“Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh tim Kementerian Agama. Tidak ada superman. Yang ada adalah super-team, jadi penghargaan ini juga milik semua teman-teman di Kemenag,”

Adapun dampak strategis dari penghargaan ini adalah untuk memperkuat posisi Kemenag sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada urusan keagamaan, tetapi juga unggul dalam membangun komunikasi publik yang modern, transparan, dan terpercaya. ■



Semangat Transformasi Layani Negeri, Kementerian PANRB Sukses Raih Top GPR Award 2025

TOP GPR AWARD



■ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (Dok. Kementerian PANRB)

Komunikasi publik kini menjadi elemen strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tantangan disinformasi, instansi pemerintah tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga mampu menyampaikan capaian secara jelas, transparan, dan mu-

dah dipahami. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tampil sebagai salah satu institusi yang berhasil menjawab tuntutan zaman.

Pada gelaran 5th Top GPR Award 2025 yang diselenggarakan Government Public Relations (GPR) Institute,

Kementerian PANRB meraih penghargaan bergengsi berkat performa komunikasi publiknya yang konsisten positif dan berdampak. Penghargaan diberikan kepada instansi yang memenuhi dua indikator: minimal 90% pemberitaan positif di ruang digital serta skor akhir penilaian di atas 70 poin. Prestasi ini menegaskan bahwa kerja nyata pemerintah



perlu disertai strategi komunikasi publik yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis data.

Komitmen Reformasi yang Makin Nyata

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan refleksi dari spirit “Transformasi Melayani Negeri” yang dijalankan sejak awal pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Sejak Oktober 2024, fokus kami jelas: memperkuat birokrasi agar lebih responsif, efisien, dan hadir untuk melayani masyarakat. Reformasi bukan hanya administrasi, tetapi perubahan perilaku dan kualitas layanan,” ujar Menteri Rini.

Dalam 100 hari pertama pemerintahan baru, Kementerian PANRB memainkan peran vital memastikan penataan kelembagaan berjalan cepat dan tepat. Sebanyak 69 Peraturan Presiden terkait struktur kelembagaan berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan—sebuah langkah krusial untuk memastikan kesinambungan pemerintahan.

Selain itu, pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan tepat waktu demi memastikan tidak ada kekosongan kewenangan yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Percepatan Layanan Publik: Dari MPP hingga Digitalisasi

Transformasi layanan publik menjadi salah satu fokus terbesar. Hingga akhir



■ Mohammad Averrouce, Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB

2025, sudah terdapat 296 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia, mewakili 58% kabupaten/kota. MPP berfungsi sebagai ruang terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses perizinan, administrasi penting, hingga layanan swasta dalam satu lokasi dan satu alur layanan.

Tak hanya hadir secara fisik, inovasi MPP memasuki level berikutnya melalui MPP Digital Nasional (MPPDN). Salah satu dampak paling konkret ialah percepatan layanan perizinan tenaga kesehatan yang kini dapat diselesaikan kurang dari satu jam, dari sebelumnya 14 hari kerja. Hingga kini, 199 daerah telah mengimplementasikan MPPDN dengan lebih dari 184.802 penerima manfaat.

Perubahan ini turut mendorong peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) menjadi 88,9 (Sangat Baik)—tinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara Indeks Pelayanan Publik (IPP) meningkat menjadi 4,02, melampaui capaian tahun sebelumnya.

Transformasi Digital Pemerintah

Kementerian PANRB juga memimpin percepatan digitalisasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bersama Tim SPBE Nasional, kementerian mengevaluasi 1.750 kegiatan digital pemerintah, menghasilkan efisiensi belanja teknologi hingga Rp100,1 miliar.

Dalam sektor perlindungan sosial, interoperabilitas data menjadi kunci. Uji coba program di Banyuwangi berhasil mencatat 341.000 pendaftar dalam tiga minggu, sekaligus membuka potensi ko



reksi ketidaktepatan sasaran bernilai lebih dari Rp100 triliun.

Reformasi ASN: Terbesar dalam Sejarah

Pada tahun 2024, Kementerian PAN-RB memimpin rekrutmen CASN terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu 180.000 PNS dan 870.000 PPPK, sekaligus menyelesaikan persoalan non-ASN yang telah berlangsung hampir dua dekade.

Selain rekrutmen, kementerian tengah menyiapkan terobosan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN, Penghargaan, dan Pengakuan ASN. Salah satu strategi penting adalah kebijakan Fleksibilitas Kinerja ASN, yang memberikan ruang kerja modern berbasis output.

Akuntabilitas dan Penguatan Integritas

Penguatan integritas menjadi pilar penting reformasi. Melalui PermenPAN-RB No. 17/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, pemerintah menegaskan komitmen menciptakan birokrasi yang bersih, terbuka, dan akuntabel.

Hasilnya, 84% instansi pemerintah meningkatkan nilai SAKIP, sementara lebih dari 15.000 unit layanan publik kini berstatus Zona Integritas WBK/WBBM.

Apresiasi Dunia Internasional

Pada Open Government Partnership Global Summit 2025, Menteri PANRB mempresentasikan reformasi birokrasi



digital Indonesia. Forum internasional dan OECD memberi apresiasi atas pemanfaatan teknologi seperti AI dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan keterlibatan masyarakat.

Melayani dengan Dampak

Dengan capaian tersebut, penghargaan Top GPR Award 2025 bukan sekadar simbol, tetapi penegasan bahwa komunikasi publik harus hanya berbasis fakta, transparansi, dan manfaat.

“Kami akan terus mendorong birokrasi agar lebih lincah, manusiawi, dan melayani. Transformasi ini harus terasa oleh rakyat, bukan hanya tercatat di laporan,” tutup Menteri Rini.

Capaian ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat kepercayaan publik sebagai fondasi reformasi birokrasi menuju Indonesia yang lebih modern, efisien, dan responsif. ■



Kemenhut RI Raih TOP GPR Award 2025, Evolusi Komunikasi Publik Dari Responsif ke Proaktif



■ Komjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, berfoto bersama Prof. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute dan Arief Munajad, Direktur GPR Institute usai menerima penghargaan TOP GPR Award 2025.

Kemenhut mengalami transformasi digital yang masif. Bukan lagi sekadar press release rutin, komunikasi kini berbasis data-driven dan citizen-centric. Hasilnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil mendapatkan penghargaan TOP GPR Award 2025, atas kinerja komunikasi publik yang telah dilaksanakan. Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memperoleh penghargaan TOP GPR Figure Award 2025, atas

aktivitas komunikasinya yang berhasil meningkatkan digital awareness.

Kedua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenhut, Komjen Pol. Djoko Poerwanto di Jakarta (4/11/2025) yang hadir mewakili Menhut Raja Juli Antoni karena tengah berada di Brazil mengikuti United for Wildlife Global Summit.

Melansir dari website GPR Institute,

Government Public Relations (GPR) Institute merupakan sebuah lembaga yang hadir untuk membantu profesi kehumasan (public relations) khususnya di ranah pemerintahan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensinya yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Penghargaan TOP GPR Award 2025 ini merupakan gelaran yang kelima kalinya sejak tahun 2020. Sedangkan untuk Top GPR Figure Award 2025, merupakan



penghargaan yang ketiga kalinya. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian 5th GPR Forum 2025 yang mengusung tema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi”.

Melalui ajang penghargaan ini, GPR Institute memberikan apresiasi kepada para instansi dan insan humas pemerintah, yang berhasil menjalankan program komunikasi publik secara efektif. Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, inspirasi, serta pengetahuan bagi para praktisi GPR dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital

Kunci suksesnya ada pada integrasi media sosial dan AI. Kampanye #LindungiHutanKita, misalnya, menggunakan algoritma untuk menargetkan pesan edukasi ke 50 juta pengguna, fokus pada pencegahan karhutla. Luasan kebakaran turun menjadi 213 ribu hektar—prestasi yang dikomunikasikan melalui infografis interaktif, bukan laporan kaku.

“Komunikasi kami dirancang untuk memberdayakan rakyat, bukan sekadar informasi,” tegas Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut.

Sukses Kemenhut terletak pada kemampuannya menjadikan rakyat sebagai subjek utama. Program konversi lahan hutan untuk pangan, yang mendukung swasembada nasional, disosialisasikan melalui town hall virtual melibatkan 10.000 warga. Kontroversi awal? Dijawab dengan dialog terbuka, menghasilkan dukungan 70% dari responden survei. WWF Indonesia pun mengapresiasi,



*Komjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto
Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, memberikan Sambutan usai menerima penghargaan TOP GPR Award 2025.*

menyebutnya “napas segar kolaborasi lintas pihak”.

Di era hoaks, Kemenhut unggul dengan fact-checking cepat via bot Telegram, memastikan informasi akurat sampai ke pelosok desa. Ini bukan hanya efisiensi, tapi empati: petani dapat laporan cuaca hutan via WhatsApp, sementara komunitas adat dilibatkan dalam pembuatan konten video.

Lebih dari prestasi domestik, komunikasi Kemenhut jadi pilar Asta Cita—delapan misi Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Misi kedua, swasembada pangan-energi-air melalui ekonomi hijau, diwujudkan via narasi hutan lestari. Prinsip Kemenhut, hutan untuk kelestarian dan memberdayakan masyarakat.

Kolaborasi dengan kementerian lain, seperti ESDM untuk energi terbarukan, dipromosikan melalui webinar bersama,

mencapai 1 juta views. Ini mendukung misi Asta Cita ke-4 (ekonomi biru-hijau) dan ke-8 (demokrasi inklusif). Presiden Prabowo sendiri, dalam pidato Oktober 2025, memuji Kemenhut sebagai “contoh GPR yang membangun trust digital untuk rakyat”.

Kemenhut terus melakukan komunikasi publik berdasarkan tiga prinsip, yakni : transparansi, keterlibatan, dan relevansi. Di tengah disrupsi, GPR harus agile—seperti Kemenhut yang adaptif terhadap tren TikTok untuk edukasi anak muda. Tantangannya, menjaga momentum di tengah isu global seperti perubahan iklim.

Sebagai penutup, sukses Kemenhut adalah bukti bahwa komunikasi publik bukan birokrasi kering, melainkan alat demokrasi. Dukung Asta Cita, layani rakyat—itulah GPR masa kini. ■



Kemendikdasmen Raih TOP GPR AWARD 2025, Program Pendidikan Bermutu untuk Semua



■ Anang Ristanto, S.E., M.A. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali memperkuat reputasinya di ranah komunikasi publik setelah meraih empat penghargaan dari Government Public Relations (GPR) Institute pada ajang nasional 5th TOP GPR Award 2025. Salah satu penghargaan bergengsi yang diterima adalah Top GPR Award 2025 kategori Pengelolaan Digital Komunikasi Publik, yang menegaskan komitmen Kemendikdasmen dalam menghadirkan sistem komunikasi publik

yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kemendikdasmen, Ma'ruf, menyampaikan rasa syukur sekaligus pesan optimisme atas pencapaian ini. "Alhamdulillah, terima kasih kepada GPR Institute atas penghargaan ini. Ini bukan semata pengakuan, tetapi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Harapan kami, tahun depan

kinerja semakin meningkat serta memberikan manfaat lebih luas bagi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/11).

Ajang penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian 5th GPR Forum 2025, yang mengusung tema besar: "Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi." Dalam forum ini, humas pemerintah dari berbagai instansi berkumpul untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat jejaring

komunikasi publik, dan merumuskan strategi menghadapi tantangan era digital.

Founder GPR Institute, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, menegaskan bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen strategis pemerintahan. “GPR bukan lagi sekadar penyampai pesan satu arah. Ia harus menjadi fasilitator komunikasi dialogis, pengelola persepsi publik, dan penjaga kepercayaan digital masyarakat. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang baik pun sulit diterima,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur GPR Institute, Arief Munajad, menyampaikan bahwa era digital mengubah perilaku dan ekspektasi publik. “GPR kini dituntut memastikan komunikasi publik berjalan lebih transparan, kredibel, dan bersifat inklusif. Pemerintah tidak hanya memberi informasi, tetapi juga harus hadir mendengarkan,” katanya.

Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo, menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan melalui riset digital selama Juli–September 2025 terhadap kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Penilaian berdasarkan tiga parameter utama: Digital Awareness, Digital Media & Website, dan Social Media Engagement. Hanya instansi dengan $\geq 90\%$ sentimen pemberitaan positif dan skor akhir minimal 70 poin yang berhak menerima penghargaan ini.

Penghargaan yang diraih Kemendikdasmen mencerminkan keberhasilan kementerian dalam memanfaatkan ekosistem digital untuk mendukung penyebaran informasi program priori-



tas pendidikan nasional. Melalui strategi komunikasi multiplatform, peningkatan transparansi, dan pendekatan partisipatif, Kemendikdasmen mampu memperkuat koneksi dengan publik—mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah, hingga siswa.

Ajang penghargaan ini sekaligus diharapkan menjadi ruang inspirasi, pembelajaran, dan kolaborasi bagi seluruh praktisi GPR agar komunikasi publik pemerintah mampu menjawab tantangan era digital, termasuk derasnya arus informasi, penyebaran hoaks, serta

meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas kebijakan.

Dengan pencapaian ini, Kemendikdasmen menegaskan perannya sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada penguatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada pengelolaan komunikasi publik yang modern, strategis, dan berdampak. Penghargaan ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang membangun budaya transparansi serta memperkuat kepercayaan publik dalam mewujudkan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua menuju Indonesia Emas 2045. ■



Kemdiktisaintek Diganjar TOP GPR Award 2025, Komunikasi Publik yang Inovatif, Transparan, dan Berdampak



■ Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (BUHPBJ) Kemdiktisaintek, Manifes Zubayr saat menerima Penghargaan TOP GPR Award 2025

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih TOP GPR Award 2025, sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan komunikasi publik yang inovatif, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi komunikasi publik yang dilakukan kementerian berjalan selaras dengan arah Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan

an tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Dalam era disrupsi digital, ketika informasi bergerak cepat dan ekspektasi publik terus meningkat, kemampuan pemerintah menyampaikan pesan secara jelas, mudah diakses, dan dua arah menjadi kebutuhan mendesak. Di tengah konteks tersebut, Kemendiktisaintek berhasil tampil sebagai salah satu institusi pemerintah yang adaptif. Pada ajang 5th TOP GPR Award 2025 yang diselengga-

rakan GPR Institute di The Sultan Hotel Jakarta pada 4 November 2025, kementerian ini tidak hanya meraih Top GPR Award, tetapi juga dianugerahi GPR Champion 2025—sebuah penghargaan eksklusif bagi institusi yang dalam tiga tahun berturut-turut mempertahankan performa komunikasi publik unggul.

Penghargaan tersebut diberikan setelah melalui proses riset digital komprehensif sejak Juli hingga September 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan

tiga aspek utama: Digital Awareness (kesadaran publik melalui pemberitaan dan sentimen digital), Digital Media & Website Management (pengelolaan kanal digital dan aksesibilitas informasi), serta Social Media Engagement (interaksi, responsivitas, dan dampak pesan publik). Kemendiktisaintek menunjukkan performa luar biasa di ketiga parameter tersebut, dengan dominasi pemberitaan positif mencapai 90 persen, serta skor penilaian final di atas standar minimal 70 poin.

Kesuksesan ini tidak hadir secara instan. Kemdiktisaintek menata ulang strategi komunikasi publik dengan pendekatan data-driven communication, human-centered messaging, serta penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi. Melalui berbagai kampanye digital, konten edukatif audiovisual, dan penyederhanaan pesan kebijakan, kementerian memastikan informasi tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dunia industri, dan masyarakat luas.

Penghargaan ini memberikan dampak strategis, baik secara internal maupun eksternal. Bagi tim humas, prestasi ini menjadi pemacu untuk terus mengembangkan inovasi komunikasi, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam monitoring sentimen publik dan strategi respon cepat isu. Secara eksternal, penghargaan ini memperkuat posisi Kemdiktisaintek sebagai mitra kredibel bagi perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri teknologi dalam percepatan agenda nasional, termasuk target mencetak 1 juta talenta digital Indonesia



pada tahun 2029.

Melihat kesuksesan ini, Kemdiktisaintek juga merencanakan penguatan ruang dialog publik melalui forum nasional “Digital Trust in Education”, yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk kolaborasi konten edukasi dan penyebaran informasi kebijakan secara lebih luas, interaktif, dan terukur. Keberhasilan meraih TOP GPR Award 2025 membuktikan bahwa komunikasi publik bukan sekadar aktivitas penyampaian informasi, tetapi fondasi penting

reformasi birokrasi. Ketika komunikasi dibangun dengan transparansi, konsistensi, dan relevansi, maka kepercayaan publik tumbuh—dan dari sanalah legitimasi kebijakan pemerintah bermula.

Dengan pencapaian ini, membuktikan bahwa sains dan teknologi tidak hanya bertumbuh di laboratorium atau ruang akademik, tetapi juga dalam ruang komunikasi publik yang terbuka, kolaboratif, dan inspiratif. Sebuah langkah kuat menuju Indonesia Maju berbasis inovasi dan pengetahuan. ■



Raih TOP GPR Award 2025, Pemprov Jambi Sukses Bangun Komunikasi Digital yang Transparan



■ Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Mewakili Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan sambutan sesaat setelah menerima TOP GPR Award 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali mengukir prestasi nasional yang membanggakan dengan meraih Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 dari GPR Institute. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Jambi dalam mengelola komunikasi publik berbasis digital, menjadikannya satu-satun-

ya provinsi di Indonesia yang berhasil meraih gelar bergengsi tersebut tahun ini. Di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, serta didukung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, capaian ini menegaskan komitmen Pemprov Jambi dalam membangun kepercayaan mas-

yarakat melalui strategi humas yang inovatif dan adaptif di era disrupsi digital semakin meyakinkan.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute, kepada Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mewakili Gubernur Al Haris, dalam acara



5th GPR Forum & Awarding Ceremony TOP GPR Award 2025 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025). Acara bertema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi” ini juga dirangkaikan dengan peluncuran majalah GPR Indonesia Annual Achievement Reports: GPR Champion 2025, yang memuat kisah sukses para pemenang.

Penyerahan dilakukan di hadapan Direktur GPR Institute, Arief Munajad, dan Co-Founder Tri Ra harjo, menandai apresiasi atas kontribusi Pemprov Jambi dalam memperkuat citra pemerintah daerah melalui komunikasi yang transparan dan inklusif. GPR Institute yang dipimpin Prof. Widodo Muktiyo merilis hasil risetnya mengenai institusi pemerintah dengan engagement digital terbaik sepanjang Juli–September 2025. Penilaian mencakup tiga aspek: kesadaran digital, kualitas media dan website, serta keterlibatan di media sosial. Pemprov Jambi unggul pada semua aspek tersebut berkat strategi komunikasi yang cepat, kredibel, dan terintegrasi.

Prof. Widodo menegaskan bahwa komunikasi publik kini memegang peran penting dalam menjaga legitimasi pemerintah di tengah derasnya informasi dan disinformasi. Jambi dinilai berhasil memanfaatkan digital PR untuk membangun dialog dua arah dengan warganya. “Tanpa kepercayaan publik, kebijakan tidak akan berjalan efektif,” ujarnya. Ariansyah dari Dinas Kominfo Jambi menyampaikan bahwa Jambi adalah satu-satunya provinsi yang meraih TOP GPR Award 2025. Prestasi ini melanjutkan capaian sebelumnya ketika Guber-



■ Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Mewakili Gubernur Jambi, Al Haris, menerima TOP GPR Award 2025.

nur Al Haris menerima Top GPR Figure Award 2024. Upaya digitalisasi dilakukan melalui website jambiprov.go.id, kampanye harian “One Day One News”, serta penguatan akun media sosial resmi yang kini menghasilkan lebih dari 500 ribu interaksi bulanan. Pemprov Jambi juga aktif dalam digital storytelling program Jambi MANTAP dan penyediaan layanan publik online, termasuk pengaduan warga melalui Jambi Smart City. Pendekatan berbasis PESO membuat informasi pemerintah lebih mudah diakses dan membangun rasa dilibatkan oleh masyarakat.

Dampak digitalisasi ini terlihat nyata. Survei internal Kominfo menunjukkan kenaikan 25% kepuasan publik sejak 2024, terutama terkait respons cepat pemerintah terhadap isu lokal. Di tingkat nasional, Jambi menjadi satu-satunya

provinsi yang masuk jajaran pemenang GPR CHAMPION 2025 bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan beberapa pemerintah daerah lainnya. Keberhasilan ini membawa manfaat bagi 3,7 juta warga Jambi, mulai dari akses informasi bansos hingga mitigasi banjir. Secara ekonomi, peningkatan engagement digital turut mendorong promosi wisata dan ketertarikan investor. Gubernur Al Haris menyebut penghargaan ini sejalan dengan visi Jambi Berkelanjutan 2045 dan Indonesia Emas. “Kami akan terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, karena keberhasilan humas adalah kunci keberhasilan pembangunan,” tegasnya. GPR Institute berharap prestasi Jambi menjadi inspirasi daerah lain untuk menguatkan transformasi digital demi pemerintahan yang lebih transparan dan dipercaya masyarakat. ■



Pemprov Kaltim Meraih TOP GPR Award 2025, Mengelola Komunikasi Publik Digital Efektif, Inovatif dan Transparan



■ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menerima penghargaan TOP GPR AWARD 2025

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mencetak prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah resmi meraih Top GPR Award 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Government Public Relations (GPR) Institute sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemprov Kaltim dalam mengelola komunikasi publik digital secara efektif, inovatif, serta transparan di era pemerintahan modern yang menuntut kecepatan informasi dan kepercayaan publik.

Penganugerahan dilaksanakan dalam acara 5th GPR Forum & Awarding Ceremony yang berlangsung pada 4 November 2025 di The Sultan Hotel Jakarta. Acara ini dihadiri perwakilan kementerian, lembaga nasional, serta pemerintah daerah se-Indonesia. Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur GPR Institute, Arief Munajad, disaksikan oleh Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute sekaligus Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, serta Tri Raharjo, Co-Founder GPR Institute.

Ajang penghargaan tahun ini mengusung tema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi”, menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar penyampaian informasi satu arah, melainkan proses membangun kepercayaan digital dan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, GPR Institute juga meluncurkan majalah Annual Achievement Reports: GPR Champion 2025 yang menampilkan instansi terbaik da-

lam pengelolaan komunikasi publik di ranah digital.

Pemprov Kaltim berhasil meraih penghargaan setelah melewati proses penilaian berbasis riset digital yang dilakukan GPR Institute sejak Juli hingga September 2025. Tiga indikator utama menjadi dasar penilaian: Digital Awareness, yang mengukur seberapa besar visibilitas lembaga di ruang digital; Digital Media & Website, yang mengevaluasi kualitas pesan dan keakuratan pemberitaan; serta Social Media Engagement, yang melihat tingkat interaksi publik dan efektivitas pesan pemerintah di media sosial. Dalam tiga kategori ini, Pemprov Kaltim dinilai konsisten unggul dan berhasil membangun reputasi digital yang kuat, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Founder GPR Institute, Prof. Widodo Muktiyo, dalam sambutannya menegaskan bahwa komunikasi publik kini menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern. “GPR bukan hanya juru bicara kebijakan, tetapi penjaga persepsi publik. Tanpa digital trust, kebijakan tidak akan memiliki legitimasi sosial,” ujarnya. Pesan tersebut semakin memperkuat arti penting penghargaan yang diterima Pemprov Kaltim sebagai bukti keberhasilan dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi publik yang kredibel.

Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo, menambahkan bahwa keberhasilan Pemprov Kaltim bukan semata pengelolaan media sosial, melainkan hasil dari strategi yang konsisten dan berbasis data. “Penilaian kami berbasis riset dig-



ital agar hasilnya objektif, terukur, dan mencerminkan kondisi nyata reputasi instansi di ruang publik digital,” jelasnya.

Penghargaan diterima oleh Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk memperkuat sistem komunikasi publik yang lebih modern dan partisipatif. “Penghargaan ini bukan akhir, tetapi komitmen. Kaltim semakin

mantap menuju pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan dekat dengan masyarakat,” ungkap Faisal.

Dengan penghargaan ini, Pemprov Kalimantan Timur menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang mampu melakukan transformasi komunikasi publik berbasis teknologi dan partisipasi warga, sekaligus menjadi role model bagi daerah lain dalam membangun reputasi digital dan komunikasi transparan di era pemerintahan modern. ■



Pemkab Tabalong Raih Top GPR Award 2025

Keterbukaan Informasi Publik Dorong Keterlibatan Masyarakat dan Dukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk Pembangunan Pro-Rakyat



■ Bupati Tabalong Ir. H. M. Noor Rifani, SH, ST, MTM Menerima Penghargaan TOP GPR Award 2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Kalimantan Selatan, kembali mencatatkan prestasi nasional yang membanggakan. Pada 4 November 2025, Bupati Tabalong H. Mohammad Noor Rifani (Haji Fani) berhasil membawa daerah berjuluk “Bumi Saraba Kawa” ini meraih Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 dalam ajang 5th TOP GPR Award yang diselenggarakan GPR Institute di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keunggulan Pemkab Tabalong dalam mengelola komunikasi publik secara transparan, inovatif, dan partisipatif. Penilaian independen berbasis data yang dilakukan sejak Juli hingga September 2025 menilai tiga aspek utama: digital awareness, digital engagement, serta digital reputation. Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo, menekankan bahwa Tabalong berhasil membangun komunikasi publik yang berorientasi pada rep-

utasi organisasi dan keterlibatan masyarakat secara nyata.

“Kami bersyukur atas penghargaan ini. Ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi di sektor komunikasi publik, agar informasi lebih transparan dan kolaboratif dengan masyarakat,” ujar Bupati Haji Fani usai menerima trofi. Prestasi ini menempatkan Pemkab Tabalong sejajar dengan daerah lain seperti Pemkab Tanah Laut, Pemkab Klaten, dan Pemkot



“Pada 4 November 2025, Bupati Tabalong H. Mohammad Noor Rifani (Haji Fani) berhasil membawa daerah berjuluk “Bumi Saraba Kawa” ini meraih Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 dalam ajang 5th TOP GPR Award yang diselenggarakan GPR Institute di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.”



■ Bupati Tabalong Ir. H. M. Noor Rifani, SH, ST, MTM berpose bersama dengan peraih Top GPRD AWARD 2025.

Pekalongan di kategori kabupaten/kota.

Rahasia di balik Top GPR Award 2025 ini adalah komitmen kuat Pemkab Tabalong terhadap keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), website resmi, media sosial aktif, serta kanal konvensional seperti baliho dan media cetak, informasi pembangunan disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses.

Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Tabalong, Eddy Suriyani, menjelaskan bahwa pendekatan multi-kanal ini telah meningkatkan interaksi masyarakat secara signifikan. Keluhan warga lebih cepat ditanggapi, partisipasi dalam program pembangunan melonjak, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin kuat. “Masyarakat tidak lagi merasa jauh dari pemerintah. Mereka ikut serta mengawasi dan memberikan masukan langsung,” tambahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Pem-

ab Tabalong juga menetapkan standar baru dalam penyusunan konten komunikasi publik. Pesan pembangunan tidak hanya disajikan sebagai laporan teknis, tetapi dikemas dalam bentuk visual, video pendek, edukasi digital, dan narasi yang mudah dipahami lintas usia. Konten yang dekat dengan keseharian masyarakat—seperti layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur desa—menjadi magnet tersendiri yang memperkuat engagement digital.

Selain itu, strategi komunikasi publik Tabalong tidak berhenti pada penyampaian informasi satu arah. Pemerintah juga membuka ruang dialog publik melalui forum konsultasi tatap muka, live streaming, hingga diskusi tematik bersama komunitas lokal. Mekanisme ini memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra pembangunan, bukan hanya audiens.

Hasilnya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih tinggi, mulai dari program peningkatan tena-

ga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, hingga insentif pengurus rumah ibadah. Transparansi ini bukan hanya memenuhi kewajiban, tapi menjadi alat ampuh untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam mewujudkan Tabalong yang maju dan sejahtera.

Capaian ini semakin bermakna karena selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terutama poin yang menekankan pemerintahan bersih, transparan, akuntabel, serta berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil. Keterbukaan informasi yang diterapkan Pemkab Tabalong mendukung visi nasional untuk membangun good governance melalui anti-korupsi dan akuntabilitas publik.

Pendekatan komunikasi publik Tabalong juga memperhatikan era digital yang sangat cepat dan penuh risiko disinformasi. Karena itu, pemerintah daerah secara bertahap memperkuat literasi digital masyarakat, membangun sistem klarifikasi hoaks, dan meningkatkan



“Top GPR Award 2025 merupakan tonggak baru bagi Pemkab Tabalong untuk terus memperkuat digitalisasi informasi, inovasi komunikasi dan keterlibatan masyarakat.”



koordinasi dengan media lokal maupun nasional agar informasi yang beredar tidak hanya cepat, tetapi juga valid. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi mengelola persepsi publik secara bertanggung jawab.

Top GPR Award 2025 bukanlah akhir, melainkan tonggak baru bagi Pemkab Tabalong untuk terus memperkuat digitalisasi informasi, inovasi komunikasi, dan keterlibatan masyarakat. Di tengah era disrupsi digital, daerah ini membuktikan bahwa pemerintahan terbuka adalah kunci keberhasilan pembangunan

berkelanjutan. Bupati Tabalong, Haji Fani mengatakan bahwa penghargaan yang diterima kali ini akan menjadi motivasi untuk terus berkerja secara maksimal untuk masyarakat. Haji Fani juga menyadari bahwa tantangan di dunia kehumasan Pemerintah kedepan sangat kompleks dan dinamis sehingga perlu terus melakukan inovasi dan berpikir kreatif agar komunikasi yang dibangun Pemerintah dan masyarakat lebih efektif dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. **“Harus terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat”**, ucap Haji Fani. Selain itu Haji Fani juga menekankan agar

Diskominfo Tabalong sebagai SKPD yang mempunyai tupoksi menyebarluaskan informasi dan komunikasi untuk lebih banyak lagi mendengar keluhan dan pengaduan masyarakat, agar nantinya komunikasinya berjalan dua arah antara Pemerintah dan masyarakat.

Selamat kepada Bupati Haji Fani, seluruh jajaran Pemkab Tabalong, dan masyarakat Bumi Saraba Kawa! Prestasi ini milik bersama. Mari terus dukung pembangunan pro-rakyat yang transparan, demi Indonesia maju sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Tabalong Maju, Rakyat Sejahtera – Saraba Kawa! ■



Kelola Komunikasi Publik dengan Apik, Kabupaten Tanah Laut Bangga Diapresiasi Top GPR Award 2025

TOP GPR AWARD



■ H. Rahmat Trianto, M.Si, M.Han
Bupati Tanah Laut, memberikan sambutan sesaat setelah menerima penghargaan TOP GPR Award 2025.

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut kembali mencuri perhatian nasional dengan meraih penghargaan bergengsi Top Government Public Relations (GPR) Award 2025.

Prestasi ini, yang diraih dalam ajang 5th Top GPR Award yang diselenggarakan oleh GPR Institute, menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut di bawah kepemi-

mpinan Bupati H. Rahmat Trianto untuk membangun komunikasi publik yang transparan, inovatif, dan berbasis digital. Penghargaan ini tidak hanya mengharumkan nama “Bumi Tuntung Pandang”, tapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam era transformasi digital pemerintahan.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung khidmat di Golden Ballroom, The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025). Bupati

H. Rahmat Trianto secara langsung menerima trofi atas nama Pemkab Tanah Laut, dihadiri oleh ratusan pejabat pemerintahan dari berbagai tingkatan. “Kami bersyukur atas apresiasi ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran untuk membuat informasi publik lebih mudah diakses masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah semakin kuat,” ujar Bupati Rahmat saat menerima penghargaan. Direktur GPR Institute, Arief Muna jad, turut memberikan selamat dan menekankan bahwa Tanah



Laut layak menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola kehumasan publik.

Top GPR Award merupakan penghargaan tahunan yang digagas oleh GPR Institute untuk mengapresiasi lembaga pemerintah – baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota – yang unggul dalam praktik Government Public Relations (GPR). Ajang ini menyoroti bagaimana pemerintah memanfaatkan komunikasi untuk membangun digital awareness, engagement, dan reputation di era digital.

Pada edisi ke-5 tahun 2025, lebih dari 370 entitas dinilai berdasarkan tiga parameter utama: Digital Awareness Aspect (20%), Digital Media & Website Aspect (50%), dan Social Media Aspect (30%). Penilaian dilakukan melalui riset digital sejak Juli hingga September 2025, yang mencakup analisis jutaan ulasan online dan interaksi publik.

Bagi Tanah Laut, penghargaan ini bukan sekadar trofi, melainkan pengakuan atas strategi komunikasi yang telah diterapkan sejak awal kepemimpinan Bupati Rahmat. Kabupaten dengan luas wilayah 3.655 km² dan populasi sekitar 250 ribu jiwa ini, yang dikenal sebagai penghasil padi dan perkebunan, telah bertransformasi menjadi daerah yang “terhubung” secara digital. Ini sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045, di mana komunikasi publik menjadi kunci transformasi dan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak datang begitu saja. Pemkab Tanah Laut telah menginte-



■ H. Rahmat Trianto, M.Si, M.Han
Bupati Tanah Laut berpose dengan Founder GPR Institute Prof. Widodo Muktiyo setelah menerima Penghargaan TOP GPR Award 2025.

grasikan teknologi informasi secara masif dalam penyebaran informasi publik.

Situs resmi <https://portal.tanahlautkab.go.id> dan <https://setda.tanahlautkab.go.id>, <https://bpkad.tanahlautkab.go.id>, <https://dispusip.tanahlautkab.go.id>, <https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id>/ kini menjadi pusat data terbuka, menyajikan laporan pembangunan, kegiatan bupati, hingga inovasi daerah seperti Tanah Laut Innovation Award 2025.

Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube Pemkab Tanah Laut aktif berbagi konten interaktif, mulai dari live streaming “Ngobrol Bareng Bupati” hingga dokumentasi kegiatan seperti Festival Layang-Layang Tanah Laut 2025. Salah satu kunci sukses adalah optimalisasi digital media untuk membangun citra positif. Misalnya, se-

lama persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalsel 2025 yang dituanakan Tanah Laut, tim humas memanfaatkan social media untuk “kick off spirit” yang viral, menarik ribuan interaksi dari warga lokal dan provinsi tetangga.

Selain itu, program seperti Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna ke-10 tahun 2025 juga dipromosikan secara digital, melibatkan akademisi, inovator, dan pelajar untuk menciptakan solusi lokal seperti teknologi pertanian ramah lingkungan. Bupati H. Rahmat Trianto menekankan peran kepemimpinan dalam hal ini. “Komunikasi bukan hanya soal informasi, tapi membangun kepercayaan. Kami fokus pada data-driven approach agar setiap pesan relevan dan berdampak,” katanya. Hasilnya? Skor akhir Tanah Laut mencapai level unggul, dengan peningkatan



engagement rate hingga 40% dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan metrik GPR Institute.

Penghargaan ini langsung berdampak pada Kabupaten Tanah Laut. Transparansi informasi telah mempercepat penyerapan anggaran daerah, terutama untuk sektor pertanian dan pariwisata. Warga kini lebih mudah mengakses layanan publik, seperti pengajuan izin usaha via aplikasi mobile yang terintegrasi dengan website Pemkab. Selain itu, citra positif ini menarik investasi, seperti kolaborasi dengan TNI AD untuk pembangunan infrastruktur dan dukungan dana hibah untuk kesenian budaya di 2026.

Bagi masyarakat, ini berarti pemerintahan yang lebih dekat. Program seperti “NGOBATI” (Ngobrol Bareng Bupati) di kecamatan-kecamatan telah menjadi wadah aspirasi, dengan ribuan warga berpartisipasi secara hybrid – tatap muka dan online. “Sekarang, informasi bupati sampai ke pelosok desa via WhatsApp group. Ini membuat kami merasa didengar,” ungkap seorang warga Desa Ambungan saat panen bawang merah baru-baru ini.

Dengan GPR Award 2025 di tangan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen melangkah lebih jauh. Bupati Rahmat berencana memperluas kolaborasi dengan platform digital nasional untuk live streaming kegiatan besar, seperti Hari Jadi Kabupaten Desember mendatang. “Penghargaan ini penyemangat untuk inovasi lebih baik. Kami ingin Kabupaten Tanah Laut menjadi daerah paling terbuka di Kalsel,” tegasnya. Prestasi



ini juga menginspirasi daerah lain. Kabupaten Tanah Laut membuktikan bahwa komunikasi digital bukan barang mewah, tapi kebutuhan dasar untuk good governance. Di tengah tantangan seperti keterbatasan akses internet di pedesaan, Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa dengan strategi tepat, daerah

pinggiran pun bisa bersaing di panggung nasional. Sukses Kabupaten Tanah Laut adalah cerita tentang bagaimana komunikasi bisa jadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Di era di mana informasi adalah kekuatan, “*Bumi Tuntung Pandang*” telah membuktikan: transparansi digital adalah kunci kemajuan. ■



Pemkab Klaten Fokus Garap Komunikasi Publik Berbuah Penghargaan TOP GPR Award 2025



■ Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom memberikan sambutan usai menerima penghargaan TOP GPR Award 2025.

Transformasi pemerintahan Kabupaten Klaten di bawah kepemimpinan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo kini mulai terlihat nyata dan mendapat perhatian publik nasional. Banyak pihak menilai arah baru yang dibawa Hamenang bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi perubahan paradigma, khususnya dalam bidang komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan.

Selama ini, Klaten sering dianggap berada dalam “bayangan prestasi” dua kota besar di sekitarnya, yaitu Yogyakarta dan Surakarta (Solo). Kedua kota tersebut

telah lama menjadi simbol kemajuan budaya, pendidikan, ekonomi kreatif, dan digitalisasi pemerintahan. Namun posisi Klaten yang secara geografis berada di tengah justru menjadi alasan strategis bagi Hamenang untuk membangun identitas baru, bukan sebagai daerah penopang, tetapi sebagai daerah yang mampu berdiri sejajar.

Sejak awal memimpin, Hamenang menyadari bahwa percepatan pembangunan tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur atau program fisik. Ia memahami bahwa percepatan membutuhkan energi baru berupa ko-

munikasi publik yang efektif, modern, terbuka, dan terukur. Di sinilah ia mulai mengadopsi pendekatan Government Public Relations (GPR) yang dikembangkan oleh Prof. Widodo Muktiyo dari GPR Institute. Pendekatan ini kemudian menjadi fondasi perubahan komunikasi publik Pemkab Klaten.

Menurut Hamenang, GPR bukan sekadar sarana untuk menyampaikan program pemerintah. GPR adalah cara membangun kesadaran publik, membentuk reputasi daerah, dan menciptakan dukungan masyarakat melalui pesan yang terarah dan mudah diterima.



Komunikasi bukan lagi aksesoris birokrasi, melainkan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ia juga menyebut bahwa komunikasi publik yang baik dapat menjadi jalan pintas percepatan daerah, terutama ketika sumber daya fiskal terbatas.

Dengan semangat tersebut, Pemkab Klaten mengubah paradigma komunikasi publik menjadi lebih intensif, massif, dan terukur. Setiap pesan pembangunan dikemas dengan gaya yang lebih humanis, mudah dicerna, dan dekat dengan keseharian masyarakat. Pemerintah hadir dalam ruang-ruang digital, bukan hanya untuk menyampaikan berita formal pemerintahan, tetapi juga untuk menceritakan perjalanan pembangunan, kisah inspiratif, pengalaman warga, serta capaian-capaian kecil yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Selain memperkuat kanal komunikasi digital, Pemkab Klaten juga mengembangkan pendekatan kolaboratif dengan menggandeng komunitas lokal, media, akademisi, hingga pelaku industri kreatif. Kolaborasi ini bertujuan agar pesan pembangunan tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung. Model komunikasi ini memberi kesan bahwa pembangunan bukan hanya agenda pemerintah, tetapi agenda bersama seluruh warga Klaten.

Upaya ini berjalan seiring peningkatan kualitas konten publikasi pemerintah daerah. Klaten mulai mengembangkan konten berbasis data, storytelling visual, serta narasi pembangunan yang lebih personal. Strategi ini menempatkan



■ Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom foto bersama Prof. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute dan Arief Munajad, Direktur GPR Institute usai menerima penghargaan TOP GPR Award 2025.

masyarakat tidak sekadar sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek utama dalam proses pembangunan.

Di bidang tata kelola informasi publik, Klaten menerapkan standar transparansi melalui publikasi laporan kinerja, progress pembangunan, dan realisasi anggaran secara berkala. Transparansi ini menjadi fondasi kepercayaan publik yang kemudian terlihat melalui peningkatan partisipasi dalam survei pelayanan publik, forum konsultasi, serta interaksi di media digital pemerintah.

Di era digital yang serba cepat, manajemen respons menjadi faktor penting. Pemkab Klaten menerapkan mekanisme quick response terhadap aduan publik, terutama melalui aplikasi Lapor Mas

Bup. Setiap laporan masyarakat dire spons sesuai kategori urgensi, didokumentasikan, dan dilaporkan kembali proses tindak lanjutnya. Sistem ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan mendengar.

Pendekatan komunikasi publik ini juga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan memaksimalkan potensi konten digital seperti video pendek, fotografi destinasi, serta pelibatan local influencer, promosi wisata Klaten berhasil menjangkau masyarakat luas secara nasional bahkan internasional.

Hasilnya terlihat nyata. Klaten mencatat rekor sebagai daerah dengan jum-



lah wisatawan terbanyak di Jawa Tengah tahun 2024, mencapai 6,8 juta pengunjung. Ini bukan sekadar angka, tetapi indikator keberhasilan komunikasi publik yang mampu mengangkat potensi daerah, menggerakkan ekonomi, dan menumbuhkan optimisme masyarakat.

Di tingkat internal organisasi, budaya komunikasi juga berubah. Hamenang mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengikuti standar komunikasi publik yang konsisten: informatif, transparan, cepat, dan berbasis data. Perubahan ini menciptakan fondasi tata kelola komunikasi yang lebih profesional dan terintegrasi antar sektor pemerintahan.

Keberhasilan komunikasi publik Klaten kemudian mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 pada ajang 5th Top GPR Forum di The Sultan Hotel Jakarta. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Prof. Widodo Muktiyo kepada Hamenang Wajar Ismoyo. Penghargaan tersebut menjadi validasi bahwa Klaten telah berhasil membangun pola komunikasi digital yang modern, terstruktur, dan berbasis engagement publik.

Dalam proses penilaian, GPR Institute melihat konsistensi Klaten membangun reputasi digital melalui penguatan kesadaran publik terhadap program pemerintah, tata kelola media dan website yang komunikatif, serta keterlibatan aktif masyarakat di ruang digital. Pendekatan ini dipandang berhasil karena tidak hanya menyampaikan pesan satu arah, tetapi menciptakan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kini Klaten mulai dike-



nal di tingkat nasional sebagai salah satu daerah yang progresif dalam komunikasi pemerintahan. Pemerintahan tidak hanya menjadi institusi yang bekerja, tetapi juga institusi yang mampu menceritakan pekerjaannya dengan cara yang relevan dan mudah diterima publik. Identitas baru Klaten terbentuk melalui konsistensi narasi yang kuat, citra digital yang terukur, serta kesadaran bahwa era pemerintahan modern adalah era keterbukaan dan kolaborasi. Pemerintah daerah percaya bahwa komunikasi publik bukan sekadar aktivitas, tetapi investasi reputasi untuk masa depan. Dengan fondasi yang sudah dibangun, Klaten bergerak bukan hanya untuk hadir di peta nasional—

tetapi untuk menjadi salah satu rujukan praktik komunikasi pemerintahan yang visioner di Indonesia.

Ke depan, Pemkab Klaten berkomitmen memperluas digitalisasi layanan publik, memperkuat literasi digital masyarakat, memperbesar ruang partisipasi publik dalam pembangunan, serta menciptakan komunikasi publik yang semakin personal, inklusif, dan bernilai strategis. Bupati Hamenang menutup pesannya dengan keyakinan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian mengambil langkah kecil yang konsisten. Dan hari ini, Klaten telah memulai langkahnya. ■



Pemkot Pekalongan Raih Top GPR Award 2025, Keterbukaan Informasi sebagai Jembatan Kepercayaan Rakyat

TOP GPR AWARD



■ Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE, MM memberikan sambutan usai menerima penghargaan TOP GPR Award 2025.

Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan komunikasi era digital, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menunjukkan bahwa transparansi, inovasi, dan kedekatan dengan masyarakat bukan hanya slogan, tetapi komitmen nyata yang dapat diwujudkan melalui strategi komunikasi publik yang terukur dan konsisten. Momentum penting itu semakin kuat ketika pada 4 November 2025,

Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf, berhasil meraih Top Government Public Relations (GPR) Award 2025 dalam ajang nasional yang diadakan GPR Institute di Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya Pemkot Pekalongan dalam komunikasi publik telah bergerak ke level yang lebih maju, terstruktur, dan berorientasi

pelayanan. Top GPR Award 2025 diberikan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan sejak Juli hingga September 2025 melalui riset digital berbasis data analytics. Aspek yang diukur mencakup tingkat digital awareness, digital engagement, dan digital trust dengan parameter seperti kecepatan respons, kualitas penyampaian pesan, keberlanjutan komunikasi, serta interaksi masyarakat terhadap platform digital resmi Pemkot



Pekalongan. Hasil penilaian menunjukkan Pekalongan unggul dalam membangun reputasi digital yang inklusif dan adaptif.

Dalam sambutannya, Founder GPR Institute Prof. Widodo Muktiyo menyatakan bahwa Pekalongan adalah contoh keberhasilan pemerintah daerah dalam menggabungkan gaya komunikasi tradisional berbasis kultural dengan pendekatan modern berbasis digital engagement. Ia menilai bahwa kinerja komunikasi publik Pekalongan tidak hanya responsif, tetapi juga memiliki nilai emosional dan naratif yang kuat sehingga mudah diterima masyarakat.

Mas Aaf sendiri, dengan rendah hati dan penuh optimisme menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi pemacu semangat Pemkot Pekalongan untuk terus memperkuat transparansi informasi publik. “Kami berkomitmen menyampaikan informasi lebih cepat, tepat, dan terpercaya. Tidak hanya untuk memberitahukan, tetapi untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat,” ungkapnya setelah menerima penghargaan.

Prestasi ini melengkapi catatan penting sebelumnya, yaitu raihan predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP Award) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dengan skor tinggi 96,03, Pemkot Pekalongan dinilai konsisten dalam penerapan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Kategori ini bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa Pemkot Pekalongan telah menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja,



■ Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE, MM berfoto bersama Prof. Widodo Muktiyo, Founder GPR Institute dan Arief Munajad, Direktur GPR Institute usai menerima penghargaan TOP GPR Award 2025.

bukan hanya kewajiban hukum. Pondasi utama dari keberhasilan ini adalah terbentuknya ekosistem komunikasi publik yang solid—dimulai dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), strategi pengelolaan website, kanal pengaduan, hingga tata kelola media sosial yang aktif dan responsif. Dengan pola komunikasi tersebut, masyarakat kini dapat mengakses data program kerja, capaian pembangunan, alokasi anggaran, serta progres penyelesaian masalah kota secara realtime.

Untuk memperkuat hal tersebut, Pemkot Pekalongan menerapkan model ko-

munikasi publik berbasis multi-layer messaging, di mana pesan pemerintah disesuaikan dengan segmentasi audiens. Generasi muda mendapatkan pesan dalam bentuk video pendek, reels, dan konten kreatif; sementara kelompok masyarakat yang kurang melek digital tetap dijangkau melalui radio lokal, media cetak, baliho, dan dialog publik. Model hybrid inilah yang membuat penyebaran informasi berjalan merata.

Pemerintah juga memperkuat fungsi respon cepat melalui command center yang memantau percakapan publik, tren isu digital, serta sentimen masyarakat.

Dengan dukungan sistem analitik, pemerintah dapat mengetahui isu mana yang membutuhkan klarifikasi cepat, isu mana yang berkembang menjadi potensi krisis komunikasi, dan isu mana yang harus dikelola dengan pendekatan narasi kolaboratif.

Tak hanya itu, strategi storytelling juga menjadi elemen penting. Program pemerintah tidak hanya diberitakan dalam bentuk laporan formal, tetapi dikemas dalam cerita warga yang merasakan dampaknya. Misalnya, kisah pelaku UMKM batik yang berhasil naik kelas berkat pelatihan digital, atau warga terdampak rob yang kini merasakan manfaat pembangunan tanggul. Konten pengalaman nyata ini meningkatkan emotional engagement publik.

Pendekatan komunikasi publik Pemkot Pekalongan ini juga relevan dan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, khususnya agenda pembangunan yang menegaskan pemerintahan bersih, transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Strategi GPR Pekalongan mampu mendukung misi nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern melalui akuntabilitas, digitalisasi layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya sebatas penyampaian informasi, pola komunikasi ini memberikan dampak nyata pada program-program prioritas seperti pemberdayaan UMKM batik, pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur kota, penanganan banjir rob, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Informasi program terse-



but tidak hanya dikabarkan melalui siaran pers, tetapi juga dikemas dalam storytelling audiovisual, infografis ringan, serta konten digital yang dapat dengan mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat dari generasi tua hingga Gen Z.

Melalui strategi ini, Pekalongan mulai dikenal bukan hanya sebagai Kota Batik, tetapi juga sebagai kota dengan pemerintahan yang dekat dengan rakyat dan berkarakter digital progresif. Bahkan di tingkat nasional, banyak yang menilai

Pekalongan sebagai salah satu role model komunikasi publik pemerintah daerah yang mampu menjembatani kebutuhan rakyat dengan visi pembangunan masa depan. Namun bagi Mas Aaf, penghargaan ini bukan garis akhir, melainkan pintu tahap baru. Pemkot Pekalongan berkomitmen memperluas digitalisasi layanan publik, memperkuat big data komunikasi pemerintahan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat sistem integrasi pengaduan dengan respon yang cepat dan tepat. ■



TOP GPR Award 2025

Ajang 5th TOP GPR AWARD 2025 merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan oleh GPR Institute kepada Kementerian, Lembaga Negara, Komisi Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, yang dinilai telah

berhasil menjalankan kegiatan praktik kehumasan pemerintah dalam membangun digital awareness, digital engagement dan digital reputation. Anugerah penghargaan 5th TOP GPR AWARD 2025 merupakan kegiatan yang diadakan dalam bentuk ceremony awarding event. Penyerahan apresiasi ini dilak-

sanakan dalam GPR Forum 2025, yang menghadirkan narasumber kompeten. Ajang ini menjadi momentum strategis untuk memberikan penghargaan secara langsung sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi antar instansi dalam penguatan peran GPR ke depan.

List TOP GPR Award 2025

KEMENTERIAN:

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Kementerian Agama Republik Indonesia
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Hukum
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

KOMISI NEGARA:

- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Komisi Ombudsman
- Komisi Perlindungan Anak
- Komisi Nasional Hak Asasi Nasional
- Komisi Yudisial

TNI/POLRI:

- TNI
- POLRI

LEMBAGA TINGGI NEGARA:

- Mahkamah Agung
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Mahkamah Konstitusi
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Dewan Perwakilan Daerah

LEMBAGA NON KEMENTERIAN

- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik
- Badan Kepegawaian Negara
- Lembaga Administrasi Negara
- Arsip Nasional Republik Indonesia
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Badan Standarisasi Nasional
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Badan Informasi Geospasial
- Badan Keamanan Laut
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

PEMERINTAH PROVINSI:

- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Sumatera Utara
- DKI Jakarta
- Jawa Timur
- Kalimantan Timur
- Bali
- Sulawesi Selatan
- Sumatera Barat
- Jambi
- Kalimantan Barat
- DI Yogyakarta
- Aceh
- Lampung
- Maluku
- Papua
- Sumatera Selatan
- Kepulauan Riau
- Banten
- Riau
- Gorontalo
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Tengah
- Nusa Tenggara Barat
- Papua Barat
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Barat
- Papua Barat Daya



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

- Kabupaten Aceh Besar	- Kabupaten Karanganyar	- Kabupaten Paser	- Kota Bandung
- Kabupaten Aceh Utara	- Kabupaten Karangasem	- Kabupaten Pasuruan	- Kota Banjar
- Kabupaten Agam	- Kabupaten Karawang	- Kabupaten Pati	- Kota Banjarbaru
- Kabupaten Asahan	- Kabupaten Karimun	- Kabupaten Pekalongan	- Kota Batam
- Kabupaten Badung	- Kabupaten Kaur	- Kabupaten Pemalang	- Kota Batu
- Kabupaten Balangan	- Kabupaten Kebumen	- Kabupaten Pesisir Selatan	- Kota Baubau
- Kabupaten Bandung	- Kabupaten Kediri	- Kabupaten Pinrang	- Kota Bekasi
- Kabupaten Bandung Barat	- Kabupaten Kendal	- Kabupaten Ponorogo	- Kota Bengkulu
- Kabupaten Bangka	- Kabupaten Kerinci	- Kabupaten Pringsewu	- Kota Bima
- Kabupaten Bangkalan	- Kabupaten Klaten	- Kabupaten Probolinggo	- Kota Blitar
- Kabupaten Bangli	- Kabupaten Klungkung	- Kabupaten Purbalingga	- Kota Bogor
- Kabupaten Banjar	- Kabupaten Kolaka	- Kabupaten Purwakarta	- Kota Bontang
- Kabupaten Banjarnegara	- Kabupaten Kotawaringin Barat	- Kabupaten Purworejo	- Kota Bukittinggi
- Kabupaten Bantul	- Kabupaten Kuantan Singingi	- Kabupaten Rembang	- Kota Cimahi
- Kabupaten Banyuasin	- Kabupaten Kubu Raya	- Kabupaten Rokan Hulu	- Kota Cirebon
- Kabupaten Banyuwa	- Kabupaten Kudus	- Kabupaten Samosir	- Kota Denpasar
- Kabupaten Barito Utara	- Kabupaten Kulon Progo	- Kabupaten Sampang	- Kota Depok
- Kabupaten Batang	- Kabupaten Kuningan	- Kabupaten Sanggau	- Kota Gorontalo
- Kabupaten Batubara	- Kabupaten Kutai Barat	- Kabupaten Semarang	- Kota Jambi
- Kabupaten Bekasi	- Kabupaten Kutai Kartanegara	- Kabupaten Serang	- Kota Kediri
- Kabupaten Bengkalis	- Kabupaten Kutai Timur	- Kabupaten Sidoarjo	- Kota Kendari
- Kabupaten Bengkulu Selatan	- Kabupaten Lahat	- Kabupaten Sijunjung	- Kota Lhokseumawe
- Kabupaten Berau	- Kabupaten Lamongan	- Kabupaten Sintang	- Kota Madiun
- Kabupaten Bireuen	- Kabupaten Langkat	- Kabupaten Situbondo	- Kota Magelang
- Kabupaten Blitar	- Kabupaten Lebak	- Kabupaten Sleman	- Kota Makassar
- Kabupaten Blora	- Kabupaten Lebong	- Kabupaten Solok Selatan	- Kota Malang
- Kabupaten Bogor	- Kabupaten Lingga	- Kabupaten Soppeng	- Kota Manado
- Kabupaten Bojonegoro	- Kabupaten Lumajang	- Kabupaten Sorong	- Kota Mataram
- Kabupaten Brebes	- Kabupaten Luwu	- Kabupaten Sragen	- Kota Medan
- Kabupaten Buleleng	- Kabupaten Luwu Timur	- Kabupaten Subang	- Kota Metro
- Kabupaten Bulukumba	- Kabupaten Madiun	- Kabupaten Sukabumi	- Kota Mojokerto
- Kabupaten Bulungan	- Kabupaten Magelang	- Kabupaten Sukoharjo	- Kota Padang
- Kabupaten Buton	- Kabupaten Magetan	- Kabupaten Sumedang	- Kota Palembang
- Kabupaten Ciamis	- Kabupaten Majalengka	- Kabupaten Sumenep	- Kota Palopo
- Kabupaten Cianjur	- Kabupaten Malang	- Kabupaten Tabalong	- Kota Palu
- Kabupaten Cilacap	- Kabupaten Malinau	- Kabupaten Takalar	- Kota Parepare
- Kabupaten Cirebon	- Kabupaten Mamuju	- Kabupaten Tanah Bumbu	- Kota Pasuruan
- Kabupaten Dai	- Kabupaten Manggarai	- Kabupaten Tanah Datar	- Kota Pekalongan
- Kabupaten Deli Serdang	- Kabupaten Maros	- Kabupaten Tanah Laut	- Kota Pekanbaru
- Kabupaten Demak	- Kabupaten Mempawah	- Kabupaten Tangerang	- Kota Pontianak
- Kabupaten Empat Lawang	- Kabupaten Mesuji	- Kabupaten Tasikmalaya	- Kota Probolinggo
- Kabupaten Garut	- Kabupaten Minahasa	- Kabupaten Tebo	- Kota Sabang
- Kabupaten Gianyar	- Kabupaten Mojokerto	- Kabupaten Tegal	- Kota Salatiga
- Kabupaten Gowa	- Kabupaten Muara Enim	- Kabupaten Temanggung	- Kota Samarinda
- Kabupaten Gresik	- Kabupaten Murung Raya	- Kabupaten Trenggalek	- Kota Semarang
- Kabupaten Grobogan	- Kabupaten Musi Rawas	- Kabupaten Tuban	- Kota Serang
- Kabupaten Gunung Mas	- Kabupaten Nabire	- Kabupaten Tulang Bawang	- Kota Sibolga
- Kabupaten Gunungkidul	- Kabupaten Natuna	- Kabupaten Tulungagung	- Kota Sukabumi
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah	- Kabupaten Nganjuk	- Kabupaten Wajo	- Kota Surakarta
- Kabupaten Indragiri Hilir	- Kabupaten Ngawi	- Kabupaten Way Kanan	- Kota Tangerang
- Kabupaten Indramayu	- Kabupaten Nias	- Kabupaten Wonogiri	- Kota Tangerang Selatan
- Kabupaten Jayapura	- Kabupaten Nias Selatan	- Kabupaten Wonosobo	- Kota Tarakan
- Kabupaten Jember	- Kabupaten Nunukan	- Kotif Jakarta Barat	- Kota Tasikmalaya
- Kabupaten Jembrana	- Kabupaten Pacitan	- Kotif Jakarta Pusat	- Kota Ternate
- Kabupaten Jepara	- Kabupaten Pakpak Bharat	- Kotif Jakarta Selatan	- Kota Tomohon
- Kabupaten Jombang	- Kabupaten Pamekasan	- Kotif Jakarta Timur	- Kota Tual
- Kabupaten Kampar	- Kabupaten Pandeglang	- Kotif Jakarta Utara	- Kota Yogyakarta
- Kabupaten Kapuas	- Kabupaten Pangandaran	- Kota Ambon	
- Kabupaten Kapuas Hulu	- Kabupaten Pasaman Barat	- Kota Balikpapan	
		- Kota Banda Aceh	



TOP GPR Leader Award 2025

Pengakuan atas Kepemimpinan Inovatif dalam Komunikasi Publik Digital

TOP GPR Leader Award 2025 merupakan penghargaan prestisius yang diberikan oleh Government Public Relations (GPR) Institute kepada pimpinan kehumasan yang berhasil menerapkan strategi komunikasi publik di era digital, sehingga memperoleh reputasi positif di mata publik.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian 5th TOP GPR Award 2025, yang mengangkat tema “Digital Trust & Public Engagement: Peran Strategis GPR di Era Disrupsi”. Acara penganugerahan digelar pada 4 November 2025 di The Sultan Hotel, Jakarta, dan menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam membangun kepercayaan digital serta keterlibatan masyarakat.

Sebagai edisi ketiga dari TOP GPR Leader Award, penghargaan ini secara khusus mengapresiasi individu atau pemimpin yang unggul dalam praktik GPR, termasuk dalam memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Tidak hanya sekadar penyampaian informasi satu arah, GPR Leader diharapkan menjadi pengelola persepsi publik

yang adaptif terhadap tantangan digitalisasi, seperti disinformasi dan tuntutan transparansi dari masyarakat. Penilaian untuk TOP GPR Leader Award 2025 dilakukan melalui riset digital yang komprehensif oleh GPR Institute, berlangsung dari Juli hingga September 2025. Metode ini dit-

mencakup pencapaian coverage positif dominan (minimal 90%) dan skor akhir minimal 70 poin. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penghargaan hanya diberikan kepada pemimpin yang telah membuktikan keberhasilan dalam membangun reputasi digital yang kuat. GPR Institute juga memberikan apresiasi kepada TOP 50 GPR LEADER yang telah berhasil membawa kinerja PR instansinya menjadi salah satu dari 50 instansi pemerintahan yang berhasil menduduki peringkat teratas berdasarkan hasil penilaian TOP GPR Index.

Penilaian ini memastikan instansi penerima penghargaan benar-benar memiliki reputasi positif di ruang digital.” Ini menggarisbawahi komitmen GPR Institute dalam menerapkan standar objektif untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan kehumasan.

kan secara ketat untuk menargetkan seluruh institusi pemerintahan terkait, dengan tujuan memastikan bahwa penerima penghargaan benar-benar memiliki dampak positif di ruang digital.

Selain itu, persyaratan kualifikasi

Penghargaan TOP GPR Leader 2025 tidak hanya jadi simbol prestasi, tetapi juga wadah berbagi pengetahuan antar praktisi GPR. Dengan fokus pada digital trust, award ini mendorong pimpinan kehumasan untuk terus berinovasi, sehingga meningkatkan citra ins





Build Quality Indonesia Public Relations

Government Public Relations Institute (GPR Institute) merupakan sebuah perusahaan Consulting, Training dan Riset yang hadir untuk membantu profesi kehumasan (public relations) khususnya di ranah pemerintahan (Government Public Relations) dalam meningkatkan kualitas dan kompetensinya yang sesuai dengan perkembangan zaman.



GPR SERVICES

- ▶ **Training & Seminar**
- ▶ **Distribusi Media Rilis**
- ▶ **Media Online Nasional**
- ▶ **Press Conference**
- ▶ **Event Management**
- ▶ **Media Gathering**



INFORMASI LEBIH LANJUT :  **+62 813-8872-5454**  **gprinstitute123@gmail.com**



gprinstitute.id



[GPR Institute](https://www.youtube.com/GPRInstitute)



[gpr_institute](https://www.instagram.com/gpr_institute)



Kepala BKHM Kemendikdasmen Raih Top GPR Leader 2025, Inspirasi Komunikasi Publik Pemerintah



■ Anang Rianto, Kepala Biro HPB Kemendikdasmen

Di tengah era disrupsi digital, komunikasi publik menjadi elemen strategis dalam keberhasilan pemerintahan. Inilah yang berhasil dibuktikan oleh Anang Rianto, S.E., M.A., Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pada ajang bergengsi 5th TOP GPR Award 2025 yang digelar oleh GPR Institute di Jakarta pada 4 November 2025, Anang dinobatkan sebagai 3rd TOP GPR Leader 2025. Penghargaan ini tidak sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas dedikasinya dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keterbukaan infor-

masi. Sebagai pemimpin humas pemerintahan, Anang dikenal memiliki pendekatan strategis yang mengedepankan teknologi digital dan komunikasi dua arah sehingga publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra dialog. Di bawah kepemimpinannya, Kemendikdasmen menunjukkan performa komunikasi publik yang konsisten dan terukur—dibuktikan dengan diraihnya empat penghargaan sekaligus pada ajang yang sama, termasuk Top GPR Figure Award 2025 untuk Mendikdasmen, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja tim. Kami bersyukur dan ini akan menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Anang dalam sambutannya. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen bahwa

keberhasilan komunikasi publik bukan hanya soal platform dan strategi, tetapi juga budaya kolaborasi yang solid.

GPR Institute sebagai penyelenggara memberikan penilaian berbasis riset digital, mencakup aspek digital awareness, kualitas media dan website, serta engagement publik di media sosial. Para leader seperti Anang dianggap memainkan peran penting dalam transformasi komunikasi pemerintahan, terutama pada sektor pendidikan yang bersinggungan langsung dengan ekosistem masyarakat luas.

Dengan pencapaian ini, Kemendikdasmen semakin mantap melangkah mendukung program pendidikan nasional yang inklusif dan dekat dengan masyarakat. Prestasi Anang Rianto menjadi inspirasi bagi para praktisi GPR di seluruh Indonesia bahwa kepemimpinan visioner, strategi digital yang tepat, dan komunikasi berbasis empati mampu menghadirkan perubahan nyata di ruang publik.

Selamat kepada Anang Rianto, Kepala Biro HPB Kemendikdasmen —sebuah bukti bahwa komunikasi publik yang baik adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang maju, transparan, kapabel, inovatif, kredibel, sehingga dapat dipercaya rakyat. ■



Konsistensi Terapkan Prinsip GPR, Kabiro BUHPBJ Kemdiktisaintek, Raih TOP GPR Leader 2025



■ Kabiro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (BUHPBJ) Kemdiktisaintek, Manifes Zubayr Raih TOP GPR LEADER 2025

K eberhasilan ini juga terkait pada penerapan prinsip-prinsip GPR yang matang, sebagaimana diuraikan dalam literatur Government Public Relations di Indonesia: transparansi, akuntabilitas, dan etika komunikasi. Kemendikisaintek menerapkan model simetris dua arah (two way symmetric model), di mana umpan balik publik menjadi masukan utama untuk kebijakan, sesuai dengan etika PRSA: veracity (kebenaran), beneficence (manfaat), dan fairness (keadilan). Terkait dengan konsistensi meningkatkan diseminasi informasi dan peran dan fungsi Humas, Kabiro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa (BUHPBJ) Kemdiktisaintek, Manifes Zubayr, sangat piawai dalam mengelola langkah-langkah strategisnya. Tak heran, atas

capaian itu, dirinya layak didapuk sebagai satu dari penerima TOP GPR Leader 2025.

Prinsip dasar GPR seperti media relations yang kuat terlihat dari dominasi pemberitaan positif di 150 media nasional, sementara keterbukaan informasi publik (UU No. 14/2008) diwujudkan melalui portal data riset yang mudah diakses. Selain itu, kementerian konsisten mengelola isu melalui identifikasi dini dan strategi responsif, menghindari krisis dengan membangun trust digital. “Ke depan kita akan bekerja lebih baik lagi, dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi program-program yang ada di Kemdiktisaintek kepada masyarakat secara umum, dan secara luas pada sektor pendidikan tinggi. Kami akan sampaikan kepada

kawan-kawan di lingkup Kemdiktisaintek untuk terus meningkatkan fungsi humas agar lebih baik,” ujar Kabiro Zubayr.

Kepala Biro Zubayr—yang juga peraih TOP GPR Leader Award tahun 2025—menekankan bahwa penghargaan diberikan atas kepemimpinan dan kontribusi dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik pemerintah yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepercayaan publik. Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya Kemdiktisaintek dalam mengelola komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

“Kami jalankan GPR dengan benar: bukan propaganda, tapi dialog yang membangun kepercayaan. Ini kunci konsistensi kami,” ujar Kabiro Zubayr.

Kabiro Zubayr menambahkan bahwa Kemdiktisaintek akan bekerja lebih keras lagi dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi program-program yang ada kepada masyarakat secara umum secara luas pada sektor pendidikan tinggi. “Kami akan sampaikan kepada kawan-kawan di lingkup Kemdiktisaintek untuk terus meningkatkan fungsi humas agar lebih baik,” katanya. ■



Mohammad Averrouce Masuk TOP GPR Leader 2025, Inovasi Komunikasi Publik Bawa PANRB ke Puncak Nasional



■ Plt. Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB, Mohammad Averrouce, menerima penghargaan TOP GPR LEADER 2025

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Mohammad Averrouce, berhasil mencatatkan namanya dalam daftar TOP 50 GPR Leader 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh Government Public Relations (GPR) Institute sebagai pengakuan atas kepemimpinannya dalam mengelola komunikasi publik secara inovatif, sehingga membawa kinerja humas PANRB masuk ke dalam tiga besar nasional. Averrouce, yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, dinilai sukses dalam menerapkan strategi komunikasi yang segar dan berbasis

digital, yang tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Penghargaan TOP 50 GPR Leader 2025 merupakan bagian dari ajang 5th Top GPR Award 2025 yang digelar pada 4 November 2025 di Jakarta. Acara ini menyoroti peran strategis GPR dalam era disrupsi digital, dengan tema “Digital Trust & Public Engagement”. GPR Institute menilai para pemimpin humas berdasarkan indeks TOP GPR, di mana Averrouce berhasil memposisikan PANRB sebagai salah satu dari tiga institusi terbaik dari 50 institusi pemerintah yang dievaluasi. Kriteria penilaian mencakup minimal 90% coverage media positif dan skor akhir minimal

70 poin, yang diukur melalui riset digital komprehensif.

Keberhasilan Averrouce tidak lepas dari inovasi yang diterapkannya dalam komunikasi publik PANRB. Dengan gaya komunikasi yang segar dan responsif, ia memanfaatkan platform digital seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk membangun interaksi dua arah dengan masyarakat. Pendekatan ini mencakup aspek Digital Awareness (bobot 20%), Digital Media & Website (bobot 50%), dan Social Media (bobot 30%), yang membuat PANRB unggul dalam membangun reputasi positif dan keterbukaan informasi. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas lembaga, tetapi juga mendorong kolaborasi antar-institusi, sehingga menjadi teladan bagi humas pemerintah lainnya.

Prestasi Mohammad Averrouce ini menjadi bukti komitmen PANRB dalam mereformasi birokrasi melalui komunikasi yang modern dan inklusif. Diharapkan, penghargaan ini akan memotivasi lebih banyak pemimpin humas untuk mengadopsi pendekatan serupa, memperkuat kolaborasi lintas lembaga, serta meningkatkan kepercayaan publik sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin solid di era digital yang dinamis dan kompleks. ■



Ariansyah, Kadis Kominfo Provinsi Jambi Raih TOP GPR Leader 2025

TOP GPR LEADER

Ariansyah, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Jambi, telah menjadi tokoh kunci di balik prestasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang dianugerahi penghargaan TOP GPR Leader Award 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Government Public Relations (GPR) Institute sebagai pengakuan atas keberhasilan Pemprov Jambi dalam mengelola komunikasi publik digital secara inovatif, transparan, dan efektif.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, Ariansyah memimpin tim humas yang berhasil membangun reputasi positif di ruang digital, menjadikan Jambi sebagai salah satu daerah teladan di Indonesia.

Penghargaan TOP GPR Leader Award 2025 merupakan bagian dari ajang 5th TOP GPR Award 2025, yang digelar di The Sultan Hotel & Residence Jakarta pada Selasa, 4 November 2025. Acara ini menyoroti peran strategis GPR dalam era disrupsi digital, dengan tema “Digital Trust & Public Engagement”. Penghargaan diserahkan oleh Arief Munajad, Direktur GPR Institute, dan disaksikan oleh Prof. Dr. Widodo Muktiyo sebagai Founder GPR Institute serta Tri Raharjo sebagai Co-Founder GPR Institute. Pemprov Jambi menjadi

satu-satunya provinsi yang meraih penghargaan ini, berdampingan dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Dikdasmen, serta beberapa bupati dan walikota.

Penilaian penghargaan ini didasar-



kan pada riset digital komprehensif yang dilakukan GPR Institute sejak Juli hingga September 2025. Tiga parameter utama yang digunakan meliputi Digital Awareness (visibilitas di ruang publik daring), Digital Media & Website (kualitas pemberitaan dan konten digital), serta Social Media (tingkat interaksi dengan masyarakat). Pemprov Jambi dinilai unggul karena

memiliki dominan pemberitaan positif (minimal 90%) dan skor akhir minimal 70 poin, yang mencerminkan komitmen dalam membangun kepercayaan digital dan keterbukaan informasi.

Ariansyah, yang mendampingi Wakil Gubernur Abdullah Sani saat menerima penghargaan, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergitas dengan media massa.

“Di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, Ariansyah memimpin tim humas yang berhasil membangun komunikasi publik Pemprov Jambi punya reputasi positif”

Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, membuktikan bahwa komunikasi publik yang modern dan responsif dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ariansyah, sebagai arsitek utama, diharapkan terus mendorong inovasi digital di Jambi, menuju pemerintahan yang lebih transparan, inovatif, kolaboratif, dan inklusif di masa depan. ■



Kadiskominfo Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal Sukses Raih Top GPR Leader 2025



■ Kadiskominfo Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal Raih Top GPR Leader 2025

Dengan kerja cerdas, kepemimpinan kolaboratif, dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, berhasil mengorkestrasi pola komunikasi publik yang efektif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Atas dedikasinya dalam memperkuat peran komunikasi pemerintahan, Faisal resmi dinobatkan sebagai Top GPR Leader 2025 dalam ajang nasional Government Public Relations (GPR) Institute.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya yang inspiratif, khususnya dalam membangun strategi komunikasi publik yang adaptif,

modern, dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Di tengah arus informasi yang deras dan tantangan disrupsi digital, strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai mampu menjaga kepercayaan publik, menghadirkan informasi yang kredibel, serta memperkuat citra pemerintah daerah sebagai institusi yang transparan dan responsif.

Dalam sambutannya, Faisal menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh tim yang telah bekerja keras selama ini.

“Terima kasih atas award ini dari GPR Institute. Mudah-mudahan bisa memicu kinerja kami lebih baik lagi ke depan, dan bisa

sesuai pula dengan harapan masyarakat Kaltim dan keinginan para pimpinan,” ujarnya.

Faisal juga menambahkan bahwa tantangan komunikasi pemerintahan semakin kompleks karena adanya perkembangan teknologi digital, pola komunikasi publik yang cepat, serta ekspektasi masyarakat yang meningkat. Karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat literasi digital, tata kelola komunikasi berbasis data, serta memaksimalkan media sosial dan kanal digital pemerintah agar informasi dapat diterima secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih dari sekadar capaian personal, penghargaan ini menjadi simbol kemajuan ekosistem komunikasi publik di Kalimantan Timur. Di masa depan, Pemprov Kaltim diharapkan dapat terus menjadi teladan bagi daerah lain dalam membangun digital trust, memperkuat engagement masyarakat, serta menghadirkan komunikasi publik yang membangun, edukatif, dan inklusif.

Keberhasilan Faisal menegaskan komunikasi publik bukan hanya fungsi teknis, tetapi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, modern, dan dipercaya rakyat. ■



TOP GPR Leader 2025

GPR Institute juga memberikan apresiasi kepada TOP 50 GPR Leader yang telah berhasil membawa kinerja PR instansi menjadi salah satu dari 50 instansi pemerintahan yang berhasil menduduki peringkat teratas berdasarkan hasil penilaian TOP GPR Index.

List TOP GPR Leader 2025:

KEMENTERIAN:

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Kementerian Pariwisata
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia

LEMBAGA NON KEMENTERIAN

- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TNI/POLRI

- TNI
- POLRI

LEMBAGA NEGARA

- Mahkamah Agung
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan

KOMISI NEGARA

- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- Komisi Pemberantasan Korupsi

PEMERINTAH PROVINSI

- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Sumatera Utara
- Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Jawa Timur
- Kalimantan Timur
- Bali
- Sulawesi Selatan
- Sumatera Barat
- Jambi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kabupaten Gresik
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Bogor
- Kota Palembang
- Kabupaten Semarang
- Kota Bekasi
- Kota Cimahi
- Kabupaten Tangerang
- Kota Batu
- Kota Magelang
- Kota Balikpapan
- Kota Malang
- Kota Blitar
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Kendal
- Kabupaten Madiun
- Kota Bogor
- Kota Samarinda
- Kabupaten Bandung

ASTACITA

UPAYA JAGA MARWAH BANGSA



- **Kepuasan Publik Naik Berkat Dua Orang Dekat**
- **Penguatan Narasi Nasionalisme, Kedaulatan & Ketahanan Pangan**
- **Peran Media Sosial dalam GPR Pedesaan**



www.gprinstitute.id

Komunikasi yang Transparan, Kunci Bangun Kepercayaan Rakyat

Di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang penuh tantangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun keduanya dengan momentum yang kuat. Gaya kepemimpinan Prabowo Subianto sering digambarkan sebagai perpaduan unik antara disiplin militer dan kebijaksanaan politik yang matang.

Di balik ketegasan itu, Prabowo menunjukkan sisi konsultatif yang orisinal: ia sering berkonsultasi dengan pendahulunya, seperti Presiden Joko Widodo, untuk memastikan kesinambungan kebijakan, sambil mempertahankan loyalitas terhadap tim intinya.

Citra “kakek gemoy” yang viral saat kampanye Pilpres 2024 telah berevolusi menjadi sosok pemimpin berwibawa yang menjaga Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama. Survei nasional dari Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik mencapai 81%, didorong

oleh persepsi kepemimpinan yang stabil dan pro-rakyat.

Bagi humas pemerintahan, gaya ini mengajarkan pelajaran berharga: komunikasi yang transparan dan cepat tanggap bukan hanya alat propaganda, melainkan pondasi untuk membangun kepercayaan jangka panjang.

Kebijakan publik Prabowo berpusat pada visi Indonesia Emas 2045, dengan enam prioritas Astacita yang menjadi blueprint Kabinet Merah

Putih:

swasembada pangan, energi, lapangan kerja berkualitas, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan SDM. Pro-

gram MBG, meski menuai kontroversi awal terkait distribusi, telah mendistribusikan manfaat ke 82,9 juta penerima pada 2025, dengan anggaran melonjak dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun—sebuah komitmen tegas untuk mengatasi stunting dan mendorong daya beli masyarakat.

Di sektor ekonomi, surplus neraca perdagangan berturut-turut 64 bulan hingga Agustus 2025 mencapai USD5,49 miliar, didukung perjanjian CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada, serta deregulasi melalui PP No. 28/2025.

Prabowo juga berani Reformasi birokrasi tak kalah krusial: pemutihan utang petani kecil, pengendalian pinjaman bunga tinggi, dan peningkatan kontribusi perdamaian PBB.

Survei Poltracking Indonesia Oktober 2025 menunjukkan kepuasan publik sebesar 78,1%, dengan alasan utama seperti pencegahan korupsi dan bantuan tepat sasaran. Ini menjadi pengingat bagi humas: kebijakan bukan sekadar dokumen, tapi cerita yang harus dikomunikasikan dengan empati untuk menjembatani gap antara pemerintah dan rakyat. ■

■ Survei IPO, dan berbagai sumber, Dok. Istimewa

■ Presiden RI Prabowo Subianto (Dok. Istimewa)



Tingkat Kepuasan Publik Presiden Prabowo Naik Berkas Dua Orang Dekat

Presiden Prabowo Subianto dinilai tepat menunjuk Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretariat Negara. Keduanya dianggap ikut mendorong kenaikan tingkat kepuasan publik selama satu tahun pemerintahan berjalan. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik mencapai 77,7% sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2025.

Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut sejumlah program mengalami perbaikan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah isu keracunan, serta efektivitas bansos pangan dan BLT. Tingkat kepuasan tertinggi berasal dari sektor keamanan (83,9%), disusul

ekonomi (73,5%) dan penegakan hukum (70,1%). Kinerja politik mencatat 67,8%, sementara pemberantasan korupsi 65,2%.

Burhanuddin menilai Teddy berperan penting dalam komunikasi publik karena berada dekat dengan Prabowo dan mengikuti aktivitas presiden setiap

hari. Ia kini dipercaya menyampaikan kebijakan strategis bersama Prasetyo Hadi. Keduanya disebut aktif berkoordinasi dengan para

menteri sesuai arahan Presiden. Program prioritas ikut mendongkrak citra pemerintah. MBG memiliki awareness tertinggi (94%) dengan kepuasan 55,7%, sementara Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis mencatat kepuasan tertinggi (87%). Program Kopdes Merah Putih memiliki awareness 45,2%, sedangkan Program Sekolah Rakyat 32,5% namun dengan kepuasan tinggi (75,5%).

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menyebut beberapa figur memiliki hubungan komunikasi efektif dengan Presiden, termasuk Teddy, Prasetyo, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Angga Raka Prabowo. Menurutnya, strategi ini mempermudah tata kelola pemerintahan sambil menjaga stabilitas politik.

Hensa menilai gaya komunikasi Prabowo yang tegas, namun dibarengi pendekatan persuasif, menjadi faktor penting meningkatnya kepercayaan publik. Ketegasan dinilai efektif selama tetap dibarengi narasi yang merangkul, agar tidak menciptakan jarak dengan kelompok politik lain. ■



■ Presiden RI Prabowo Subianto (Dok. Istimewa)

■ Dari Berbagai Sumber

Puaskah Publik Pada Kinerja Presiden Prabowo?

Survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 20–27 Oktober 2025 menunjukkan gambaran yang tegas: kepercayaan masyarakat berada pada titik yang menjanjikan, dan pemerintah berada dalam momentum positif untuk melanjutkan agenda transformasinya.

Sebanyak 77,7 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka ini bukan hanya statistik; ini adalah pesan kuat bahwa masyarakat merasakan dampak dari berbagai program yang mulai berjalan.

Sentimen positif ini didorong oleh kesan publik terhadap kepemimpinan Presiden yang dinilai tegas, berwibawa, sekaligus fokus pada solusi. Setelah satu tahun, masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak sekadar bekerja—tetapi bergerak cepat dan terukur.

Pada masa awal pemerintahan, serangkaian program dirancang untuk langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Dan hasilnya terlihat jelas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dikenal oleh 94 persen masyarakat. Tidak banyak program pemerintah yang mendapatkan tingkat pengenalan setinggi ini dalam waktu singkat. Sebanyak 61 persen publik bahkan secara tegas mendukung agar pro-



Presiden RI Prabowo Subianto (Dok. Istimewa)

gram ini dilanjutkan. Mengapa dukungan publik begitu kuat? Karena program ini terasa langsung manfaatnya—membantu keluarga, mengurangi beban biaya harian, dan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang layak.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) juga memperlihatkan efek signifikan. Walaupun baru dikenal oleh sebagian masyarakat, mereka yang mengetahuinya menunjukkan tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah. Artinya, semakin banyak publik yang terpapar informasi mengenai kinerja pemerintah, semakin besar pula dukungannya.

Tentu, masyarakat tidak menutup mata terhadap persoalan yang masih perlu

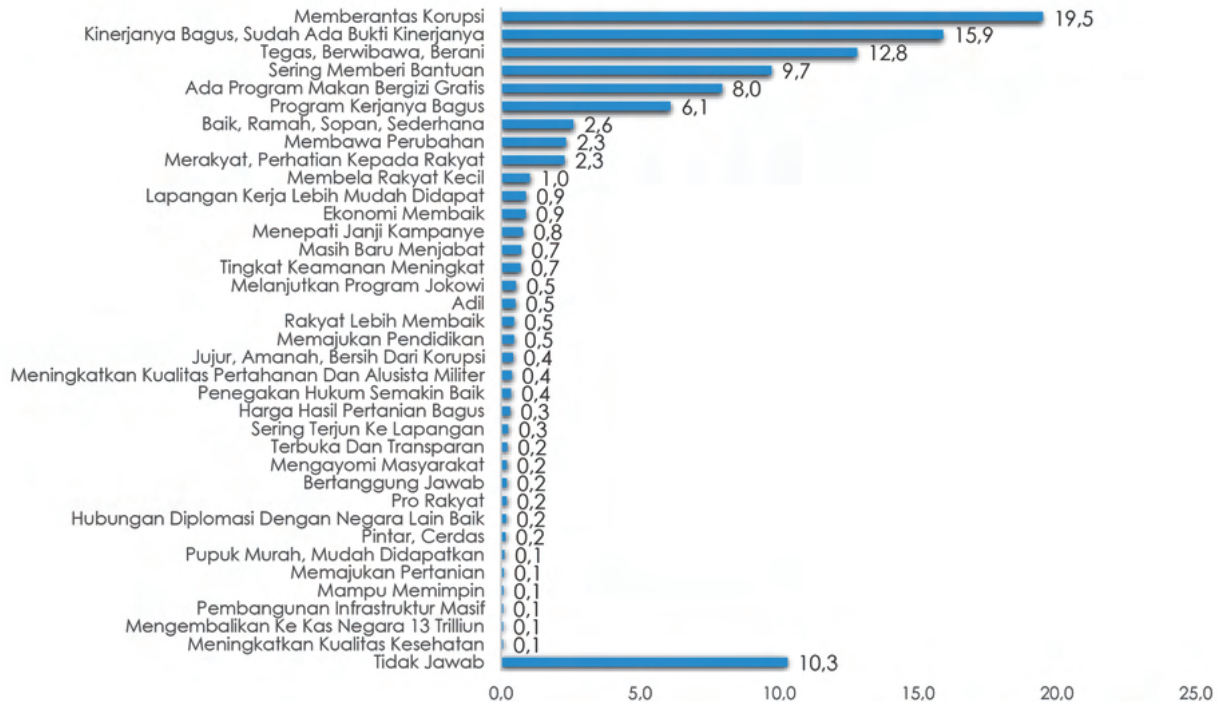
diperbaiki. Harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi tetap menjadi kekhawatiran utama. Namun menariknya, bahkan di tengah kekhawatiran itu, mayoritas publik tetap menunjukkan tingkat kepercayaan yang solid terhadap kemampuan pemerintah. Dengan kata lain, publik tahu tantangan ada, tetapi mereka percaya pemerintah berada pada jalur yang benar.

Beberapa sektor dianggap sudah menunjukkan capaian positif, seperti ketersediaan sembako, persatuan bangsa, pembangunan infrastruktur, serta penegakan hukum. Pada saat yang sama, harapan publik agar pemerintah mempercepat perbaikan ekonomi menjadi dorongan moral tambahan bagi pemerintahan untuk bekerja lebih efektif. ■

**Berikut adalah kepuasan dan ketidakpuasan
Pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan Survei Indikator Politik
Pimpinan Prof. Burhanuddin Muhtadi**

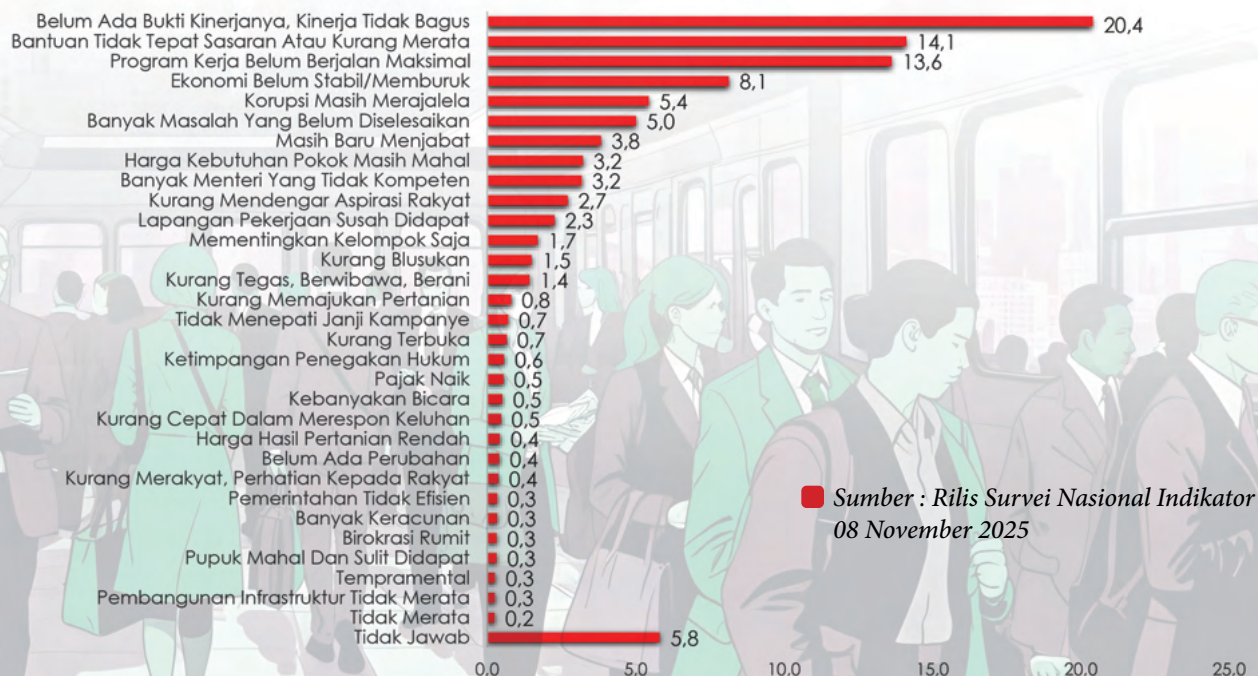
ALASAN PUAS DENGAN KINERJA PRABOWO

[Base: Merasa Puas dengan Kinerja Prabowo]



ALASAN TIDAK PUAS DENGAN KINERJA PRABOWO

[Base: Merasa Tidak Puas dengan Kinerja Prabowo]



**Sumber : Rilis Survei Nasional Indikator
08 November 2025**

Letkol Teddy, Dari Ajudan Militer Presiden Prabowo Menjadi Jubir Istana

Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tidak hanya bertugas sebagai administratif sekarang, tetapi dia sebagai penghubung Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran kabinet Merah Putih.

Dia kerap memanggil para menteri dan pejabat negara setingkat menteri untuk rapat bersama presiden tersebut.

Bahkan, Teddy selalu mendampingi semua kegiatan Presiden Prabowo di dalam dan luar negeri. Kini dia juga melakukan k a n k o - mu - ni - ka - si

publik dari kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk presiden sebagai juru bicara (jubir) istana.

“Teddy Indra Wijaya bukan hanya pejabat, tapi jembatan yang menyatukan Presiden dan rakyat. Ia menjaga agar visi besar Presiden tersampaikan dengan bahasa yang jelas dan penuh semangat kebangsaan,” kata Ketua DPP Arus Bawah Prabowo, Supriyanto.

Setiap kebijakan strategis pemerintah juga dikoordinasikan Teddy Indra Wijaya dengan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).

Langkah ini juga telah diterjemahkan ke narasi digital secara positif dan faktual, sehingga publik bisa memahami konteks dan tujuan kebijakan secara utuh.

Dengan begitu Teddy mendorong berbagai pesan disampaikan ke publik dengan pendekatan

adaptif, cepat, transparan, dan diakses masyarakat secara mudah.

“Pendekatan ini terbukti efektif meredam potensi kesalahpahaman dan menjaga stabilitas opini publik terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Tenaga Ahli BKP RI, David Herson menambahkan Teddy dinilai sebagai simbol aparatur generasi baru yang cerdas dan mampu bekerja mengikuti irama Presiden Prabowo dengan baik.

“Beliau sosok yang tepat dan teruji dan relevan dengan era komunikasi digital. Ia tahu bagaimana menjaga kredibilitas pemerintahan melalui komunikasi yang cerdas, cepat, dan berwibawa,” tutur David.

Teddy dinilai faham bahwa kepercayaan adalah pilar utama komunikasi publik, sehingga dia menyampaikan pesan Presiden Prabowo dengan bobot dan arah yang benar. Jadi, komunikasi dilakukan menjadi lebih terukur dan sistematis.

“Setiap isu disiapkan dengan basis data, setiap pernyataan diatur dalam satu garis pesan strategis, dan setiap respons publik dilakukan dengan ketepatan waktu tinggi,” ujarnya.

Keberadaan Teddy memperkuat citra



Letkol. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet Merah Putih (Dok. Istimewa)

pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang lugas, transparan, dan responsif terhadap rakyatnya. Dia melakukan komunikasi publik dengan tenang, sistematis, penuh dedikasi, dan mampu membaca situasi.

“Komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tapi soal memahami waktu, konteks, dan niat baik. Itulah yang saya pelajari dari Presiden,”

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengakui Teddy sebagai tokoh kunci akselerasi pemerintahan. Dia menjadi poros utama koordinasi internal pemerintahan.

“Jabatan sekretaris kabinet ini jabatan yang melekat selalu kepada Presiden dengan semua menterinya tentu melalui sekretaris kabinet. Beda dengan sekretaris negara. Kalau sekretaris negara bicara tentang SK (surat keputusan) dan lain-lain sebagainya,” tuturnya.

Pencapaian ini dibuktikan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintahan mencapai 72% yang dilakukan Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada

September 2025 atau naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai sebesar 61%. Kenaikan ini dianggap berkat kerja Teddy mendukung Pemerintahan Prabowo dengan menyampaikan pesan supaya bisa dipahami publik dengan menjaga keseimbangan politik.

“Komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tapi soal memahami waktu, konteks, dan niat baik. Itulah yang saya pelajari dari Presiden,” kata Teddy.

Sementara itu Analisis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensa) sependapat posisi Seskab Teddy dinilai strategis sebagai penyaring utama aktivitas presiden. Dia melekat dengan presiden, sehingga presiden bisa fokus mengambil keputusan.

“Komunikasi istana di bawah koordinasi Teddy memperlihatkan disiplin, cepat, dan konsistensi. Namun, kredibilitas dan kepercayaan publik dapat tumbuh berkelanjutan perlu diimbangi dengan transparansi, partisipasi publik, dan komunikasi dua arah,” tuturnya.

Teddy berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dilahirkan pada 14 April 1989 di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) yang merupakan salah satu putra dari pasangan Kolonel Inf. (Purn) Giyono dan Letkol Caj (K) Patris R.A. Rumbayan.

Dia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara yang melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

Kemudian, dirinya mengikuti berbagai pelatihan militer spesialis di Kopassus,

sekolah intelijen di Australia, US Army Infantry School, Airborne School, Air Assault School, dan Ranger School.

Teddy meneruskan pendidikan di US Army Infantry School yang lulus pada 2019 dengan predikat International Honor Graduate.

Dia juga memperoleh gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional (Prodi HI) dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) pada 2012 dan gelar S2 Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia (UI) pada 2021.

Sebelumnya, Teddy sempat menjabat sebagai anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang berlanjut meraih pangkat Letnan Satu (Lettu) dan terpilih menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo untuk periode 2014-2019.

Dia menduduki Komandan Tim 1 dan 2 di Batalyon Kopassus dan menjalani pendidikan di Amerika Serikat (AS) pada 2020. Lalu, bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada 2020-2024.

Teddy pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadan Yonif) 328 Dirgahayu Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Linud 17/Kujang I Divisi Infanteri 1/Kostrad.

Terakhir, dia pernah ditunjuk sebagai Wakil Menteri (Wamen) Seskab Kabinet Merah Putih yang belakangan hanya menjadi Seskab dalam kabinet yang sama. ■

■ Diolah dari berbagai sumber

Gaya Komunikasi Menteri Purbaya Terbuka, Bangun Perubahan Ekonomi dan Kepercayaan Rakyat

Di tengah tuntutan transparansi di era digital, Purbaya Yudhi Sadewa hadir sebagai figur yang berbeda dalam lanskap komunikasi pemerintahan. Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, mantan Ketua OJK ini menarik perhatian publik lewat gaya komunikasi yang lugas, blak-blakan, dan berbasis data.

Dikutip dari reuters.com, pendekatannya jauh dari gaya diplomatis yang terukur dan penuh kehati-hatian. Publik kemudian mengenal istilah “Purbaya Effect”, yakni dampak dari komunikasi yang langsung pada inti persoalan, tanpa retorika panjang. Ia membuka diskusi publik mengenai isu strategis seperti reformasi pajak, defisit fiskal, disiplin belanja negara, hingga pen-

indakan pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang merugikan rakyat.

Saat memimpin OJK, Purbaya terkenal tegas mengkritik industri keuangan bermasalah. Sikap itu berlanjut di kementerian. Ia menegur kepala daerah yang menumpuk APBD di bank tanpa realisasi, dan mengingatkan pengusaha yang hanya mengejar keuntungan tanpa kontribusi negara. Kritiknya keras namun argumentatif dan berbasis data.

Tidak semua pihak sepakat dengan gaya komunikasinya. Pernyataannya pasca pelantikan yang menyebut aksi demonstrasi sebagai “suara sebagian kecil rakyat” sempat memicu reaksi publik. Sebagian analis menyebutnya kurang empatik. Namun Purbaya menanggapinya tenang: “Blak-blakan bikin publik percaya. Kalau pemerintah diam, rakyat

berpikir kita tidak tahu masalahnya.”

Pernyataan itu mencerminkan filosofi Government Public Relations (GPR) modern: komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi instrumen transparansi untuk membangun kepercayaan rakyat. Gaya komunikasi ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pejabat berbicara berdasarkan data, bukan sekadar formalitas politik.

Meski menuai kontroversi, pendekatannya terbukti efektif. Survei LPS Oktober 2025 menunjukkan stabilitas persepsi publik, dengan IHSG tetap di atas 7.000 poin—indikasi pasar merespons keterbukaan itu secara positif.

Dalam konteks GPR era baru, Purbaya Effect membuktikan bahwa kejujuran, kecepatan respons, dan keberanian menyampaikan fakta dapat menjadi modal penting membangun kepercayaan publik. Gaya komunikasinya mungkin keras, tetapi bagi banyak rakyat, ia terasa jujur—dan itu relevan dengan karakter komunikasi publik masa kini. ■

■ *Diolah Dari Berbagai Sumber*



■ Ir. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc., Ph.D.,
Menteri Keuangan RI (Dok. Istimewa)

Transparansi Komunikasi dan Partisipasi Publik, Dua Arus Utama Arah Kebijakan Era Presiden Prabowo

Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi publik menjadi salah satu pilar penting demi memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa arah komunikasi pemerintah kini berfokus pada aksesibilitas informasi, keterbukaan, serta partisipasi warga. “Kami ingin setiap kebijakan dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sesuai rilis infopublik.id, strategi komunikasi publik ini dijalankan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, memaksimalkan penggunaan media digital dan media sosial sebagai kanal komunikasi negara yang efektif dan cepat. Kedua, mengembangkan platform informasi yang lebih interaktif dan ramah pengguna, seperti aplikasi layanan publik serta website pemerintah yang terintegrasi. Ketiga, mendorong partisipasi publik melalui ruang diskusi, forum kebijakan, maupun konsultasi publik baik secara luring maupun daring.

Teknologi digital memiliki peran besar

dalam memperkuat komunikasi pemerintah. Melalui pemanfaatan big data dan analitik, pemerintah dapat membaca kebutuhan masyarakat, merespon isu prioritas, serta menyesuaikan pesan komunikasi dengan karakter audiens. Dengan teknologi, informasi dapat disampaikan secara real-time dan terjangkau wilayah yang lebih luas.



Hj. Meutya Viada Hafid, B. Eng., M.IP
Menteri Komunikasi dan Digital
(Dok. Istimewa)

Salah satu tantangan besar di era digital adalah maraknya hoaks dan disinformasi. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan platform digital, media massa, serta organisasi masyarakat sipil untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan penanganan konten palsu. Kampanye literasi digital juga terus digencarkan agar masyarakat semakin kritis terhadap informasi yang diterima.

Meutya Hafid juga menegaskan bahwa media massa tetap memegang peran strategis sebagai mitra negara. Pelatihan dan workshop bagi jurnalis dilakukan agar penyampaian informasi semakin akurat dan bertanggung jawab.

Ke depan, pemerintah berharap komunikasi publik dapat semakin terbuka dan partisipatif. “Kami ingin masyarakat merasa dilibatkan dan yakin bahwa suaranya didengar,” kata Meutya. Dengan teknologi, data, dan strategi komunikasi yang tepat, pemerintah optimistis dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan rakyat. ■

■ Diolah Dari Berbagai Sumber

Pentingnya GPR di Daerah, Jembatan Sinergi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Di tengah tuntutan pemerintahan modern yang berorientasi pada visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi kompas utama bagi seluruh birokrasi. Delapan misi strategis tersebut—mulai dari penguatan ideologi Pancasila, swasembada pangan dan energi, hingga peningkatan kualitas SDM melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat—memerlukan implementasi yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Namun tantangan terbesar bukan hanya menjalankan kebijakan, tetapi memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan jelas, mudah dipahami, dan diterima masyarakat. Pada titik inilah peran Government Public Relations (GPR) di daerah menjadi sangat vital.

GPR daerah bukan sekadar penyampai informasi, melainkan instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik, menjembatani komunikasi dua arah, dan memastikan program nasional relevan dengan kebutuhan lokal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi. Menurutnya, program

daerah harus berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat agar hasilnya dapat dirasakan secara nasional.

“Kita tahu bahwa Presiden Prabowo sangat fokus pada ekonomi kerakyatan. Kolaborasi antara pusat dan daerah melalui komunikasi publik yang efektif dapat membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Itu hanya terjadi jika keduanya bergerak bersama,” tegas Tito. Ia juga menyampaikan bahwa kepala daerah wajib mendukung Program Strategis Nasional seperti MBG, bu-

sekadar formalitas, melainkan komitmen moral kepada rakyat.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2025 disebut Tito sebagai momentum penting untuk harmonisasi. Di sana, peran GPR adalah menyosialisasikan arahan Presiden, melawan disinformasi, dan melibatkan publik agar kebijakan tidak sekadar menjadi instruksi, tetapi partisipasi bersama. GPR daerah juga dituntut adaptif: memanfaatkan media digital, memperkuat kapasitas humas pemerintah, dan menggandeng tokoh lokal untuk memperluas trust ecosystem.

Akhirnya, GPR daerah adalah investasi jangka panjang bagi keberhasilan Asta Cita. Tito menutup dengan pesan tegas: “Paradigma Presiden Prabowo berbeda dengan ekonomi liberal kapitalis—yang kuat makin kuat, yang lemah makin tertinggal. Pemerintahan ini hadir untuk rakyat.” ■



Jenderal Polisi (Purn.)
Prof. Drs. H. Muhammad Tito
Karnavian, M.A., Ph.D.
Menteri Dalam Negeri (Dok. Istimewa)

Diolah Dari Berbagai Sumber

Gaya dan Komunikasi Publik Presiden Kian Moncer Dibawah Kendali BKP Pimpinan Angga Raka Prabowo

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada perbaikan komunikasi publik. Hal itu diwujudkan melalui penguatan Badan Komunikasi Presiden (BKP) yang kini dipimpin Angga Raka Prabowo, sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Di bawah kepemimpinannya, BKP bertransformasi menjadi institusi komunikasi yang lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan ekosistem digital.

Prabowo dikenal dengan gaya bicara yang tegas, lugas, tetapi mudah dipahami rakyat. Bahasa yang digunakan dekat dengan keseharian masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah tidak terasa jauh atau abstrak. Tujuannya jelas: komunikasi publik harus membangun kepercayaan, bukan hanya menyampaikan informasi.

BKP kini menerapkan strategi multipplatform,

tidak hanya mengandalkan media tradisional seperti televisi dan radio, tetapi juga memaksimalkan media digital, media sosial, dan format konten visual. Pendekatan ini membuat pesan pemerintah menjangkau audiens yang beragam, mulai dari masyarakat umum hingga generasi digital.

Media sosial menjadi kanal penting dalam komunikasi kepresidenan. Dengan dukungan BKP, akun

resmi Presiden Prabowo menjadi salah satu sumber informasi publik yang cepat, akurat, dan dapat diverifikasi. Kontennya tidak hanya informatif, tetapi juga humanis dan mampu membangun

bangun kedekatan emosional dengan rakyat.

Prinsip transparansi menjadi fondasi utama. BKP rutin menyelenggarakan konferensi pers, penyampaian klarifikasi isu, serta siaran langsung agenda pemerintahan. BKP juga menjalin kerja sama dengan media, jurnalis, dan influencer agar informasi pemerintah dapat disampaikan dengan akurat dan bertanggung jawab.

Sebagai Wamenkomdigi, Angga Raka Prabowo mengintegrasikan kebijakan komunikasi dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Akses internet diperluas hingga daerah terpencil, sehingga informasi pemerintah dapat diterima lebih merata dan partisipasi publik semakin meningkat. Transformasi yang dijalankan BKP menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan hanya instrumen penyampaian pesan, tetapi fondasi membangun legitimasi dan kedekatan pemerintah dengan rakyat. Dengan strategi ini, era Prabowo menghadirkan model komunikasi pemerintahan yang lebih terbuka, modern, dan dipercaya publik. ■

■ Diolah Dari Berbagai Sumber



■ Angga Raka Prabowo, S.Sos
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital,
Kepala Kantor Komunikasi Presiden
(Dok. Istimewa)

Komunikasi Prabowo Lugas, Personal dan Berani, Akankah Ini Jadi Standar Baru?

Komunikasi pemerintahan bukan hanya saluran penyampaian kebijakan, tetapi fondasi yang menghubungkan negara dengan rakyatnya. Melalui komunikasi yang terencana, pemerintah dapat membangun persepsi publik, memperkuat kepercayaan, dan menjaga legitimasi politik. Di era modern, komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi, melainkan bagian inti dari tata kelola negara agar kebijakan tidak hanya diumumkan, tetapi dipahami, diterima, dan didukung masyarakat.

Ekosistem komunikasi pemerintah mencakup berbagai institusi: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kantor Staf Presiden (KSP), hingga jaringan humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Semua unsur ini bekerja menyusun narasi nasional, mengelola informasi, dan memastikan pesan pemerintah sampai secara benar kepada publik.

Namun komunikasi pemerintahan tidak hidup dalam ruang steril. Ia dipengaruhi dinamika politik daerah, budaya digital, sensitivitas isu publik, serta tekanan warganet yang sangat respon-

sif. Media sosial membuat komunikasi berubah dari pola satu arah menjadi dialog terbuka yang cepat, interaktif, dan sering kali penuh kritik. Selain itu, tuntutan keterbukaan informasi publik menuntut pemerintah lebih transparan dan akuntabel—tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan, menjawab, dan menjelaskan.

Di tengah ekosistem digital, setiap tindakan pemerintah—bahkan diam sekalipun—ditafsirkan sebagai pesan. Publik menilai pilihan kata pejabat, waktu penyampaian, kecepatan merespons isu, serta konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Prinsip klasik komunikasi bahwa “kita tidak dapat tidak berkomunikasi” kini menjadi semakin relevan. Masyarakat tidak lagi

hanya menerima pesan, tetapi memverifikasi, membandingkan, mendiskusikan, bahkan mengoreksinya secara terbuka.

Karena itu, komunikasi pemerintahan bukan sekadar apa yang disampaikan, melainkan bagaimana, kapan, dan melalui saluran apa pesan tersebut dikomunikasikan. Pemerintah yang mampu berkomunikasi dengan jelas, sederhana, dan empatik akan lebih mudah mendapatkan legitimasi dan dukungan publik.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari program dan regulasi, tetapi dari kemampuannya membangun koneksi emosional serta rasa percaya dengan warganya. Pemerintah yang hadir melalui komunikasi yang transparan, responsif, dan manusiawi adalah pemerintah yang dipercaya—dan kepercayaan itu adalah modal sosial yang menentukan keberhasilan tata kelola yang stabil, inklusif, dan berkeadaban. ■



■ Muhammad Sufyan Abd
Dosen Digital PR Telkom University
(Dok. Pribadi)

Gaya Komunikasi Prabowo Keren, Ini Panduan Pejabat Publik dan Humas Pemerintah Laksanakan GPR di Daerah

Helmy Yahya, MPAcc, Akt., CPMA, CA
Ketua Asosiasi Konten Creator Indonesia

Komunikator publik ternama Indonesia, Helmy Yahya, kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Majalah GPR, Helmy menyebut bahwa style Presiden Prabowo dalam berbicara di depan publik terasa “keren” dan autentik, terutama setelah pidato perdana beliau di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

Menurut Helmy, pidato tersebut tidak hanya memperkuat citra Indonesia di panggung global, tapi juga menunjukkan bagaimana Prabowo mampu menyampaikan pesan kompleks dengan cara yang sederhana, tegas, dan penuh karisma.

Helmy Yahya, yang dikenal sebagai pengamat media dan komunikasi dengan pengalaman puluhan tahun di industri hiburan dan politik, jarang sekali memberikan pujian sebegitu terbuka. Namun, kali ini ia tak ragu memuji Prabowo sebagai figur yang “punya vibe komunikasi. “Prabowo itu keren, bro. Dia bicara nggak kaku, nggak sok bijak.

Langsung ke inti, tapi tetap ada emosi yang bikin orang tersentuh. Apalagi pas pidato di PBB kemarin, itu level dunia banget,” ujar Helmy. Pujian Helmy Yahya bukan sekadar sanjungan pribadi, tapi pengakuan atas evolusi komunikasi kepemimpinan Indonesia.

Di tengah era digital yang penuh distraksi, style Prabowo – yang disebut Helmy sebagai “keren dan timeless” – menjadi blueprint bagi pemimpin masa depan. “Belajar dari Prabowo, bicara dari hati, tapi pakai data. Apalagi setelah PBB, dia buktiin Indonesia bisa jadi voice of reason di dunia yang chaos ini,” ujar Helmy. Di tengah derasnya perubahan perilaku konsumsi media, Helmy Yahya

menegaskan satu hal penting: komunikasi pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru publik, terutama generasi muda.

Mantan Direktur Utama TVRI yang kini memimpin Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia itu melihat bahwa problem terbesar komunikasi pemerintah hari ini bukan

pada kurangnya program, tetapi lemahnya diseminasi. “Banyak rakyat tidak tahu keberhasilan pembangunannya karena pesannya tidak sampai,” ujarnya. Menurut Helmy, meski Indonesia memiliki jaringan humas pemerin



(Dok. Istimewa)

tah hingga tingkat daerah, masih terdapat kesenjangan besar antara pesan pemerintah dan media yang benar-benar dikonsumsi masyarakat. Suara anak muda, misalnya, kini lebih banyak hidup di media sosial, bukan di TVRI, radio, ataupun koran.

Helmy menyebut perubahan lanskap media sebagai penyebab utamanya. Generasi Z tidak lagi menonton TV atau mendengarkan radio, mereka berkomunikasi di TikTok, Instagram, dan platform audiovisual lain. Karena itulah ia memilih terjun memimpin komunitas kreator konten: kelompok yang kini banyak membentuk opini publik. “Jika ingin menjangkau Gen Z, gunakan media yang mereka pakai. Menaruh pesan di koran itu percuma, karena mereka tidak membacanya,” katanya.

Helmy juga menilai sebagian birokrat belum memahami prinsip dasar komunikasi modern. Banyak pejabat merasa tampil di televisi sudah cukup, padahal tidak semua program memiliki jangkauan luas. Di sisi lain, masih ada daerah yang hanya dapat menangkap siaran TVRI dan RRI, sehingga kedua lembaga tersebut perlu terus diperkuat. Pemerintah, menurutnya, harus memahami peta media secara menyeluruh, siapa audiensnya, apa platformnya, dan bagaimana pesan harus dikemas.

Ia menegaskan bahwa bukan hanya platform yang perlu diperbaiki, tetapi juga kemampuan personal pejabat publik dalam berkomunikasi. “Pemimpin harus bisa berbicara dengan bahasa yang disukai rakyat. Kesalahan komunikasi bisa berujung kegaduhan,” jelasnya.

“Kita hidup di era audiovisual. Bahasa publik sekarang adalah video, bukan teks,”

Karena itu, Helmy menekankan empat kompetensi dasar komunikasi bagi pejabat, berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. “Jangan sampai pesan tertulis malah menimbulkan salah tafsir,” tambahnya.

Helmy mengingatkan bahwa tidak semua pejabat harus piawai berbicara di depan publik. Namun mereka wajib memiliki tim komunikasi yang mampu menerjemahkan capaian instansi ke dalam pesan yang jelas dan mudah dipahami. Ia mengutip contoh keberhasilan kementerian PUPR saat dipimpin Basuki Hadimuljono, yang mampu menyampaikan program secara efektif meski menterinya jarang tampil. “Yang penting komunikasinya berjalan,” ujarnya.

Dalam konteks tren media saat ini, Helmy menilai TikTok sebagai medium



(Dok. Istimewa)

komunikasi paling efektif di Indonesia. Dengan 195 juta pengguna, TikTok menjadi ruang viral bagi budaya lokal sekaligus jalur tercepat penyebaran informasi. “Kita hidup di era audiovisual. Bahasa publik sekarang adalah video, bukan teks,” katanya. Karena itu, ia meluncurkan Akademi AI untuk membantu masyarakat belajar membuat konten video yang efektif.

Pesannya untuk humas pemerintah tegas: gunakan bahasa audiens, gunakan media audiens, dan terus belajar mengikuti perubahan tren. Menurutnya, kesalahan terbesar adalah merasa cukup dengan cara-cara lama, sementara publik telah berpindah jauh ke platform baru. “Humas pemerintah harus update. Sampaikan pesan dengan media yang tepat, dengan bahasa yang dimengerti rakyat,” tutupnya. ■

Menjaga Keseimbangan Narasi, Fokus Pada Keberlanjutan dan Nir-Eskalasi

Silih Agung Wasesa
CEO ASIA Public Relation

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase komunikasi publik yang sangat kompleks. Beliau memimpin di tengah dua warisan politik yang kuat: struktur narasi PDIP yang sudah puluhan tahun mengakar, serta standar komunikasi era Jokowi yang begitu cepat, digital, dan sangat personal. Dalam posisi ini, komunikasi publik pemerintahan baru tidak dapat dibangun dengan gaya konfrontasi. Yang dibutuhkan adalah kecermatan berselancar di atas dinamika—mencari titik stabil, bukan menciptakan benturan baru.

Prabowo memilih pendekatan rekonsiliatif, bukan antagonistik; evolusioner, bukan revolusioner. Narasi yang muncul bukan “pemerintahan baru yang memutuskan masa lalu,” melainkan keberlanjutan dengan koreksi halus. Publik harus merasakan arah perubahan, tetapi negara tetap berada dalam jalur stabilitas. Dalam situasi di mana dua kekuatan lama masih memiliki pengaruh opini, gaya ini adalah kebutuhan, bukan pilihan.

Pada titik ini, komunikasi publik pemerintah berubah dari sekadar penyampaian informasi menjadi komunikasi presisi-politik: penuh kalkulasi, menjaga prediktabilitas, dan menghindari eska-

lasi. Keterbukaan informasi memang meningkat, terutama setelah lahirnya citizen journalism, platform digital, dan kemampuan AI dalam menciptakan konten dalam jumlah masif.

Namun keterbukaan hari ini memiliki arti berbeda: bukan hanya membuka data, tetapi mengatur cara, ritme, dan

framing agar tidak memicu gesekan politik.

Di tengah tuntutan publik akan kecepatan dan transparansi, GPR harus menjaga keseimbangan narasi: menghormati legacy pemerintahan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan identitas pemerintahan sekarang. Di era digital ini, infor-



(Dok. Istimewa)

masi tanpa manajemen waktu dapat berubah menjadi bumerang.

Landskap digital hari ini juga melahirkan fenomena baru: netizen julid, akun kecil tetapi berpengaruh dalam peer group, yang sering menjadi pintu masuk narasi oposisi atau framing destruktif berbasis bot dan buzzer politik. Karena itu, GPR tidak lagi bekerja dalam pola linier. Ia harus memiliki sistem deteksi dini terhadap percakapan publik, respons cepat dalam hitungan menit, serta kemampuan membaca arah amplifikasi digital sebelum isu membesar.

Selain itu, storytelling pemerintah harus berubah. Fokus bukan pada pencitraan kekuasaan, tetapi pada manfaat untuk rakyat. Narasi harus memberi ruang bagi publik untuk merasa sebagai bagian dari agenda, bukan sebagai penonton kebijakan negara. Dengan demikian, GPR menjadi instrumen stabilitas sosial, bukan sekadar alat promosi program pemerintahan.

Untuk menghadapi krisis komunikasi tanpa golden hour, dibutuhkan satu narasi tunggal pemerintahan—single narrative state—yang kokoh dan konsisten. Ketika fondasi narasi kuat, lawan politik sulit memecah opini publik. Narasi tidak lagi perlu dibalas dengan reaksi emosional, tetapi dengan data yang diolah menjadi pesan humanis dan relevan.

Data-driven communication menjadi penting, karena tanpa basis data, narasi mudah dituding sebagai pencitraan. Data memberi legitimasi, dan ketika diolah dengan empati, ia menjadi modal



(Dok. Istimewa)

membangun kepercayaan publik. Namun komunikasi berbasis data harus disertai kemampuan pre-emptive: tidak menunggu isu membesar, tetapi mengelola informasi sejak sebelum dipertanyakan.

Dengan ekosistem digital yang semakin canggih, pemerintah harus mampu membaca psikologi publik secara real-time—memprediksi perubahan sentimen, mengunci narasi sebelum diambil alih pihak lain, dan menjaga agar negara menjadi jangkar stabilitas. Komunikasi kini bukan sekadar alat, tetapi medan

strategis perebutan narasi. Harapannya, Indonesia memasuki fase komunikasi publik yang matang, tidak mudah digeser wacana politik sesaat atau pengaruh asing. Di sini, GPR bukan lagi sekadar corong pemerintah, tetapi penjaga stabilitas negara, sekaligus fasilitator rekonsiliasi politik. Maka tugas humas pemerintah hari ini bukan lagi menghindar dari gelombang, tetapi menguasai angin. Dengan data, ketenangan, kecerdasan naratif—dan empati. Karena komunikasi terbaik bukan yang paling keras, tetapi yang paling mampu menjahit kembali kepercayaan. ■

Komunikasi Publik Presiden Prabowo Mulai Berbuah Manis

“Di era Prabowo, komunikasi publik bergerak dari bahasa teknokratis menuju bahasa rakyat transparan, sederhana, dan lebih mudah dipercaya.”

Fawzi Rahman, S.H.

Direktur Eksekutif LSI Strategy

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membawa angin segar di sektor pangan dan pertanian, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan).

Berbagai survei terkini, termasuk dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Strategi menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Program MBG, yang mulai bergulir sejak Januari 2025, menjadi sorotan utama. MBG bukan hanya soal makanan gratis, tapi investasi jangka panjang untuk gizi anak dan stabilitas pangan nasional.

Kinerja sektor pangan Presiden Prabowo terlihat unggul, hal ini tak lepas dari

kinerja Kementan di bawah Andi Amran Sulaiman mencatat prestasi gemilang. “Ini bukti bahwa fokus pada cetak sawah baru, hilirisasi pangan, dan distribusi benih unggul mulai membuahkan hasil. Produksi beras naik 12 persen year-on-year, mengurangi impor hingga 30

persen,” kata Fawzi, merujuk data Kementan. Fawzi menekankan, “Amran jarang tampil di media, tapi kerjanya dirasakan petani dan konsumen. Survei kami tunjukkan 78 persen responden puas karena harga sembako stabil, meski ada fluktuasi musiman.”

Di sisi ekonomi, “Purbaya Effect” menjadi katalisator utama. Istilah ini merujuk pada kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa yang agresif, seperti penyaluran Rp200 triliun ke bank Himbara untuk likuiditas dan stimulus kredit, yang mendorong pertumbuhan kuartal IV 2025 diproyeksi 5,6-5,7 persen. Presiden Prabowo menargetkan 8

persen pada 2027-2028, yang disebut Purbaya sebagai “a good start” menuju negara maju. “Efek ini terlihat dari peningkatan daya beli dan investasi asing di sektor agribisnis, yang saling terkait dengan MBG dan Kementan,” jelas Fauzi Rahman.

Survei LSI Strategy menunjukkan pemerintahan Prabowo memiliki modal kuat di sektor pangan dan pertanian. Dengan Purbaya Effect, target swasembada pangan pada 2026 dinilai realistis—selama pemerintah tetap mendengar suara rakyat dan tidak anti kritik. Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi harapan bagi jutaan keluarga Indonesia. Program seperti MBG dan kebijakan pertanian kini menjadi fondasi ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Di era ketika publik makin cerdas dan jenuh dengan politik pencitraan, masyarakat menuntut bukti nyata, bukan sekadar narasi.

Terakhir, sebagai peneliti politik, saya melihat Purbaya Effect sebagai pelajaran bagi seluruh humas pemerintah: di era digital, komunikasi pro-rakyat bukan lagi strategi tambahan, melainkan kebutuhan utama untuk menjaga kepercayaan publik. ■



■ (Dok. Pribadi)

lewat rantai birokrasi 10 tingkat. Contoh: Video seorang ibu di Sumba Barat mengeluh jalan rusak, di-tag akun resmi Pemda selama 48 jam kemudian viral, lalu anggaran perbaikan langsung turun. Ini yang disebut “reverse dissemination”.

Keempat, alat Monitoring Cepat, grup-grup WhatsApp/Facebook desa (biasanya 200–500 anggota) jadi sumber intelijen humas yang murah dan cepat.

Humas yang cerdas cukup “lurking” di 10 grup besar per kecamatan, langsung tahu isu apa yang lagi panas sebelum jadi hoaks besar.

Dibalik itu semua, memang ada beberapa kendala, diantaranya sebanyak 58% kepala keluarga di desa 3T masih pakai HP jadul (2024, data Kominfo), artinya tidak bisa buka TikTok/Reels. Listrik hanya 6–12 jam/hari → charging jadi masalah. Orang tua (>45 tahun) jarang pegang HP, tetap butuh radio, pengeras suara, poster.

Strategi Medsos GPR Pedesaan yang Efektif (2025)

Beberapa langkah konkret yang bisa dijalankan untuk melakukan giat GPR pedesaan yang efektif dan efisien memerlukan beberapa strategi seperti. Konten “Dual Mode”: online + offline, semua video wajib ada versi lite (<5 MB) untuk disebar via shareit/Bluetooth.

Kemudian, manfaatkan “Digital Natives Desa”, dengan merekrut 3–5 anak muda per desa sebagai content creator lokal (dikasih kuota + honor kecil). Mereka lebih paham bahasa dan selera teman sebaya. Konsisten dengan jadwal



Posting “Ramah Desa” Upload konten jam 18.30–21.00 (saat listrik nyala dan orang pulang kerja). Gunakan Facebook, bukan Instagram/Twitter. Di pedesaan Indonesia 2025, Facebook masih raja (90% penetrasi di desa yang ada sinyal), disusul TikTok (60%), IG hanya 15%. Jangan lupa selalu Sertakan Call-to-Action Offline Contoh caption : “Info lengkap bansos ini tanyakan ke Pak Kades atau Bu Bidan Desa mulai besok pagi ya!”. Media sosial bukan pengganti,

tapi pelengkap GPR pedesaan. Dia adalah bensin, bukan mesinnya.

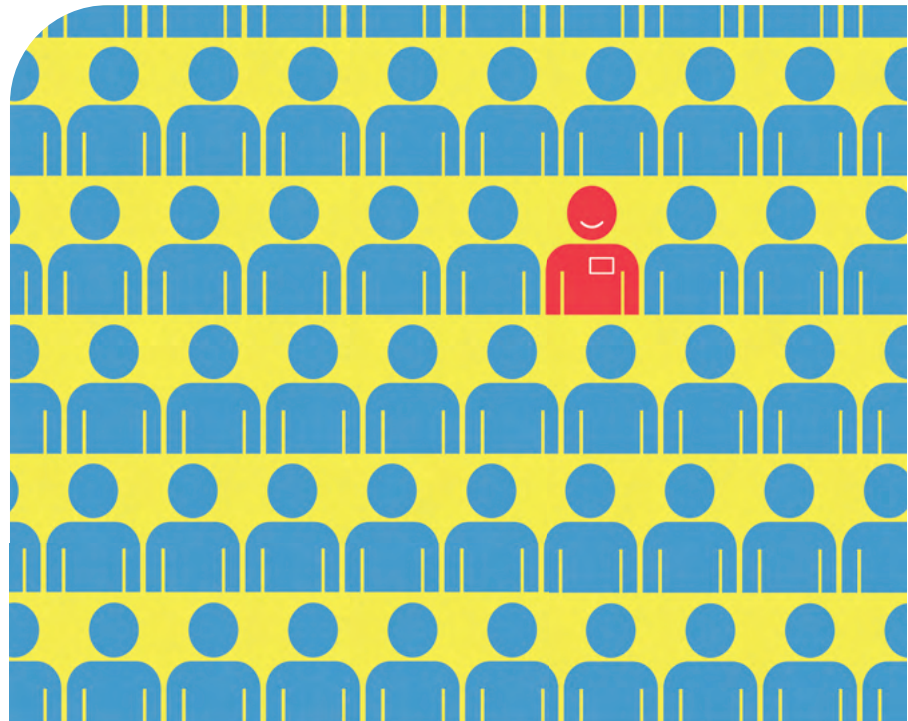
Mesin utamanya tetap: tatap muka, radio komunitas, poster, dan tokoh lokal. Tapi tanpa bensin medsos di era sekarang, mesin itu akan jalan sangat pelan. Jadi, gunakan media sosial secara cerdas, terukur, dan rendah hati— karena di desa, yang paling viral bukan filter cantik, tapi informasi yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan. ■

Praktek Government Public Relations di Daerah Terpencil, Pedoman Teknis bagi Humas Pemerintah

Daerah terpencil, tertinggal, dan kepulauan (3T) masih menjadi tantangan besar bagi humas pemerintah di Indonesia. Di banyak wilayah, sinyal telekomunikasi tidak stabil, infrastruktur transportasi masih sulit diakses, literasi masyarakat tidak merata, dan dukungan SDM maupun anggaran komunikasi masih terbatas. Strategi komunikasi publik yang berhasil di perkotaan tidak selalu bekerja di wilayah pedalaman. Di beberapa desa, bahkan poster digital dan rilis berita hanya menjadi dokumen yang tidak pernah dibaca.

Karena itu, para praktisi Government Public Relations perlu menyesuaikan strategi agar informasi pemerintah menjangkau seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di daerah paling jauh dari pusat pemerintahan. Tugas humas pemerintah bukan hanya menyebarkan pesan, tetapi memastikan pesan itu sampai, dipahami, dan diterima.

Langkah paling awal adalah memahami karakter masyarakat dan pola komunikasi yang hidup di wilayah tersebut. Di banyak lokasi, media tradisional seperti radio komunitas, pengeras suara masjid, gereja, pos ronda, atau tokoh



adat jauh lebih efektif dibanding media sosial. Bahasa lokal, istilah budaya, dan gaya komunikasi informal sering kali lebih mudah diterima dibanding bahasa birokrasi. Di Manggarai Barat misalnya, komunikasi pemerintah jauh lebih efektif ketika disampaikan melalui pertemuan adat bulanan dibanding postingan media sosial.

Untuk memperkuat keberlanjutan penyampaian informasi, pembentukan

relawan komunikasi desa menjadi kunci. Warga lokal yang terlatih dapat membantu menyampaikan pesan inti kepada masyarakat dan mengirimkan umpan balik kepada pemerintah. Insentif kecil seperti pulsa, seragam, sertifikat, atau pelatihan lanjutan dapat menjaga motivasi mereka tetap tinggi. Grup komunikasi digital boleh dibuat, namun harus terbatas dan hanya diisi pihak resmi agar tidak terjadi penyebaran informasi sebelum waktunya.



(Dok. Setneg)

Di wilayah tanpa sinyal, media cetak masih memegang peran penting. Poster ukuran besar dengan visual dominan, leaflet dua lipatan yang mudah ditempel, atau komik strip edukasi masih sangat efektif. Distribusi materi cetak bisa dilakukan melalui posyandu, sekolah, koperasi, dan warung kecil karena tempat-tempat itulah yang paling sering dikunjungi warga.

Radio komunitas dan pengeras suara

desa tetap menjadi medium paling strategis. Jam siaran pagi dan sore merupakan waktu terbaik karena warga sedang berkumpul sebelum beraktivitas atau selesai bekerja. Format dialog menggunakan narasumber tokoh masyarakat sering lebih efektif daripada template siaran formal.

Meski keterbatasan digital menjadi hambatan, konten digital tetap perlu disiapkan. Banyak warga memilih

“Bukan teknologi yang jadi tantangan terbesar, tetapi kedekatan, bahasa, dan kemampuan hadir langsung di tengah warga.”

“numpang sinyal” ke puncak bukit atau ke kecamatan. Karena itu, konten video sebaiknya ringkas: durasi maksimal satu menit, format vertikal, file ringan agar mudah dibagikan melalui Bluetooth atau flashdisk, serta narasi bahasa lokal.

Humas pemerintah juga perlu hadir di lapangan. Pertemuan tatap muka tetap menjadi format paling kuat untuk membangun kepercayaan. Pertemuan informal seperti “Ngopi Bareng Pak Kades” atau diskusi ringan di balai desa jauh lebih efektif menyampaikan pesan ketimbang acara resmi. Kehadiran langsung pemerintah menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya pengumuman, tetapi hubungan.

Umpan balik dari masyarakat harus dicatat dan ditindaklanjuti. Bentuknya dapat berupa formulir sederhana, kotak saran, atau laporan relawan desa. Respons pemerintah sebaiknya diberikan maksimal tujuh hari, meskipun jawabannya masih sementara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pengakuan bahwa suara mereka didengar.



(Dok. Istimewa)

Dalam situasi krisis seperti bencana alam atau penyebaran rumor sensitif, respon komunikasi harus cepat. Relawan desa dapat menjadi garda terdepan penyebaran informasi resmi dalam 24 jam pertama. Sistem kode warna sederhana—hijau untuk aman, kuning untuk waspada, merah untuk darurat—dapat membantu masyarakat memahami situasi dengan cepat.

Keberhasilan humas pemerintah di wilayah 3T tidak diukur dari viralnya unggahan digital atau jumlah penayangan video. Indikator keberhasilan lebih realistis, misalnya banyaknya warga yang hadir dalam sosialisasi, jumlah desa yang memajang poster resmi, jumlah re-

lawan aktif, dan kecepatan penyebaran informasi saat krisis. Sejumlah praktik baik di Indonesia mulai menunjukkan hasil. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur membentuk 280 Relawan Informasi Desa dan berhasil meningkatkan partisipasi pemilih hingga 87 persen di daerah terpencil. Dinas Kominfo Papua Pegunungan menggunakan drone untuk mengirim flashdisk berisi video edukasi ke kampung-kampung terisolasi. Kementerian Desa PDTT meluncurkan program “Bale Desa Digital” dengan fasilitas parabola dan televisi untuk ribuan desa tertinggal.

Semua contoh tersebut memberi pesan yang sama: keberhasilan komunikasi

publik di daerah terpencil tidak bergantung pada teknologi canggih, tetapi pada kedekatan, adaptasi budaya, dan konsistensi.

Pada akhirnya, humas pemerintah yang berhasil bukanlah yang paling mahir membuat siaran pers, tetapi yang paling rajin turun ke lapangan, berbicara dengan bahasa masyarakat, dan mendengarkan suara rakyat secara langsung. Dengan pendekatan yang rendah hati dan berbasis kearifan lokal, gap informasi antara pemerintah dan masyarakat terpencil bukan hanya dapat dijembatani, tetapi dapat dihapus perlahan—hingga tidak ada lagi warga negara yang tertinggal dari arus informasi pembangunan. ■

Narasi Nasionalisme, Kedaulatan, dan Ketahanan Pangan di Era Kabinet Merah Putih

Dalam 13 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tiga narasi besar kembali digaungkan dengan volume dan konsistensi yang belum pernah terjadi sejak era Orde Baru: nasionalisme, kedaulatan, dan ketahanan pangan. Ketiga narasi ini tidak hanya menjadi slogan, melainkan dijadikan kerangka komunikasi publik terpadu yang melibatkan seluruh kementerian, TNI-Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah.

Presiden Prabowo sejak pidato pelantikan 20 Oktober 2024 telah menetapkan satu kalimat yang kini menjadi “mantra” komunikasi nasional “Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton di rumah sendiri.” Kalimat ini diulang dalam 87 pidato resmi (data Setpres hingga November 2025) dan menjadi tagline utama di seluruh media sosial resmi pemerintah (@prabowo, @kemenhanri, @kemendagri, dsb).

Narasi nasionalisme diperkuat melalui beberapa beleid, seperti program wajib bela negara bagi PNS dan pelajar SMA (Perpres No. 89/2025), Pengibaran ben-



dera Merah Putih terbesar di dunia (120 x 180 m) di IKN pada 17 Agustus 2025. Kampanye “Bangga Buatan Indonesia” fase II dengan anggaran promosi Rp 2,3 triliun. Penayangan film dokumenter “Indonesia Maju” di 12.500 sekolah dan 4.800 desa setiap Jumat pagi.

Hasilnya, Indeks Kebanggaan Nasional (survei LSI Strategy, Oktober 2025) naik dari 78,4 % menjadi 89,7 % dalam setahun—tertinggi sejak 2004.

Kedaulatan: Bahasa yang Kembali Tegas

Kata “kedaulatan” muncul 312 kali dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo sepanjang 2025—terbanyak dibandingkan semua presiden pasca-Reformasi. Kedaulatan tidak lagi hanya soal politik luar negeri, tetapi diperluas ke ranah ekonomi, pangan, energi, dan digital.

Beberapa kebijakan komunikatif yang memperkuat narasi ini, seperti penolakan impor beras 3,2 juta ton (Juni 2025) dengan pernyataan tegas “Kedaulatan pangan lebih penting daripada kedaulatan diplomatik sementara.” Pengambilalihan 51 % saham Freeport tahap akhir (September 2025) yang disiarkan langsung dan ditonton 42 juta viewers. Larangan ekspor nikel mentah dan bauksit diperluas ke tembaga dan timah (Perpres 97/2025). Pembentukan Satgas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat, Laut, Udara (SK Presiden 11/2025) yang langsung viral karena jargon “Satu inci pun tidak boleh hilang.”

Narasi kedaulatan ini berhasil menurunkan indeks ketergantungan impor strategis dari 31 % (2024) menjadi 19 % (proyeksi akhir 2025) dan meningkatkan approval rating Prabowo di kalangan generasi Z hingga 76 % (Indikator Politik, Nov 2025).

Ketahanan Pangan: Program yang Menyentuh Perut Rakyat

Presiden Prabowo menetapkan ketahanan pangan sebagai “jihad nasional”—kata yang sengaja dipilih untuk memberikan bobot emosional dan religius sekaligus. Program makan siang gratis (MBG) yang mulai berjalan 2 Januari 2025 di 38 provinsi kini menjadi ikon komunikasi pemerintah.

Strategi komunikasi ketahanan pangan yang patut dicatat seperti penayangan video pendek “Satu Hari Tanpa Impor” setiap Senin di 180 juta HP melalui push notification aplikasi PeduliLindun-

gi dan SATU.SEHAT. Kampanye “Lumbung Pangan Desa” yang melibatkan 74.961 desa dengan anggaran Rp 87 triliun (APBN + APBDes). Penghargaan “Pahlawan Pangan” setiap bulan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM pangan yang disiarkan langsung di TV nasional. Penggunaan influencer mikro (petani Milenial) yang berhasil menjangkau 68 juta views organik di TikTok dengan tagar #PanganMerdeka.

Hasil konkretnya antara lain produksi beras nasional naik 5,8 juta ton (data BPS, Okt 2025). Angka stunting turun dari 21,6 % (2024) menjadi 14,2 % (proyeksi akhir 2025). Sentimen positif terhadap program pangan pemerintah mencapai 84 % (SMRC, Nov 2025).

Sinergi Tiga Narasi: Satu Pesan Besar

Ketiga narasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan, karena kata “Nasionalisme” membangkitkan rasa memiliki. Adapun dengan kata “Kedaulatan” menjamin kendali atas sumber daya, dan kata “Ketahanan pangan” memberikan bukti nyata bahwa negara hadir di perut rakyat.

Dalam istilah GPR, ini adalah contoh sempurna integrated government communication, satu pesan besar yang diulang di semua kanal, dari pidato presiden hingga spanduk desa, dari TikTok Kementan hingga sirene TNI di perbatasan.

Pelajaran bagi Praktisi Humas Pemerintah, adalah dengan menggunakan

“Pelajaran bagi Praktisi Humas Pemerintah, adalah dengan menggunakan bahasa emosional yang membakar semangat, bukan hanya data kering. Repetisi adalah kekuatan—ulang pesan inti hingga menjadi “mantra” nasional. “

bahasa emosional yang membakar semangat, bukan hanya data kering. Repetisi adalah kekuatan—ulang pesan inti hingga menjadi “mantra” nasional. Libatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai juru bicara (petani, prajurit, pelajar). Berani tegas, karena di era disrupsi informasi, rakyat justru menghargai kejujuran yang keras.

Di tengah gempuran narasi globalisasi dan liberalisasi, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil membalikkan arus dengan narasi nasionalisme, kedaulatan, dan ketahanan pangan yang terintegrasi. Ini bukan sekadar strategi komunikasi—ini adalah rekonstruksi identitas bangsa yang sedang berlangsung di depan mata kita.

Praktisi GPR di semua tingkatan kini memiliki tugas yang sama, yakni menjaga nyala api tiga narasi ini agar terus menyala hingga pelosok negeri, hingga anak cucu kita tetap bisa berkata dengan bangga, “Ini tanah air kita, ini pangan kita, ini Indonesia kita.” ■

Asta Cita dan GPR, Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun kedua dengan visi besar: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Fondasi utamanya adalah Asta Cita—delapan misi strategis pembangunan nasional yang menjadi arah reformasi pemerintahan. Dalam kacamata Government Public Relations (GPR), Asta Cita bukan hanya kebijakan, tetapi pesan publik yang harus dipahami sebagai janji dan arah masa depan bangsa.

Pada awal 2025 sempat muncul narasi pesimistis “Indonesia Gelap” yang viral, menjadi refleksi bahwa komunikasi pemerintah belum menyentuh publik secara maksimal. Presiden Prabowo merespons cepat dan menyatakan bahwa narasi ke rakyat “belum cukup intensif.” Dari titik itulah strategi komunikasi mulai diperbaiki agar lebih terbuka, argumentatif, dan membumi.

Asta Cita kini diimplementasikan melalui RPJMN 2025–2029 yang mencakup pembangunan ekonomi rakyat, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, peningkatan SDM, reformasi hukum, diplomasi global, hingga modernisasi pertahanan negara. Pro-

gram-program ini mulai terlihat dalam langkah konkret seperti revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa yang memprioritaskan UMKM, percepatan bansos digital, dan program penguatan generasi muda melalui Kemenpora.

Komunikasi kebijakan kemudian dirancang lebih adaptif. Melalui Presidential Communication Office (PCO), pemerintah menghadirkan format komunikasi yang lebih mudah dicerna publik: video singkat, dialog langsung, konten edukatif di media sosial, serta forum public hearing yang memberi ruang umpan balik. Kampanye digital seperti “Indonesia Cerah” membantu membangun optimisme publik sekaligus menangkal misinformasi. Salah satu video singkat Asta Cita bahkan menembus 10 juta penayangan di TikTok dalam hitungan hari.

Hasilnya mulai terlihat. Survei CELIOS 2025 mencatat peningkatan 25% persepsi publik terhadap kesesuaian program pemerintah dengan kebutuhan rakyat, terutama dalam isu pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan stabilitas harga. Namun tantangan masih ada: komunikasi harus menjangkau pedesaan dan wilayah 3T agar Asta Cita tidak berhenti di ruang digital perkotaan.

“Indonesia Gelap” yang viral, menjadi refleksi bahwa komunikasi pemerintah belum menyentuh publik secara maksimal. Presiden Prabowo merespons cepat dan menyatakan bahwa narasi ke rakyat “belum cukup intensif.”

Dalam sebuah pernyataan di Hambalang, November 2025, Presiden Prabowo mengatakan, “Kita harus pastikan setiap kebijakan dirasakan rakyat.” Bagi para pelaksana komunikasi pemerintahan, pernyataan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi juga kepercayaan. Dengan komunikasi yang lebih manusiawi, transparan, dan konsisten, Asta Cita bukan sekadar visi di atas kertas, melainkan pijakan menuju Indonesia Emas 2045 yang benar-benar dirasakan masyarakat. ■

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SARADANG

Desa Saradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Pembangunan Kawasan Industri (KI) Seradang di Kabupaten Tabalong memiliki luas 1.017 HA dengan luas kawasan perancangan 220,31254 HA dan sangat ideal untuk industri manufaktur, agroindustri, serta energi terbarukan

Aspek Teknis

Akses melalui jalan nasional (Trans Kalimantan)
Topografi didominasi elevasi rendah (0-2%)
Ketersediaan jaringan jalan primer (ROW 40), sekunder (ROW 30), dan tersier (ROW 20)
Sistem drainase membuang air limpasan hujan dari lahan 220,3 Ha ke anak sungai terdekat

Suplai

Suplai air melalui pipa PDAM, sungai, dan embung buatan kapasitas awal 1500 m³/hari
Kebutuhan daya listrik 24,85 MVA Jaringan telekomunikasi fiber optik Sanitasi dan pengolahan limbah melalui Waste Water Treatment Plant dengan sistem Activated Sludge Extended Aeration

Peluang Pasar

Permintaan pasar meningkat untuk industri manufaktur dan logistik di Kalimantan
Potensi pasar dari sektor agribisnis, batubara, dan hilirisasi mineral
Fokus pada industri ramah lingkungan dan kemudahan investasi
Target segmentasi pasar: sektor manufaktur, logistik, dan agribisnis

Legalisasi

Didukung oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait perindustrian dan kawasan industri Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tabalong tentang rencana pembangunan industri dan tata ruang

Environmental

Kepatuhan terhadap Environmental and Social Standards (ESS), terutama ESS1 dan ESS3 Upaya mitigasi pencemaran melalui pembangunan WWTP dan implementasi teknologi hijau

Partnership

Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP) melalui skema Build Operate and Transfer (BOT)
Pemerintah Kabupaten menyediakan lahan (±5 Ha) dengan skema sewa lahan

Bisnis

Estimasi investasi: Rp 4,2 Triliun
Sumber: Kerjasama pihak ketiga (Swasta)
ROI sebesar 10% BEP dalam 10 tahun

**AYO DATANG
KE
TABALONG**



Ir. H. M. Noor Rifani, SH, ST, MT
BUPATI TABALONG

Habib M. Taufani Alqaf, S. Kom, MM
WAKIL BUPATI TABALONG



0812-5068-1000



invest.tabalongkab.go.id



Dpmpstsp Tanjung



dpmpstptabalong



3 ANNUAL EDITION 2025

- Gaya Komunikasi Menteri Purbaya
Terbuka, Bangun Perubahan Ekonomi
dan Kepercayaan Rakyat
- Transparansi Komunikasi dan
Partisipasi Publik, Dua Arus Utama Arah
Kebijakan Era Presiden Prabowo
- Gaya Komunikasi Prabowo Keren,
Ini Panduan Pejabat Publik dan Humas
Pemerintah Laksanakan GPR di Daerah



GPR
UPAYA NYATA
BUMIKAN ASTACITA

EDISI 3 TAHUN 2025



0 335 000001 5544411115
www.gprinstitute.id